

RINGKASAN DISERTASI

Bambang Pristiwanto



STRATEGI POLRI DALAM MENANGANI INTOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA

(Studi Kasus di Polres Sleman,
Polresta Surakarta, dan Polres Temanggung)

UII
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Kekerasan
Atas Nama Agama**

**STRATEGI POLRI DALAM MENANGANI
INTOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA
(Studi Kasus di Polres Sleman, Polresta Surakarta,
dan Polres Temanggung)**



Oleh:

Bambang Pristiwanto

NIM: 17300016073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DISERTASI
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Studi Antar Iman

**YOGYAKARTA
2020**

PENGESAHAN

Judul Disertasi : STRATEGI POLRI DALAM MENANGANI INTOLERANSI
BERAGAMA DI INDONESIA (Studi Kasus di Polres
Sleman, Polresta Surakarta, dan Polres Temanggung)
Ditulis oleh : Bambang Pristiwanto
NIM : 17300016073
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Studi Antar Iman1

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 19 Agustus 2020



Rektor,
Kema Sidang,

Prof. Dr. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. 19720912 200112 1 002

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Bambang Pristiwanto ()
NIM : 17300016073
Judul Disertasi : STRATEGI POLRI DALAM MENANGANI INTOLERANSI BERAGAMA DI
INDONESIA (Studi Kasus di Polres Sleman, Polresta Surakarta, dan Polres
Temanggung)

Ketua Sidang : Prof. Dr. Al Makin, S.Ag., M.A. ()

Sekretaris Sidang : Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si. ()

Anggota : 1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. ()
(Promotor/Penguji)
2. Dr. H. A. Singgih Basuki, M.A. ()
(Promotor/Penguji)
3. Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A. ()
(Penguji)
4. Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A. ()
(Penguji)
5. Prof. Dr. H. Machasin, M.A. ()
(Penguji)
6. Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D. ()
(Penguji)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 13.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 3.80
Predikat Kelulusan : Pujian (Cum laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan



Sekretaris Sidang,

Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
NIP. 19680605 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Bambang Pristiwanto

NIM : 17300016073

Program : Doktor

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 April 2020

Saya yang menyatakan,



Bambang Pristiwanto

NIM. 17300016073



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. (

Promotor : Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A. (

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertai berjudul:

**STRATEGI POLRI DALAM MENANGANI INTOLERANSI
BERAGAMA DI INDONESIA**

(Studi Kasus di Polres Sleman, Polresta Surakarta, dan Polres Temanggung)

Yang ditulis oleh:

N a m a : Bambang Pristiwanto

NIM : 17300016073

Jenjang : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.,

Yogyakarta, 04 Juli 2020

Promotor,

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA**

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**STRATEGI POLRI DALAM MENANGANI INTOLERANSI
BERAGAMA DI INDONESIA**

(Studi Kasus di Polres Sleman, Polresta Surakarta, dan Polres Temanggung)

Yang ditulis oleh:

N a m a : Bambang Pristiwanto

NIM : 17300016073

Jenjang : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.,

Yogyakarta, 04 Juli 2020

Promotor,


Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.
NIP. 19560203 198203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**STRATEGI POLRI DALAM MENANGANI INTOLERANSI
BERAGAMA DI INDONESIA**

(Studi Kasus di Polres Sleman, Polresta Surakarta, dan Polres Temanggung)

Yang ditulis oleh:

N a m a : Bambang Pristiwanto

NIM : 17300016073

Jenjang : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.,

Yogyakarta, 07 Juli 2020

Penguji,

Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.

NIP. 19701024 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**STRATEGI POLRI DALAM MENANGANI INTOLERANSI
BERAGAMA DI INDONESIA**

(Studi Kasus di Polres Sleman, Polresta Surakarta, dan Polres Temanggung)

Yang ditulis oleh:

N a m a : Bambang Pristiwanto

NIM : 17300016073

Jenjang : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.,

Yogyakarta, 03 Juli 2020

Penguji,

Prof. Dr. H. Machasin, M.A.

NIP. 19561013 198103 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertai berjudul:

**STRATEGI POLRI DALAM MENANGANI INTOLERANSI
BERAGAMA DI INDONESIA**

(Studi Kasus di Polres Sleman, Polresta Surakarta, dan Polres Temanggung)

Yang ditulis oleh:

N a m a : Bambang Pristiwanto

NIM : 17300016073

Jenjang : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.,

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Penguji,

Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.

NIP. 19530727 198303 1 005



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan intoleransi beragama, memetakan tipologi kasus intoleransi beragama, serta menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian selama ini untuk menangani kasus-kasus tersebut. Area yang dipilih sebagai lokus studi ini adalah Kabupaten Sleman, Kota Surakarta dan Kabupaten Temanggung. Alasan pemilihan ketiga wilayah tersebut didasarkan pada data Polri yang menyebutkan bahwa wilayah tersebut terindikasi mempunyai potensi intoleransi beragama yang tinggi dibanding daerah lain, sehingga potret di ketiga wilayah tersebut diharapkan merepresentasikan fenomena intoleransi beragama secara umum di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif fenomenologis melalui wawancara terhadap para informan yakni kepolisian, tokoh agama, pemerintah, dan akademisi sehingga didapatkan gambaran secara utuh atas kondisi sebenarnya. Studi ini berhasil mengidentifikasi bahwa intoleransi beragama di Indonesia disebabkan oleh sengkabut administratif, kebijakan yang tidak akomodatif dan ketidaktegasan pemerintah, terjadinya perebutan ruang publik dan sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, menguatnya politik identitas, dan belum optimalnya peran kepolisian. Temuan lain adalah intoleransi beragama di tiga wilayah tersebut termanifestasi dalam bentuk kekerasan fisik dan simbolik. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa tindakan kepolisian untuk mengatasi kasus intoleransi beragama cenderung kurang optimal karena belum dirumuskannya strategi yang sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu, sesuai dengan teori Johan Galtung dibutuhkan perbaikan menyeluruh dari aspek strategi penanganan meliputi *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*; modifikasi strategi penanganan intoleransi beragama Polri dengan menambahkan unsur protektif; penguatan kapasitas anggota kepolisian dan pembentukan lembaga yang fokus pada penanganan intoleransi beragama; serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak seperti masyarakat, lembaga negara lain, dan media massa.

Kata kunci: intoleransi beragama, tipologi kasus, penguatan Polri, modifikasi strategi

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the factors that cause religious intolerance, map the typology of cases of religious intolerance, as well as explain the efforts made by the police so far to handle these cases. The areas chosen as the location of this study are Sleman Regency, Surakarta City and Temanggung Regency. The reason for the selection of the three regions is based on the National Police data, which states that these regions are indicated to have a high potential for religious intolerance compared to other regions, so portraits in the three regions are expected to represent the phenomenon of religious intolerance in Indonesia in general. The research method used is qualitative phenomenology through interviews with informants namely the police, religious leaders, government, and academics so that a complete picture of the actual condition is obtained. This study succeeded in identifying that religious intolerance in Indonesia is caused by administrative chaos, unaccommodating policies and government indecisiveness, the struggle for public space and economic resources among the people, the strengthening of identity politics, and the non-optimal role of the police. Another finding is that religious intolerance in the three regions are manifested in the form of physical and symbolic violence. This research also discovers that police actions to overcome cases of religious intolerance tend to be less optimal because there is not a systematic and comprehensive strategy formulated. Therefore, in accordance with Johan Galtung's theory, a comprehensive improvement is needed from the aspect of handling strategies, including peacekeeping, peacemaking, and peacebuilding; modification of the police's strategy to handle religious intolerance by adding protective elements; strengthening the capacity of police officers and establishing institutions that focus on handling religious intolerance; and strengthening cooperation with various parties such as the community, other state institutions, and mass media.

Keywords: religious intolerance, case typology, police reinforcement, strategy modification

ملخص

يغرض لهذا البحث كشف العناصر وتحليلها التي تؤدي إلى التعصب الديني، وتصنيف الخريطة للقضايا التعصبية الدينية، وبيان المحاولات التي تم تنفيذها من قبل رجال الشرطة طوال حلهم للقضايا السابق ذكرها. والمناطق المختارة كمواضع البحث هي منطقة سليمان ومدينة سوراكارتا ومنطقة تمانجونج. وذلك لأن المناطق الثلاث المعينة تستند إلى المعطيات الشرطية باعتبارها عن إمكانية التعصب الديني الفائق بالمقارنة بالمناطق الأخرى، فكانت صورة المناطق الثلاث تمثيلة لظواهر التعصب الديني في إندونيسيا بشكل عام.

كان منهج البحث المستخدم هو منهج النوعي-الظاهري عبر المقابلة نحو المخبرين، وهم رجال الشرطة ورجال الدين والحكومة والأكاديميون حتى يتوصل إلى الصورة الكافية عن حقيقة الوضع. وحصل هذا البحث إلى نتيجة الكشف عن أن من أسباب التعصب الديني في إندونيسيا هو الفوضى الإداري والسلطة اللا متكيفة وعدم صرامة الحكومة والنضال في الفضاء العام والموارد الاقتصادية في المجتمع وتعزيز سياسة هوية وعدم مثالية دور الشرطة. والاكتشاف الآخر هو أن التعصب الديني في تلك المناطق الثلاث تتجلى في نمط الاعتداء الجسدي والرمزي. ويكشف هذا البحث أن إجراءات الشرطة لحل قضايا التعصبية الدينية تميل إلى قلة الإمتثال، وذلك لأن عدم تصميم استراتيجية الإجراء المنهجي والشاملي. ولذلك، طبقا لنظرية جوهان كالتونج أنه من المحتاج الإصلاح الشامل من حيث الناحية الاستراتيجية لحل القضايا، وهي تحتوي على حفظ السلام وصنع السلام وبناء السلام: أي تعديل استراتيجية الحل للتعصب الديني للشرطة بزيادة عنصر الحماية، وتعزيز قدرة أعضاء الشرطة وبناء الهيئة المركزة على حل التعصب الديني وتعزيز التعاون مع الجميع، مثل المجتمع والهيئات الحكومية للدول الأخرى ووسائل الإعلام الجماهيرية.

الكلمات الأساسية: التعصب الديني، التصنيف الحالي، تعزيز الشرطة، التعديل الإستراتيجي



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang berkenan memberikan kesempatan, kemampuan dan semangat sehingga studi ini dapat diselesaikan dengan baik, sebagai salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor pada Program Studi (Prodi) Studi Antar Iman, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Tema disertasi ini diangkat berdasarkan kegelisahan masyarakat, pemerintah, akademisi, dan tokoh-tokoh agama terkait berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya intoleransi beragama di Indonesia pasca Orde Baru hingga tahun 2018 lalu. Penelitian ini juga menyoroti tipologi kasus intoleransi beragama yang terjadi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanganinya. Lokus penelitian pada 3 (tiga) daerah yaitu Kabupaten Sleman, Kota Surakarta dan Kabupaten Temanggung, sebab data Polri mencatat ketiga wilayah itu terindikasi mempunyai potensi intoleransi beragama yang tinggi dibanding daerah lain. Potret di ketiga wilayah tersebut diharapkan merepresentasikan kasus intoleransi beragama secara umum di Indonesia. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 5 (lima) penyebab intoleransi beragama di Indonesia. Pertama, akibat sengkabut administrative. Kedua, kebijakan yang tidak akomodatif dan ketidaktegasan pemerintah. Ketiga, terjadinya perebutan ruang publik dan sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat. Keempat, menguatnya politik identitas. Kelima, belum optimalnya peran Polri dalam mengatasi kasus intoleransi beragama karena belum dirumuskannya strategi yang sistematis dan komprehensif. Oleh

karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa kebijakan yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi institusi Polri di masa mendatang, khususnya dalam mengantisipasi dan menangani kasus intoleransi beragama yang terjadi di Indonesia, yaitu dibutuhkan perbaikan menyeluruh dari aspek strategi penanganan meliputi *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. Berikutnya, pembentukan lembaga yang fokus pada penanganan intoleransi beragama dan penguatan internal Polri melalui penguatan kapasitas anggota kepolisian. Selanjutnya, perlunya penguatan kerja sama dengan berbagai pihak seperti masyarakat, lembaga negara lain, dan media massa. Kiranya hasil penelitian ini dapat menjadi berkat bagi institusi Polri dalam mengawal berjalannya toleransi beragama di Indonesia secara optimal, sekaligus dalam mengayomi dan melayani masyarakat.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu di bawah ini, yang telah berperan besar dalam proses studi penulis sejak awal hingga disertasi ini diselesaikan dan akhirnya berhasil meraih gelar Doktor dalam bidang Studi Antar Iman-UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta.

1. Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga-Yogyakarta, Dr. Phil. Sahiron, M.A.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga-Yogyakarta, sekaligus Ketua Tim Promotor disertasi penulis, Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., yang telah memberikan banyak bimbingan serta motivasi selama penulis menempuh studi di Program Studi Antar Iman, UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta, dan terus mendukung penyelesaian studi penulis.
3. Promotor disertasi penulis, Dr. Ahmad Singgih Basuki, M.A., yang terus memberikan masukan konstruktif dan semangat hingga studi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
4. Ahmad Rafiq, S.Ag., M.A., Ph.D., Kepala Program Studi Doktor UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta.
5. Munirul Ikhwan, Lc., M.A., Ph.D., Sekretaris Program Studi Doktor UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta.

6. Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A., Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta yang sekaligus penguji disertasi penulis.
7. Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A., Ketua Senat Akademik UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta, yang sekaligus penguji disertasi penulis.
8. Prof. Dr. H. Machasin, M.A., dosen tetap Program Doktor UIN Sunan Kalijaga, yang sekaligus penguji disertasi penulis.
9. Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si., Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melanjutkan studi Doktor ini.
10. Komjen Pol. Drs. Moechgiyanto, S.H, M.Hum., Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, yang terus memotivasi penulis dalam proses studi hingga tercapainya gelar Doktor ini.
11. Irjen Pol Drs. Umar Septono, S.H, M.H., Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri, yang telah memberikan perhatian penuh atas studi yang penulis tempuh hingga disertasi ini disajikan di hadapan para pembaca.
12. Brigjen Pol Drs. I Ketut Argawa, S.H., M.H., Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karo Renmin) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, yang terus memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.
13. Brigjen Pol Iriyanto, S.I.K., Inspektur Wilayah (Irwil) III, Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, yang terus memberikan semangat bagi penyelesaian studi penulis.
14. Mayjen Pol (Purn) Drs. Sidarto Danusubroto, S.H., yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia periode tahun 2019-2024, bagi penulis sebagai orangtua yang terus memberikan wejangan, petunjuk hidup serta nilai-nilai semangat perjuangan bagi tercapainya gelar Doktor ini. Matur nuwun sanget untuk setiap sentuhan dan teladan yang diberikan kepada penulis.
15. Para Kapolres di Kabupaten Sleman, Kabupaten Temanggung dan Kota Surakarta, para anggota Polri di 3 daerah tersebut, para

pimpinan FKUB di 3 daerah tersebut, para informan, dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kesediaan Bapak/Ibu serta rekan-rekan membantu penyelesaian riset penulis hingga studi ini dapat selesai dengan baik.

16. Dr. Raja H. Napitupulu, Adik sekaligus teman diskusi penulis yang saling memotivasi serta mempertajam pemikiran akademis mulai awal studi dimulai hingga tercapainya gelar Doktor ini. Terima kasih untuk dukungan, doa dan perhatian bagi Kanda selama proses studi berlangsung. Tuhan memberkati setiap perjuangan dan karya kita bersama bagi Ibu Pertiwi.
17. Seluruh rekan-rekan penulis yang mendukung penyelesaian penelitian ini, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Tuhanlah yang memberkati rekan-rekan semua dan semoga ilmu kita bermanfaat bagi banyak masyarakat.
18. Keluarga Besar Bapak Sadi Nu Ihsan, orangtua penulis yang terus mendoakan dan mendidik sejak kecil hingga saat ini. Capaian gelar Doktor ini, penulis persembahkan kepada orangtua yang penulis kasihi. Tuhan senantiasa memberkati Bapak.
19. Keluarga Besar (alm) Bapak Rahmat Tandawijaya, mertua penulis yang senantiasa memberikan nasihat dan doa-doa bagi kemajuan studi serta karier penulis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
20. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih dan rasa sayang kepada anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan penulis, yaitu putri tercinta E. Alexandra 'Nonik' Lawrence dan J. Alexander 'Sinyo' Calvin. Doa, pengertian dan dukungan kalian berdua menjadi motivasi dan pendorong Papa untuk menyelesaikan studi ini dan berhasil meraih gelar Doktor.
21. Ucapan terima kasih terdalam serta syukur yang tak putus-putusnya, juga penulis ucapkan kepada istri tercinta, Eka Kartika Sari, SH., M.Th., yang selalu mendampingi penulis dalam suka dan duka, menjadi teman diskusi yang sangat konstruktif, sejak

proses studi dimulai hingga gelar Doktor ini penulis capai. Terima kasih Mama untuk kesehatan yang tercipta sehingga studi ini bisa selesai, dan bersama kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah melalui studi ini. Segala kemuliaan hanya bagi DIA, sekarang dan selamanya.

Yogyakarta, 17 April 2020

Penulis,



Kombes Pol. Dr. Bambang Pristiwanto, SH. , MM.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Dan Bebas Plagiarisme	iii
Nota Dinas Promotor	iv
Abstract.....	xiii
Abstrak.....	xiv
Kata Pengantar.....	xvii
Daftar Isi	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	14
F. Kerangka Teoretis.....	20
1. Pendekatan Teori Rekonsiliasi Johan Galtung; <i>Peace-keeping, Peace-making, Peace-building</i>	20
2. Toleransi dan Intoleransi Menurut Para Ahli	30
G. Metode Penelitian	37
1. Pendekatan Penelitian.....	37
2. Lokasi Penelitian.....	38
3. Subjek dan Objek Penelitian	39

4. Teknik Analisis Data.....	40
5. Teknik Keabsahan Data	40
H. Sistematika Pembahasan	41
BAB II TERJADINYA KASUS INTOLERANSI BERAGAMA.....	43
A. Keberagaman dalam Kehidupan Bangsa di Dunia.....	43
1. Masa Demokrasi Terpimpin Soekarno (1959–1965)...	45
2. Masa Orde Baru Soeharto (1965–1998)	47
3. Masa Reformasi (1998–2019)	52
B. Pudarnya Toleransi Beragama dan Terjadinya Kasus- kasus Intoleransi Beragama serta Penanganannya	60
C. Sebab Terjadinya Kasus-kasus Intoleransi Beragama ..	64
1. <i>Law legitimation</i>	64
2. <i>Public Legitimation</i>	67
3. Politik.....	71
4. Ekonomi dan Kesejahteraan.....	73
5. Perebutan Ruang Publik.....	77
BAB III TIPOLOGI KASUS-KASUS INTOLERANSI BERAGAMA.....	81
A. Kekerasan Fisik	82
1. Kekerasan di Kotamadya Surakarta.....	87
2. Kekerasan di Kabupaten Temanggung	94
3. Kasus Intoleransi Beragama di Kabupaten Sleman..	98
B. Kekerasan Simbolik.....	101
1. Kekerasan di Kotamadya Surakarta.....	102
2. Kekerasan di Kabupaten Temanggung	104
3. Kekerasan di Kabupaten Sleman	105
BAB IV PERAN POLRI DALAM MENANGANI INTOLERANSI BERAGAMA SAAT INI.....	107
A. Tugas Pokok dan Wewenang Umum serta Kebijakan Polri	107
B. Penanganan Intoleransi Beragama oleh Polri Saat Ini	119
1. Kotamadya Surakarta	119
2. Kabupaten Temanggung	123

3. Kabupaten Sleman	125
C. Sengkarut dan Masih Kurang Maksimalnya Penanganan Intoleransi Beragama	126
1. Langkah Kebijakan, Aturan Jelas dan Tegas	126
2. Belum Adanya Struktur Polri yang Khusus Menangani Intoleransi Beragama	129
3. Belum Maksimalnya Kemampuan personil Polri yang Khusus Menangani Intoleransi Beragama.....	130
4. Belum Optimalnya Koordinasi dengan Instansi Lain, Masyarakat dan Media Massa	133
BAB V STRATEGI POLRI YANG HARUS DILAKSANAKAN DALAM MENANGANI INTOLERANSI BARAGAMA.....	145
A. Modifikasi Langkah Strategi yang Dilakukan Polri dalam Menangani Intoleransi Beragama	145
1. Implementasi Teori Johan Galtung	150
2. Inovasi Tahapan dalam Menangani Intoleransi Beragama	157
B. Meningkatkan Penguatan Internal Polri	162
1. Membentuk Struktur Baru di Dalam Polri yang Lebih Besar	162
2. Mencetak Personel yang Berkemampuan dalam Bidang Penanganan Intoleransi Beragama	163
C. Mengoptimalkan Sosialisasi dan Kerjasama	172
1. Sosialisasi tentang Toleransi Beragama kepada Masyarakat.....	173
2. Meningkatkan Kerja Sama Antar Lembaga Negara	178
3. Membangun Kerja Sama dengan Masyarakat dan Media Massa	180
BAB VI PENUTUP	183
A. Kesimpulan	183
B. Saran dan Rekomendasi.....	186

DAFTAR PUSTAKA.....	187
Buku	187
Artikel.....	190
Sumber Elektronik Dan Internet	194
Lain-Lain	198



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tipologi Kekerasan Struktural Galtung	24
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Strategi Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	146
Gambar 5.3 Modifikasi Langkah-langkah Penanganan Intoleransi Beragama Polri	164
Gambar 5.4 Kerjasama antara Kepolisian, Masyarakat, Pemerintah, dan Media Massa.....	173



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remuknya jangkar politik Orde Baru yang dinahkodai Soeharto pada tahun 1998 memberikan angin segar kebebasan kepada masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Gegap-gempita dan harapan masyarakat membunyah, setelah gelombang krisis ekonomi yang menenggelamkan kapal politik Soeharto runtuh menjadi kenyataan. Runtuhnya rezim Soeharto menyiratkan harapan bangsa Indonesia untuk berjalan melesat menuju tahap yang lebih baik; terlepas dari krisis ekonomi dan politik yang sudah terasa terlampau memilukan selama 32 tahun lamanya. Era keterbukaan dan demokratisasi mulai bergulir di mana-mana.

Sejak tahun 1998, iklim dan angin reformasi menerpa seluruh elemen bangsa, bahkan hingga ke bagian terkecilnya. Situasi ini melahirkan cita-cita besar untuk mengganti sistem politik pemerintahan ala Soeharto yang sentralistis menjadi 'desentralisasi' dan 'integrasi' politik,¹ sesuatu yang dianggap sebagai ruh Reformasi dan sistem demokrasi secara umum. Sistem politik 'desentralisasi' diharapkan mampu menjadi antitesis politik Soeharto yang buruk. Desentralisasi dipandang mampu mengakomodasi semua kepentingan

politik masyarakat menjadi terintegrasi sama sekali.

Harapan besar terhadap sistem reformasi yang demokratis dan dialektis, menyalakan semangat masyarakat untuk bertumbuh, menuju tahap yang lebih baik sebagai bangsa. Euforia berdentum di mana-mana, namun tidak sepenuhnya mampu mengangkat bangsa keluar dari lingkaran krisis yang sudah lama menjerat, karena euforia demokrasi yang kebablasan. Pancasila sebagai filosofi negara tergilas, terlupakan, seolah tidak lagi relevan untuk diikutsertakan dalam langgam reformasi. Ia menjadi jarang untuk diucapkan sebagai '*magis*', dikutip sebagai landasan dasar dalam kehangatan bernegara, bahkan Pancasila dapat dikatakan kehilangan esensinya di dalam kegembiraan euforia reformasi.² Pancasila terpinggirkan dari narasi hiruk pikuk demokrasi dan kebebasan berpolitik yang ditandai dengan meledaknya kepentingan-kepentingan personal dan komunal yang berlebihan, melenyapkan kesabaran sosial yang berujung pada munculnya disintegrasi sosial, menghancurkan martabat hukum, moral, dan kesantunan sosial masyarakat.³ Situasi inilah yang mendorong pecahnya konflik-konflik sosial di masyarakat, yang cenderung berurat-berakar dari masalah etnis dan agama, terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Kalimantan, Maluku dan Sulawesi.⁴ Kusutnya anyaman sosial masyarakat setelah runtuhnya rezim Orde Baru 1998 telah menguatkan *chauvinisme* dan sikap intoleransi beragama yang semakin intens dan mudah tersulut.

Jatuhnya Orde Baru yang menandai dimulainya Reformasi sebagai sistem pemerintahan dan politik, tidak serta merta mampu menyelamatkan bangsa ini dari krisis identitas, sosial, budaya, ekonomi dan keagamaan dalam berbangsa dan bernegara. Kegagalan identitas pascajatuhnya Soeharto dari pucuk kekuasaannya, setidaknya telah

² Iriyanto Widisuseno, "Azas Filosofis Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara," *Jurnal Humanika*, 20, no. 2 (2014): 62.

³ Azyumardi Azra, "Kegagalan Identitas dan Kekerasan Sosial: Multikulturalisme, Demokrasi dan Pancasila," *Jurnal: EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1, no. 1 (Juni 2012): 9.

⁴ *Ibid.*

melahirkan kelompok-kelompok masyarakat Madani yang intoleran.⁵ Menetasnya kelompok-kelompok Madani yang intoleran dan cenderung melakukan aksi-aksi kekerasan di dalam mengekspresikan pendapatnya, setidaknya merupakan bentuk reaksi atas sistem Reformasi, sekaligus indikasi bahwa Islam politik telah berdiaspora melakukan ekspansi di dalam arena politik Indonesia.

Intoleransi beragama kerap dilakukan atas nama suatu agama mayoritas kepada pemeluk agama minoritas⁶ sehingga menimbulkan pertikaian dan konflik berkepanjangan.⁷ Tentang hal ini, Paus Fransiskus menegaskan bahwa, “Kekerasan dan kebencian dengan mengatasnamakan Tuhan adalah suatu tindakan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan.”⁸ Kelompok-kelompok militan berjubah agama itu melakukan tindakan intoleransi beragama sehingga menciptakan kondisi mencekam dan menakutkan. Meski demikian, apa yang dilakukan oleh beberapa kelompok militan dan berhaluan keras ini, tidak hanya sekadar bentuk kekecewaan terhadap sistem yang baru lahir, tetapi juga sekaligus reaksi-reaksi keras terhadap sistem baru yang dianggap terlalu sekuler dan membiarkan Barat—pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap krisis ekonomi dan politik—terlalu banyak menghegemoni bangsa.⁹ Reaksi-reaksi keras oleh beberapa kelompok masyarakat Islam ini berusaha menawarkan jalan baru, sistem baru yang diyakini dapat membawa bangsa Indonesia keluar dari segala krisis yang melandanya. Dasar alternatif

⁵ Sidney Jones, dkk., *Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi/ PUSAD, 2015), 3–23.

⁶ Zuly Qodir, “Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama,” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.5, No.1, Mei 2016, 429-445.

⁷ Cahyo Pamungkas, “Toleransi Beragama dalam Praktik Sosial: Studi Kasus Hubungan Mayoritas dan Minoritas Agama di Kabupaten Buleleng”, *Epistemé*, Vol. 9, No. 2, Desember 2014, 285-315.

⁸ Caroline Damanik, *Paus Fransiskus: Saya Terguncang, Ini Tidak Manusiawi*, Kompas.com, 14/11/2015, 21:39 WIB, <https://internasional.kompas.com/read/2015/11/14/21392811/Paus.Fransiskus.Saya.Terguncang.Ini.Tidak.Manusiawi>, diakses 1 Juni 2020.

⁹ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indoensia Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: LP3S, 2008), 17.

yang ditawarkan oleh kelompok-kelompok militan ini adalah sistem syariah, yang dipandang memiliki keunggulan dari ideologi-ideologi lainnya sebagai dasar negara.¹⁰

Fakta ini tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa aktor Islam ingin melihat Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga diharapkan mampu bertransformasi menjadi sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya.¹¹ Dentuman Islam di dalam lanskap politik Indonesia Pasca-Orde Baru menjadi sebuah diskursus yang banyak menyita perhatian kalangan pengamat tidak hanya lokal tetapi juga regional, karena sebelumnya Islam Indonesia selalu diidentikkan dengan moderatisme dan toleransi.

Beberapa kelompok militan yang cenderung berhaluan keras ini di antaranya adalah Laskar Mujahidin Indonesia (LMI), sebuah aliansi organisasi-organisasi kecil dari beberapa kota seperti, Solo, Yogyakarta, Kebumen, Purwokerto, Tasikmalaya, dan Makassar. Laskar Mujahidin Indonesia (LMI) sendiri merupakan organisasi Islam yang berada di bawah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), lahir setelah diadakannya “Kongres Mujahidin Indonesia I” di Yogyakarta pada tahun 2000 dan diikuti oleh sekitar dua ribu peserta waktu itu.¹²

Selain LMI, kelompok yang didirikan oleh Ja’far Umar Thalib dan beberapa tokoh Salafi yakni, Laskar Jihad (LJ) juga menjadi gerakan Islam yang mengumpulkan para pemuda Islam yang menyebut dirinya sebagai *Salafi*. Kelompok ini berada di bawah naungan Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jama’ah (FKAWJ) yang berpusat di Yogyakarta, dan memiliki kantor-kantor cabang hampir di seluruh provinsi.¹³ Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jama’ah (FKAWJ) tidak hanya melakukan *framing* gerakan dengan mengatasnamakan pembelaan terhadap agama Islam atas gesekan sosial seperti yang terjadi di Maluku, tapi mereka juga melakukan mobilisasi massa agar semakin banyak pihak yang mau bergabung dengan gerakan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

mereka. Salah satu langkah mobilisasi adalah dengan melakukan kampanye gerakan melalui selebaran dan buletin yang menampilkan “penderitaan-penderitaan umat Muslim.” Selain itu, mereka juga membuat laman yang diperbarui secara berkala di *laskarjihad.org/or.id*. Di samping itu, kampanye gerakan juga dilakukan dengan membuat pin, stiker, kaus, rekaman khotbah, serta buku-buku yang mengajak kepada jihad. Langkah selanjutnya, relawan yang terjaring kemudian dilatih secara fisik dan mental di cabang-cabang FKAWJ. Kegiatan FKAWJ ini tentu membutuhkan dana. Mereka mengumpulkan dana dari: (1) bantuan pribadi dari anggota baik iuran wajib maupun insidental; (2) donasi yang terkumpul di masjid; serta yang terbesar (3) donasi dari penyumbang rahasia, baik dari kalangan sipil maupun militer, dari dalam dan luar negeri. Dukungan tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tapi juga kekuatan dan pengaruh. Dari sini patut dicurigai bahwa gerakan FKAWJ dan jihad yang mereka kampanyekan sarat akan kepentingan, bukan hanya dalam rangka membela agama.¹⁴

Dinamika politik bangsa Pasca-Orde Baru runtuh, ketika kelompok-kelompok militan-intoleran menjamur dan berusaha mengambil celah politik dan pemerintah dengan sistem baru, walau bagaimanapun menjadi tantangan berat bagi Reformasi. Menjamurnya kelompok militan seperti di atas, akan menantang atau bahkan menghancurkan nilai-nilai demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan negara.¹⁵ Faktanya, euforia reformasi terbukti membuat kontrol dan otoritas negara menjadi lemah. Situasi yang mendorong embrio-embrio kelompok militan terus bermunculan, bahkan hingga sekarang di beberapa kota Indonesia.

Gerakan-gerakan kelompok militan-intoleran ini masih tetap dengan pola dan kultur lamanya yakni, dalih menegakkan syariat Islam. Kelompok militan Solo misalnya, selain FPI, ada Laskar Umat Islam Solo (LUIS) yang reaksioner dan terus memperkuat eksistensinya dengan melakukan tindakan-tindakan anarkis. Eksistensi kelompok

¹⁴ *Ibid.*, 182.

¹⁵ Thomas Carothers, *Think Again: Civil Society, Foreign Policy* (Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, Winter, 1999–2000), 18–19.

militan juga banyak berdiri di Sleman, seperti Front Jihad Islam (FJI), Front Umat Islam (FUI), dan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK). Mereka tidak jarang melakukan pengintaian dan melakukan tindakan anarkis di beberapa tempat dan kegiatan yang mereka anggap bertentangan dengan syariat Islam.¹⁶ Beberapa kelompok militan juga tercatat ada di bagian utara Jawa Tengah, yaitu di Temanggung. Polisi mendeteksi adanya kelompok Neo-Jamaah Islamiyah yang bersarang di Temanggung, kelompok ini diketahui karena salah satu teroris, Triyono Wagimin Atmo alias Andalus alias Abu Hilwa, berhasil diamankan di Temanggung dan terdeteksi sebagai anggota Jamaah Ansharut Daulah (*Neo-Jamaah Islamiyah*).¹⁷ Munculnya kelompok-kelompok militan baru di tiga kota ini merupakan alarm bahwa demokrasi kita masih memiliki sisi gelap sekaligus memperlihatkan krisis identitas dan politik yang masih berlangsung hingga hari ini, mentransformasikan agama menjadi sebuah harga diri yang harus dibela.

Fakta bahwa nilai demokrasi kita tengah anjlok, ditunjukkan oleh survei yang dilakukan oleh *Wahid Foundation* tahun 2019 mengenai isu intoleransi dan radikalisme. Survei yang dilakukan sedikitnya kepada 1.520 responden menghasilkan angka mendekati 49% masyarakat muslim Indonesia rentan dengan sikap intoleran, terutama di kalangan kaum milenial.¹⁸ Hasil survei ini memperlihatkan bahwa gumpalan sikap intoleran terhadap kelompok agama lain masih sangat kuat di dalam masyarakat kita. Kesimpulan hasil survei ini menemukan fakta bahwa keagamaan masyarakat kita semakin hari cenderung bersifat sektarianisme, hal yang mendorong tumbuhnya

¹⁶ "Markas Syiah di Jalan Kaliurang Diserbu Massa" *Tempo.co*, diakses 15 Desember 2019, <https://nasional.tempo.co/read/712442/markas-syiah-di-jalan-kaliurang-diserbu-massa-mengapa>.

¹⁷ Rinaldi Sofwan, "Teroris Temanggung Anggota Neo Jamaah Islamiyah" *cnn.indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160310170458-12-116629/teroris-temanggung-anggota-neo-jamaah-Islamiyah>. Diakses 18 Desember 2019.

¹⁸ M. Nurul Huda, "Intoleransi Kaum Muda di Tengah Kebangkitan Kelas Menengah Muslim di Perkotaan," <http://wahidfoundation.org.php/publication/detail/Intoleransi-Kaum-Muda-di-Tengah-Kebangkitan-Kelas-Menengah-Muslim-di-Perkotaan>. Diakses 19 Desember 2019.

sikap intoleransi dan tindakan-tindakan radikal yang disandarkan atas nama agama.

Fakta lain terkait dengan sikap intoleran dan radikalisme ditunjukkan oleh Setara Institute. Penelitian Setara Institute pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pada lembaga pendidikan tinggi, dalam hal ini adalah perguruan tinggi dan institusi lain yang setara, khususnya di kampus-kampus negeri, muncul gejala eksklusivisme dan fundamentalisme agama yang menyorot mayoritas mahasiswa.¹⁹ Penelitian ini memperlihatkan bahwa sikap intoleransi dan gerakan radikalisme saat ini tidak hanya menyerang fisik, tetapi sudah meluas pada ranah pemikiran, seperti *hatespeech*, yang sering terjadi di dalam tema-tema dakwah para dai, ujaran kebencian di media sosial pada kelompok agama tertentu. Fakta ini semakin sulit untuk ditangani sekaligus menjadi sumbu awal yang mendorong terjadinya konflik fisik di dalam masyarakat yang majemuk.

Menjawab tantangan ini, kita tidak dapat hanya fokus pada restorasi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai falsafah bangsa, tetapi juga diperlukan komitmen kuat semua elemen masyarakat: ulama, pendeta, pedanda, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa lainnya, khususnya TNI-Polri untuk terus mendukung perdamaian dan keharmonisan antarkelompok agama. Keadaan ini menuntut pemerintah dengan segala otoritas yang disemainya di dalam perundang-undangan untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menciptakan kerukunan ini, mengingat hal ini menyangkut keyakinan dan prinsip yang dianut oleh masyarakat.²⁰ Akhir-akhir ini rajutan relasi antarumat beragama sering kali menunjukkan ‘kegugupan’ yang berujung pangkal tendensi politik aliran, yang sejatinya merupakan sebuah keniscayaan (*given*) sejauh eksistensi politik aliran itu tidak

¹⁹ Amanah Nurish, “Dari Fanatisme ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, dan Tindakan Kekerasan,” *Jurnal: Masyarakat dan Budaya*, 21, no. 1 (2019): 31.

²⁰ Hasan Sazali, “Komunikasi Pembangunan Agama dalam Membangun Toleransi Beragama (Analisis Sistem dan Aktor),” *KHAZANAH: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13, no. 2 (Juli-Desember 2015): 209.

melemahkan bangunan fundamental demokrasi, yakni Pancasila dan pluralisme.²¹ Ia justru akan menjadi kekayaan bagi Pancasila, sekaligus menjadi sebuah representasi besar peradaban bangsa Indonesia yang ditakdirkan bersuku-suku, beragam agama, dan berbeda pandangan politik.

Semakin tinggi kasus intoleransi beragama menjadi tugas besar aparaturnya negara untuk memastikan hubungan antargolongan yang sudah diatur dan ditata dengan baik, tidak terjadi benturan dan gesekan yang dapat menyulut terjadinya konflik komunal atau konflik horizontal. Jaminan tentang kehidupan beragama telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” dan secara lebih spesifik disebutkan dalam “Undang-Undang No.1/PNPS/1965 Tanggal 27 Januari 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama” serta penjelasannya dalam “UU Nomor 5 tahun 1965 tentang Kerukunan Antarumat Beragama, Penistaan Agama, dan Kebencian Antarumat Beragama di Depan Publik.” Melalui Undang-Undang ini kita dapat melihat aspek-aspek penting; aspek konstitusional, aspek hukum, aspek HAM, aspek demokrasi, aspek sosial masyarakat, dan aspek-aspek moral keagamaan menjadi butir-butir muatan yang sangat penting untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama.²²

Upaya memastikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara yang mengatur tentang dinamika umat beragama di Republik Indonesia benar-benar berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya yakni, memelihara kerukunan antarumat beragama, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: (1) Polri merupakan alat negara yang membantu dalam kamtibmas, gakkum, serta memberikan bantuan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

²¹ *Ibid.*, 210.

²² Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 35.

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; (2) dalam menjalankan perannya, mewajibkan Polri memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Tugas-tugas yang didaulatkan kepada Polri tentu bukan merupakan tugas yang mudah, terlebih intensitas sikap intoleran semakin meningkat akhir-akhir ini, menuntut pihak kepolisian memiliki langkah-langkah inovatif untuk menanggulangi konflik tersebut. Tuntutan ini semakin tinggi khususnya bagi kepolisian di daerah yang memiliki sensitivitas terkait dengan isu-isu kegamaan, seperti Jawa Tengah.

Selama tahun 2017 berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA) Jawa Tengah dalam kaitannya dengan toleransi beragama masih menunjukkan *trend* yang negatif, setidaknya masih puluhan kasus yang terjadi. Menurut ELSA mayoritas pelanggaran didominasi penolakan terhadap kegiatan berbasis agama, seperti kasus penolakan dan penghentian rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, hingga perusakan rumah ibadah.²³ Kesimpulan survei yang dilakukan oleh LSA ini berbanding lurus dengan catatan intoleransi beragama oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah yang secara umum masih menunjukkan angka sangat tinggi.

Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat dari rentang tahun 2014–2018 intoleransi beragama cenderung semakin tinggi. Pada 2014 ada tiga intoleransi beragama yang terjadi di daerah Sleman. Kasus-kasus ini meliputi perusakan rumah ibadah dan penolakan ibadah umat Kristen, serta penganiayaan pada salah satu Romo dan jemaat Kristen. Sementara pada tahun 2018, Kepolisian Resor (Polres) Sleman mencatat ada enam kasus intoleransi beragama yang tersebar di daerah Sleman. Kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2018 ini terlihat semakin kompleks, selain penolakan kegiatan beribadah umat Kristen, perusakan alat-alat ibadah dan

²³ Nazar Nurdin, "Penelitian: Intoleransi Masih Sering Terjadi di Jateng Selama 2017," <http://regional.kompas.com/read/2018/01/09/13593181/>. Diakses 9 Januari 2018.

masjid, serta pembakaran Alquran dan kitab-kitab *turats*, juga terjadi kekerasan yang bersifat simbolik seperti kasus Pemasangan Baliho “Misteri di Balik Kejadian Nabi Isa AS” yang memicu ketegangan di masyarakat. Untuk mengatasi kasus intoleransi beragama ini, pihak Polres Sleman melakukan tindakan mediasi. Polres Sleman mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat konflik dan bernegosiasi untuk menemukan jalan keluar demi terciptanya kerukunan antar-umat beragama khususnya di daerah Sleman.²⁴

Catatan Polda DIY Direktorat Intelijen Keamanan menyebutkan bahwa ada empat intoleransi beragama yang tersebar di seluruh daerah Sleman, Bantul dan Kulonprogo. Kasus-kasus yang ada di dalam catatan Direktorat Intelijen Keamanan DIY ini patut disikapi dengan bijak oleh semua elemen masyarakat, terutama oleh pihak kepolisian. Keempat kasus ini juga sudah ter-*cover* di dalam catatan Polres Sleman, dan sudah ditindaklanjuti dengan cara memediasi dan menegosiasi antara dua pihak.

Seperti disampaikan oleh Kasat Intelkam Polresta Surakarta, kasus intoleransi beragama di Surakarta kurun waktu 2014–2018 bisa ditekan pada titik yang paling rendah. Namun demikian, ada satu kasus pada tahun 2017 yang sempat memantik konflik, yaitu peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Solo yang ditentang oleh umat Islam yang menamakan dirinya sebagai Elemen Umat Muslim Solo dan LUIS (Laskar Umat Islam Solo). Gerombolan besar yang mengatasnamakan umat Islam ini menolak peresmian GKI karena dianggap tidak memenuhi syarat pendirian bangunan untuk rumah ibadah.²⁵ Akan tetapi, pernyataan itu ditolak oleh Pendeta GKI yang menyebutkan bahwa, syarat administrasi termasuk pemberitahuan pendirian rumah ibadah telah dipenuhi. Hal itulah yang menyebabkan ketegangan, bahkan Pendeta GKI waktu itu sempat disiram dengan air oleh segerombolan massa. Seorang anggota LUIS mengatakan bahwa, GKI itu sudah ditolak sejak awal pembangunannya (2014), dan pihak

²⁴ Data primer Kepolisian Resor Sleman dari tahun 2014–2018.

²⁵ Wawancara dengan B (Kasat Intlekam Surakarta), 23 Juli 2019.

LUIS telah sering melakukan mediasi.²⁶ Menurut keterangan pihak Polresta Surakarta, dalam rentang waktu 2014–2018 hanya kasus penolakan GKI yang terjadi di Surakarta. Kasus itu pun oleh pihak Polresta Surakarta tidak dianggap sebagai intoleransi beragama, karena yang ditentang oleh masyarakat yang mengatakan umat Islam bukan karena “agamanya” tetapi karena administrasi perizinannya tidak purna. Pernyataan yang sangat bertentangan, karena rencana pendirian GKI sudah memiliki IMB resmi.²⁷

Temuan tidak jauh berbeda didapatkan di Temanggung. Sebagai kota yang didominasi oleh masyarakat beragama Islam, Temanggung tidak serta-merta memiliki inklusivitas yang tinggi terhadap perbedaan. Beberapa aliran keagamaan Islam di Temanggung, sebagaimana disampaikan oleh Polres Temanggung, masih memiliki paham eksklusif, menutup diri, dan cenderung berhaluan keras.²⁸ Paham golongan masyarakat yang bersifat eksklusif itu memiliki kecenderungan untuk bersikap intoleran kepada masyarakat lainnya meskipun sesama Muslim. Menurut Polres Temanggung, selain karena perbedaan paham, golongan masyarakat eksklusif ini juga masih memegang erat nilai-nilai budaya mereka sendiri yang cenderung keras dan antinegara. Beberapa kasus yang terjadi di antaranya klaim haram atas kegiatan ibadah umat Muslim mayoritas di Temanggung seperti budaya Wayang dan Nyadran yang dianggap haram karena dianggap sebagai tradisi Hindu, penolakan vaksinasi, serta melakukan pelatihan militer sendiri.

²⁶ Kusumasari Ayuningtyas, “Puluhan Anggota Ormas Protes Peresmian Gereja di Solo,” <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/church-protest-05182017151523.html>. Diakses 18 Mei 2019.

²⁷ Wawancara dengan T (BAKESBANGPOL Surakarta), 23 Juli 2019.

²⁸ Wawancara dengan W (Polres Temanggung) 6 Juli 2019; dan Q (Lurah Greges, Kecamatan Tembarak, Kab. Temanggung) 6 Juli 2019.

Meningkatnya kasus intoleransi beragama di Jawa Tengah dan DIY dalam kurun waktu terakhir, khususnya di Surakarta dan Temanggung, menurut Yerimiah Lalisang karena wilayah tersebut memiliki sensitivitas keagamaan yang tinggi sehingga mudah tersulut dan terprovokasi kepentingan tertentu melebihi Jakarta. Bahkan, kata Yerimiah, alasan inilah yang menjadikan Solo dikenal sebagai salah satu “kantong” terorisme.²⁹ Hal ini juga didukung hasil kajian dan indeks yang dilakukan Setara Institute pada 94 kota di Indonesia dalam hal isu praktik intoleransi. Hasilnya, kota Surakarta masuk dalam 10 besar daerah dengan indeks tertinggi.³⁰ Berdasarkan data-data ini, melihat kasus intoleransi beragama di DIY, Surakarta, dan Temanggung dalam kurun waktu 2014–2018 dapat disimpulkan bahwa, sekalipun kota yang dianggap kuat secara budaya dan memiliki historikal dengan tradisi multikulturalisme seperti DIY, Solo dan Temanggung, namun tidak menjamin kota-kota tersebut steril dari persoalan intoleransi beragama. Faktanya, sampai saat ini kasus intoleransi beragama dan problem identitas keagamaan masih kerap muncul di kota-kota tersebut.

Eksistensi Polri sebagai alat negara memiliki peran sentral dan urgen untuk turut serta menyelesaikan persoalan ini. Sistem yang selama ini digunakan oleh Polri untuk menjawab tantangan ini, akan menjadi diskursus penting, apakah lebih baik melakukan pencegahan daripada penindakan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, “Kepolisian bukan lagi menyembuhkan orang yang sudah sakit malaria, melainkan mencari sarang nyamuk dan membasminya”,³¹ untuk memastikan bahwa simpul-simpul relasi sosial masyarakat tetap terjaga dengan baik di tengah-tengah keniscayaan heterogenitas (agama, etnik, budaya) seperti yang sudah diatur dalam

²⁹ ALI/AIS, “Pengamat: Intoleransi di Solo Lebih Mudah Tersulut,” <http://m.liputan6.com/news/read/435039/>. Diakses 5 November 2019.

³⁰ Bayu Ardi Isnanto, “Solo Ada di 10 Besar Daerah Paling Toleran, Ini Kata Walikota Rudy,” <https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah-/d-3731792/>. Diakses 17 November 2019.

³¹ Bambang Widodo Umar, “Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, dan Disintegrasi Bangsa”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11, no. 2 (Agustus-Oktober 2017): 55.

Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, upaya-upaya penanganan konflik berbasis agama oleh Polri tentu harus kembali direjuvinsi. Polri memerlukan inovasi-inovasi baru untuk memastikan bahwa perbedaan latar belakang masyarakat Indonesia adalah keniscayaan sekaligus kekuatan yang mesti terus dipertahankan dan bukan ancaman yang dapat meruntuhkan nilai-nilai demokrasi dan Pancasila.

Pertanyaannya kemudian, apakah langkah kebijakan penanganan kasus intoleransi beragama yang dilakukan oleh Polri selama ini sudah tepat dan benar untuk mengakhiri atau setidaknya meminimalisir masalah-masalah intoleransi beragama? Dalam kasus ini, Polres Sleman, Polresta Surakarta dan Polres Temanggung memiliki strategi tersendiri untuk menangani kasus yang berlatarkan pada agama atau keyakinan. Namun, yang menjadi catatan besar adalah, dari tiga kota ini langkah-langkah penindakan yang dilakukan adalah mediasi, Polri hanya menjadi mediator bagi kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Artinya, Polri memosisikan diri pada titik netral dan dituntut mencari alternatif yang paling tepat untuk meredakan kedua belah pihak agar tidak lagi terlibat konflik. Sebuah fakta yang memperlihatkan strategi penanganan Polri bersifat negatif, karena kondisi itu tidak ubahnya seperti ‘api dalam sekam’; ia tidak benar-benar padam, ia masih membara, dan pada satu waktu tertentu ia akan memakan semua sisa-sisa nilai-nilai kesatuan yang tertinggal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang dan sebab terjadinya intoleransi beragama di Indonesia?
2. Bagaimana tipologi intoleransi beragama di Sleman, Surakarta, dan Temanggung?
3. Bagaimana peran Polri dalam penanganan intoleransi beragama di Sleman, Surakarta, dan Temanggung?
4. Apa strategi Polri yang diharapkan dalam menangani intoleransi beragama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan mengapa terjadi konflik intoleransi beragama.
2. Melakukan pemetaan tipologi masalah intoleransi beragama di Sleman, Surakarta, dan Temanggung.
3. Menjelaskan upaya-upaya Polri dalam penanganan kasus-kasus intoleransi beragama, khususnya di Sleman, Surakarta, dan Temanggung.
4. Menjelaskan strategi yang sebaiknya dilakukan Polri dalam menyelesaikan persoalan intoleransi beragama secara komprehensif.

D. Kegunaan Penelitian

Disertasi ini mempunyai dua macam kegunaan:

1. Teoretis: mengungkapkan pemetaan masalah intoleransi beragama dan upaya-upaya penanganannya secara inovatif.
2. Praktis: sebagai rujukan oleh kepolisian dalam menangani kasus-kasus serupa yang terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini, selain fokus terhadap data yang digali di lapangan, peneliti juga melakukan tinjauan dan analisis terhadap hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Ada dua jenis kategori literatur yang dipetakan oleh peneliti, yaitu mengenai literatur toleransi dan intoleransi beragama di Indonesia. Pertama, literatur mengenai toleransi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Diryo Suparto dengan judul "*Konflik Identitas Sosial Masyarakat Temanggung (Kajian Kekerasan Sosial di Temanggung tahun 2011)*".³² Menurut Diryo, meledaknya intoleransi di Temanggung tahun 2011 yang berujung pada kerusuhan bukan semata disebabkan oleh identitas sosial—

³² Diryo Suparto, "Konflik Identitas Sosial Masyarakat Temanggung, Kajian Kekerasan Sosial di Temanggung Tahun 2011," *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 4, no. 2 (2013): 47-61.

agama—melainkan juga didorong oleh kondisi *necessary condition*. Artinya, kualitas hidup, kerentanan terhadap kesehatan, kekurangan gizi, serta tingginya tingkat pengangguran menjadi pemicu timbulnya kekerasan identitas sosial secara horizontal tersebut. Semakin tidak normal kondisi masyarakat—seperti kemiskinan yang tinggi, maka mereka mudah tersulut dan marah.³³

Selanjutnya, penelitian mengenai toleransi yang dilakukan oleh Baidi Bukhori berjudul “*Toleransi terhadap Umat Kristiani Ditinjau dari Fundamentalisme Agama dan Kontrol Diri (Studi pada Jamaah Majelis Taklim di Kota Semarang)*”. Baidi Bukhori membedahnya secara kuantitatif untuk menguji secara empiris pengaruh variabel fundamentalisme agama dan kontrol diri secara simultan terhadap toleransi pada umat Kristiani. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bahwa semakin tinggi fundamentalisme agama dan semakin rendah kontrol diri, maka semakin rendah toleransi terhadap umat Kristiani. Sebaliknya, semakin rendah fundamentalisme dan semakin tinggi kontrol diri maka semakin tinggi toleransi terhadap umat Kristiani.³⁴

Kedua, literatur mengenai intoleransi, misalnya penelitian Zuly Qodir yang berjudul “*Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama*”. Dalam kajian Zuly Qodir, radikalisme-terorisme sering dilegitimasi dari beragam faktor, yaitu faktor politik, ekonomi, *psikomagic*, dan budaya (agama). Di permukaan dasar pijakan intoleransi tersebut memang kelihatannya sangat beragam, namun Zuly Qodir mengungkapkan bahwa baik tindakan kekerasan yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, ujungnya satu saja, yakni kekerasan atas nama agama. Para pelaku radikal-teroris selalu menggunakan istilah “*political representative*” untuk membenarkan tindakan mereka. Bahkan tidak jarang mereka selalu merasa mendapatkan mandat untuk “membela yang terpinggirkan”, utamanya bagi kelompok agama mayoritas,

³³ *Ibid.*, 47.

³⁴ Baidi Bukhori, “Toleransi terhadap Umat Kristiani Ditinjau dari Fundamentalisme Agama dan Kontrol Diri (Studi pada Jamaah Majelis Taklim di Kota Semarang),” *Laporan Penelitian Individual* (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

sehingga tidak menutup kemungkinan juga datang dari kelompok minoritas yang merasa diperlakukan secara diskriminatif. Selain alasan yang “*profance*” di atas, Zuly Qodir mengungkapkan bahwa juga terdapat alasan mendasar mengenai keyakinan akan adanya dalil/ teks (pemahaman) yang dijadikan landasan untuk membenarkan tindakan intoleransi tersebut.³⁵

Disertasi Lalu Ahmad Zaenuri berjudul “*Konflik Jamaah Ahmadiyah dengan Masyarakat non-Ahmadiyah: Studi Kasus di Lombok, NTB,*” membahas kronologi konflik dan menganalisis penyebab konflik Ahmadiyah di Mataram. Menurut studi ini, para mubalig Ahmadiyah kurang memahami kondisi sosial budaya masyarakat Lombok, materi yang disampaikan banyak bertentangan dengan pemahaman dan keyakinan masyarakat Lombok, dan metode dakwah yang digunakan Ahmadiyah terkesan eksklusif.³⁶ Disertasi ini membantah pandangan Budiwanti bahwa konflik Ahmadiyah disebabkan oleh perebutan pengaruh antartokoh agama di Pulau Lombok. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mujtahidin, dkk. berjudul “*Peran Nilai Budaya dalam Membentuk Perspektif Toleran dan Intoleran di Madura: Studi Kasus Konflik Sunni-Syi’ah di Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang*”. Intoleransi beragama yang terjadi di kalangan kaum Syi’ah-Sunni di Sampang, bagi Mujtahidin, dkk. sebenarnya bukan dipicu oleh perbedaan keyakinan terhadap ajaran agama, melainkan konflik internal antardua orang bersaudara, yaitu Rois Hukama (Sunni) dengan kakaknya Tajul Muluk (Syiah) yang sama-sama sebagai tokoh agama di Desa Karanggayam, Sampang. Setelah konflik internal itu meletus, masyarakat setempat cenderung intoleran dan sensitif dalam hal yang berkaitan dengan aliran Syi’ah.³⁷ Kondisi

³⁵ Zuly Qodir, “Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama,” *Jurnal Studi Pemuda*, 5, no. 1 (Mei 2016): 431.

³⁶ Lalu Ahmad Zaenuri, “Konflik Jamaah Ahmadiyah dengan Masyarakat non-Ahmadiyah: Studi Kasus di Lombok, NTB,” *Disertasi*, UIN Jakarta, 2009, 249-251.

³⁷ Mahmud Mujtahidin dan Mohammad Edy Nurtamam, “Peran Nilai Budaya dalam Membentuk Perspektif Toleran dan Intoleran di Madura: Studi Kasus Konflik Sunni-Syi’ah di Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang,” *Jurnal*

ini diperparah dengan adanya kepentingan politik di Pilkada Sampang dan Pilkada Jawa Timur. Saat itu, para pihak yang berkepentingan memanfaatkan isu ini sebagai salah satu alat pengeruk suara yang pada akhirnya mengorbankan para penganut Syi'ah di Sampang.³⁸ Pemerintah berusaha menyelesaikan konflik dengan berbagai cara, salah satunya dengan membuat pos keagamaan seumur hidup di Desa Karanggayam. Usaha pemerintah ini memang diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi usaha tersebut tidak serta merta membuat emosi masyarakat mereda, bahkan ada spanduk besar bertuliskan, "Jika ingin kembali ke Karanggayam, harus meninggalkan agama Syi'ah dan kembali ke agama Sunni".³⁹

Konflik berbasis agama secara signifikan meningkat setelah masa reformasi di Indonesia. Salah satu konflik yang terjadi adalah pada komunitas Ahmadiyah yang menjadi minoritas di antara Muslim Sunni yang menjadi mayoritas di Indonesia. Konflik ini meningkat dan menjadi manifes dalam bentuk kekerasan pada periode 2000-an, dan pada akhirnya memunculkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri pada 2008. SKB ini membatasi dakwah Ahmadiyah yang disinyalir sebagai aliran sesat. Namun demikian, SKB ini tidak mampu menghentikan kekerasan yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah. Jika ditelaah lebih dalam, persoalan terkait Ahmadiyah ini bukan semata masalah tuduhan sebagai aliran sesat, tapi juga melibatkan perbedaan nilai, pemikiran dan otoritas antara Muslim liberal dan pluralis, dihadapkan dengan Muslim konservatif. Meskipun kebijakan pemerintah ini mengandung kontroversi karena terkesan menutup ruang dialog konstruktif antarpihak yang terlibat, namun sebenarnya peran pemerintah tetaplah penting, misalnya untuk mewujudkan keteraturan sosial, stabilitas nasional, dan mengendalikan kehidupan demokratis antarwarga negara.⁴⁰

Pamator, 10, no. 2 (Oktober 2017): 123.

³⁸ M. Iqbal Ahnaf, dkk., *Politik Lokal dan Konflik Keagamaan* (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, 2015), 17-33.

³⁹ *Ibid.*, 124.

⁴⁰ A. G. Herdiansah, "Public Policy and Religious Conflict in Indonesia:

Masih tentang keberagaman agama dan intoleransi bernuansa politis-religius, Dicky Sofjan, "Religious Diversity and Politico-Religious Intolerance in Indonesia and Malaysia," *Review of Faith and International Affairs*⁴¹ menyatakan bahwa dalam kasus Indonesia dan Malaysia, pemerintah dan masyarakat memiliki pengalaman dan tantangan yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh ideologi bangsa, sejarah politik, dan perbedaan sistem politik, yang kemudian berpengaruh juga terhadap hubungan mayoritas-minoritas. Sayangnya, sebagai negara mayoritas Muslim, dua negara ini terjebak pada pemahaman bahwa sebagai mayoritas sudah semestinya Muslim mendapat perlakuan istimewa. Paham yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang diajarkan oleh Alquran. Meskipun secara prinsip konstitusi tidak bertentangan dengan visi keislaman, namun pada praktiknya pemahaman yang begitu beragam dapat membawa kepada praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai Islam, demokrasi, dan cita-cita bersama untuk membangun masyarakat multikultur.

Kasus yang sering ditemukan di Indonesia adalah perlakuan tidak adil kepada agama minoritas, bahkan kepada orang yang mengaku Muslim, namun dari kelompok yang berbeda, misalnya Syi'ah dan Ahmadiyah. Menghadapi persoalan seperti ini pemerintah justru memisahkan diri dari persoalan-persoalan yang terkait dengan agama, karena mereka tidak mau "menggangu mayoritas". Sementara di Malaysia, monopoli kebenaran dikuasai oleh otoritas agama di tingkat pemerintah federal, yang menganggap diri mereka sebagai negara Islam. Lebih buruk lagi, identitas agama di Malaysia digabungkan dengan identitas kesukuan, yaitu Melayu, sehingga Muslim Melayu menjadi sangat dominan. Dengan demikian, Sofjan menyimpulkan bahwa intoleransi yang berlatar belakang konservatisme politik-religius menjadi penghalang besar bagi berkembangnya masyarakat

the Case of Ahmadiyah," *Jurnal Wacana Politik*, 1, no. 1 (2016): 79-90, diakses 19 Desember 2019, <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i1.1054>.

⁴¹ Dicky Sofjan, "Religious Diversity and Politico-Religious Intolerance in Indonesia and Malaysia," *Review of Faith and International Affairs*, 14, no. 4, (2016): 53-64, diakses 20 Desember 2019, <https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1248532>.

multikultural di dua negara ini.⁴²

Intoleransi dan politik-religius juga dapat ditemukan di Tiongkok seperti dalam penelitian J. Campbell, yang mengungkapkan, Tiongkok memanfaatkan kasus 9/11 di Amerika sebagai cara menuduh terorisme berbasis agama untuk menyebut dan mendiskreditkan perjuangan politik yang dilakukan oleh masyarakat Uighur. Pelabelan teroris ini juga dipakai oleh pemerintah Tiongkok kepada aktivis di Tibet, Falun Gong, bahkan para petani kecil yang berjuang mempertahankan hak mereka atas tanah. Lebih dari itu, gerakan-gerakan ini selalu dihubungkan dengan kekuatan luar negeri yang mencoba memecah belah Tiongkok, terutama negara barat. Padahal, persoalan ini tidak lebih dari persoalan kegagalan Tiongkok untuk menjaga integrasi bangsanya.⁴³

Intoleransi juga dapat ditemukan di Pakistan. Taalia Khan, Karin Österman, and Kaj Björkqvist, dalam penelitiannya menginvestigasi persepsi masyarakat di Pakistan terkait seberapa berbahayanya intoleransi beragama di sana. Persoalan ini melibatkan empat pihak, yaitu: Sunni, Syi'ah, Ahmadiyah, dan umat Kristen. Ada tujuh variabel dalam penelitian ini yang diukur dalam upaya melihat sejauh mana pengaruh variabel terhadap intoleransi yang mereka alami. Tujuh variabel itu adalah kurikulum sekolah, kurangnya pengetahuan tentang kelompok lain, kurangnya keadilan sosial, latar belakang keluarga dan tekanan sebaya, dampak media, serta pengaruh kekuatan eksternal dan aspek sejarah. Hasilnya, seluruh responden setuju bahwa yang paling menderita dari adanya intoleransi atas nama agama ini adalah umat Ahmadiyah. Penelitian ini semakin menguatkan bukti bahwa intoleransi beragama itu nyata di berbagai belahan dunia.⁴⁴

⁴² *Ibid.*

⁴³ J. Campbell, "Terrorism and Counter-terrorism in China: Domestic and Foreign Policy Dimensions," *International Affairs*, 95 (2019): 1197-1199, diakses 23 Desember 2019, <https://doi.org/10.1787/g225859e2-en>.

⁴⁴ T. Khan, K. Österman, & K. Björkqvist, "Severity and Reasons Behind Religious Intolerance in Pakistan: Perceptions of Sunnis, Shias, Ahmadis, and Christians," *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 10, no. 2 (2017): 193, diakses 23 Desember 2019, <https://doi.org/10.26417/ejser.v10i2.p193-202>.

Eropa yang selama ini dikenal sebagai benua paling maju di dunia pun mengalami masalah yang tidak jauh berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Stefanie Doebler, menguji hubungan antara agama dan intoleransi rasial di antara 47 negara. Analisis ini membedakan kepercayaan (keimanan), kepemilikan atas agama dan dimensi praktik religius. Hasilnya membuktikan bahwa terdapat hubungan antara kepemilikan denominasi, praktik religius, dan intoleransi rasial. Dimensi religius yang paling berpengaruh dalam intoleransi di Eropa adalah aspek keimanan, di mana orang beriman, terutama para fundamentalis cenderung lebih intoleran daripada orang yang tidak percaya pada Tuhan. Konteks nasional juga berpengaruh signifikan, penduduk yang tinggal di negara yang religius dengan warisan keberagamaan yang kuat, ditambah GDP yang rendah cenderung lebih intoleran daripada penduduk yang tinggal di negara yang lebih kaya, sekuler, dan stabil secara politis.⁴⁵

Implikasi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah terletak pada fokus dan cara pandang penelitian. Penelitian ini akan fokus pada inovasi-inovasi dan langkah-langkah penanganan intoleransi beragama oleh Polri. Inovasi-inovasi Polri di dalam melakukan penanganan atau penindakan kasus akan menjadi uraian penting di dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teoretis

1. Pendekatan Teori Rekonsiliasi Johan Galtung; *Peace-keeping, Peace-making, Peace-building*

Cukup banyak diskursus tentang pendekatan berbasis Bina-Damai yang dilakukan oleh satuan-satuan kepolisian di beberapa daerah Indonesia. Akan tetapi, upaya untuk merumuskan pendekatan tersebut hingga saat ini masih gagal dan belum mampu mengelola konflik sosial dengan baik. Seperti ditunjukkan oleh Rizal Panggabean,

⁴⁵ S. Doebler, "Love Thy Neighbor? Relationships between Religion and Racial Intolerance in Europe," *Politics and Religion*, 8, no. 4 (2015): 745–771, diakses 24 Desember 2019, <https://doi.org/10.1017/S1755048315000607>.

pendekatan Bina-Damai tidak memberikan formula baru sekaligus arah bagaimana seharusnya Polri melihat dan menindak kasus intoleransi beragama. Karena itu, penting bagi Polri untuk memahami intoleransi beragama dan kekerasan sebagai implikasinya. Johan Galtung sudah banyak mengelaborasi persoalan ini. Demikian juga pendekatan Bina-Damai yang sudah banyak diupayakan oleh Polri sejauh ini, tetapi hampir tidak ada yang mampu bisa menangkap makna pendekatan kedamaian yang diimajinasikan oleh Galtung. Secara sederhana, kekerasan merupakan tindakan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang, penyerangan, penghancuran yang amat keras, tajam, dan kasar yang secara potensial hal itu menjadi milik orang lain. Namun, seiring perkembangan waktu, definisi atau pengertian kekerasan mulai beragam, baik sekadar instrumentasi, atau kekerasan yang dihasilkan oleh produk struktur sosial atau bahkan kekerasan yang berupa interaksi dalam bingkai struktur organisasional yang hierarkis. Definisi beragam itu datang dari tiga kelompok besar. *Pertama*, datang dari para psikolog, bahwa kekerasan itu memang sifat alamiah yang sudah dibawa oleh manusia sejak mereka lahir, dimana manusia merespons setiap dinamika yang ada di lingkungan sekitarnya. *Kedua*, kelompok ini memahami bahwa kekerasan itu terikat dengan struktur. Artinya, kekerasan itu mengilhami seseorang untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya secara penuh. Kekerasan struktural ini tidak tampak (*invisible*) sebab tidak dilakukan secara langsung, tersembunyi atau terselubung. Kekerasan ini tidak terikat dengan kuantitas aktor yang melakukannya, baik dilakukan secara individu maupun kelompok, seperti misalkan dilakukan oleh struktur aparat pemerintah yang memang memiliki legitimasi untuk menciptakan kekerasan itu. *Ketiga*, pada bagian ini, kekerasan dilakukan secara jejaring yang terorganisir secara jelas dan sempurna.⁴⁶

Kekerasan sejatinya adalah kekerasan yang dilakukan oleh aktor tunggal, kelompok atau terstruktur dengan jelas. Sebab adanya kekerasan itu terdapat koherensi antara kekerasan yang sifatnya

⁴⁶ Hannah Arendt, *Teori Kekerasan* (Yogyakarta: LPIP, 2003), 56.

mikro—dilakukan oleh aktor tunggal—maupun makro—yang dilakukan secara struktur organisasional. Tidak dapat dipungkiri dehumanisasi dan resistensi di lingkungan sosial masyarakat akan membentuk ketegangan terus-menerus, baik itu dipicu oleh ketegangan personal maupun struktural, atau keduanya.⁴⁷ Oleh karena itu, dalam situasi dan kondisi masyarakat yang sedang terbelenggu keadaan sosial seperti ini, mereka sering dimobilisasi oleh aktor informal yang mencoba memanfaatkan dan mempertajam keadaan, hanya untuk memperoleh kekuasaan.

Sebagai seorang aktivis perdamaian, Johan Galtung melihat persoalan ini dengan sangat kritis dan mendorongnya memikirkan lebih jauh bagaimana menyelesaikan masalah sosial itu. Pada usia 81 tahun, Galtung telah memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun berhubungan langsung dengan isu-isu perdamaian dan keamanan; dalam politik formal dan informal, dalam mediasi dan pelatihan mediasi, dalam operasi penjaga perdamaian, dan dalam berbagai pertemuan. Tidak hanya itu, Johan Galtung juga sempat bekerja di puluhan universitas dan lembaga penelitian, di antaranya di Oslo, Dubrovnik, Berlin, Santiago, Princeton, Jenewa, Hawaii, Kyoto, Schlaining, Witten/Herdecke, dan lain-lain. Ia mendirikan *International Peace Research Institute*, Oslo (PRIO) pada tahun 1959 dan *Journal of Peace Research* pada tahun 1964. Saat ini Galtung juga menjadi konsultan dari berbagai Badan PBB seperti UNESCO, UNCTAD, WHO, ILO, FAO, UNU, UNEP, UNIDO, UNDP, UNITAR, dan UNRISD. Banyak pemikiran Johan Galtung yang terinspirasi dari seorang Mahatma Gandhi. Pada usia 17 tahun, Galtung menangis tatkala mendengar kematian Gandhi. Galtung menyebut Gandhi sebagai sosok yang sangat genius.⁴⁸

⁴⁷ Anthony Giddens, *Sociology* (Oxford: Blackwell, 2002), 15-18.

⁴⁸ "Gandhi memberi kita hadiah yang tidak ternilai, satyagraha, yakni berpegang teguh pada satya. Bagi Gandhi satya adalah esensi menjembatani konsep Tuhan, Cinta, dan Kebenaran, menyatukan spiritual, emosional, dan kognitif, tidak menempatkan mereka dalam ruang yang terpisah seperti yang kita lakukan di Barat, yang menyingkirkan dua hal tersebut dari penelitian dan ilmu pengetahuan." Johan Galtung, "Gandhi and the struggle against imperialism," http://www.oldsite.transnational.org/Resources_Nonviolence/2007/Galtung_UNSpeech20Oct07.html.

Galtung mengaku mendapat pelajaran penting, bahwa kekerasan yang membunuh dengan cepat melalui peluru ataupun membunuh secara perlahan melalui kelaparan dan penyakit adalah sama jahatnya. Galtung optimis kekerasan dapat dihapus bila mengetahui penyebabnya. Dia mengaku belajar dari Gandhi tentang strukturalisme, bahwa penyebab kekerasan adalah struktur yang salah dan bukan aktor jahat. Dikatakannya *non-violence* adalah nonkooperasi dengan struktur yang salah dan pada saat yang sama mengusulkan dan membuat struktur alternatif.⁴⁹ Struktur Polri dengan demikian menjadi titik sentral di dalam upaya pencegahan intoleransi beragama, karena sejauh ini tidak ada kejelasan secara struktur formal di dalam negara Indonesia, siapa yang bertindak untuk melakukan kerja-kerja penanganan intoleransi beragama, apakah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau Polri? Sangat wajar jika kemudian, hampir semua konflik sosial yang berbasis intoleransi beragama di Indonesia meledak ke permukaan, tidak ada upaya pencegahan maksimal karena ketidakjelasan struktur kekuasaan dan wewenang di dalam wilayah ini.

Galtung memahami kekuasaan timbul dari adanya relasi yang represif dan eksploitatif sehingga hubungan antara para aktor menjadi tidak seimbang satu sama lain.⁵⁰ Kuantitas sumber daya kekuasaan di masing-masing relasi dari beberapa aktor tersebut berbeda-beda dalam wilayah otoritas dan wewenang. Galtung membagi wilayah sumber daya kekuasaan itu meliputi tiga hal, yaitu kekuasaan ideologi: pengendalian media massa dan pemikiran; kekuasaan remuneratif: penguasaan di dalam sektor ekonomi; dan terakhir punitif: mengenai timbulnya kekerasan baik mikro maupun makro.⁵¹ Tabel berikut menggambarkan tipologi kekerasan struktural Galtung:

Diakses 15 Februari 2003.

⁴⁹ I. Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung* (Yogyakarta: Kanisius, 1992).

⁵⁰ Thomas Santoso, *Kekerasan Agama Tanpa Agama* (Surabaya: Pustaka Utan Kayu, 2001), 67.

⁵¹ Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan*, 30.

Tabel 1.1. Tipologi Kekerasan Struktural Galtung

<i>Violence Typology according to Galtung</i>	<i>Need Groups</i>			
<i>Survival (Negation death)</i>	<i>Well-being (Negation: Property Illness)</i>	<i>Identity/ purpose (Negation: alienation)</i>	<i>Freedom (Negation: oppression)</i>	
Struktur violence	Exploitation A	Exploitation B	Penetration, segmentation	Repression, imprisonment, expulsion, deportation

Narasi bangsa Indonesia terkait dengan kekuasaan yang represif dan eksploitatif sudah dimulai sejak Orde Baru. Salah satunya seperti yang diperlihatkan dalam film dokumenter “*Act of Killing*,” dimana Orde Baru memobilisasi preman dan geng pemuda untuk menyerang serta memperlakukan secara tidak manusiawi orang yang dianggap komunis. Tidak hanya berhenti di situ, pihak Orde Baru juga mensponsori mereka untuk masuk ke dalam Pemuda Pancasila.⁵² Pascareformasi, Front Pembela Islam (FPI) yang dibentuk oleh pemerintah di awal reformasi bersama dengan *Pam Swakarsa* lainnya, telah banyak melakukan tindakan intoleransi beragama di Indonesia. Sudah banyak penelitian mengenai dukungan pemerintah atas tindakan intoleransi yang dilakukan oleh ormas tersebut sekaligus bagaimana mencari uang. Salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Ian Wilson bahwa sebagian anggota kelompok militan garis keras, seperti FPI dan yang lain memang digerakkan oleh pemerintah sebagai pemegang sumber daya kekuasaan itu sendiri. Dalam penelitiannya, Wilson menyebutkan bahwa pada 2005 silam, salah seorang anggota FPI pernah mengatakan kalau nasionalisme dan gagasan NKRI harga mati sudah usang dan ketinggalan zaman. Justru yang lebih ‘seksi’ dan menarik adalah memerangi antikemaksiatan atas nama Islam,⁵³

⁵² David Brown dan Ian Wilson, “Ethnicized Violence in Indonesia: Where Criminals and Fanatics Meet,” *Nationalism and Ethnic Politics*, 13, no. 3 (2017): 373.

⁵³ Ian Douglas Wilson, “As long as it’s halal: Islamic Preman in Jakarta,”

meskipun hal itu dilakukan secara kriminalitas dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh kelompok-kelompok militan bergaya militer mulai dari sejak pascalengsernya Soeharto dari kekuasaannya.

Pembenaran atas tindakan intoleransi beragama jelas merupakan ancaman terhadap demokrasi. Suatu ironi bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi sekaligus dengan ragam budaya, agama, bahasa, etnis membiarkan tindakan intoleransi beragama. Walaupun pemerintah sudah berusaha untuk membuat RUU Kerukunan Beragama, namun hal itu tidak akan pernah menjadi solusi yang efektif, jika pada banyak kasus pemerintah dan pihak keamanan, seperti polisi, justru mensponsori kelompok militansi garis keras untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama agama.

Selama ini setiap kali FPI menggelar aksi untuk membubarkan secara paksa (*vigilante*) kegiatan beribadah agama nonmuslim; menghentikan pembangunan rumah ibadah; atau menyegel gereja dan masjid Ahmadiyah di beberapa daerah di Indonesia, justru tidak mendapat tantangan yang berarti dari pihak kepolisian. Satu fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa, Polri dalam hal ini juga masih belum selesai dengan persoalan identitasnya, mereka masih cenderung terjerat masuk pada wilayah-wilayah identitas kelompok dan ego sektoral. Sebagai contoh, pada 2013 silam, seorang pimpinan FPI di Bandung dijatuhi hukuman 3,5 bulan, di bawah Pasal 170 KUHP, atas tindakannya yang melemparkan batu ke jendela masjid Ahmadiyah hingga pecah. Seharusnya tindakan tersebut dihukum secara maksimal, yaitu lima setengah tahun. Tidak ada pembenaran yang logis untuk membuat efek jera kemudian menjatuhi hukum ringan atas tindakan yang telah dilakukan oleh pimpinan FPI tersebut. Bagaimanapun alasannya, setiap tindakan intimidasi, ancaman, perusakan, pembakaran, atau kekerasan dan kejahatan serupa yang dilakukan atas nama agama sudah seharusnya dihukum dengan

dalam Greg Fealy and Sally White (eds.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008).

hukuman maksimal. Jika keputusan ini tetap dipertahankan, dengan demikian kekerasan justru diterima dengan tanpa beban di negeri ini. Bahkan akhirnya, tidak ada hukuman maksimal yang berarti kalau pemerintah di tingkat lokal dan nasional harus menyerah dihadapkan dengan radikalisme agama.

Penanganan kekerasan atau konflik membutuhkan mekanisme dan formula yang tepat agar tidak terjadi eskalasi. Resolusi konflik bisa berupa tindakan akomodatif dan melakukan tindakan koersif. Sebagai perbandingan, konflik yang pernah terjadi di Somalia berawal dari persaingan faksi-faksi kemudian mengakibatkan segregasi sosial di masyarakat dan menyebabkan pecahnya perang saudara, sehingga meruntuhkan pemerintahan. Peristiwa itu terjadi pada 1991, di mana Somalia pascaperang tidak lagi memiliki pemerintahan, menjadi negara tanpa undang-undang dan pemimpin negerinya. Peristiwa itu mengakibatkan krisis sosial di masyarakat disebabkan absennya negara dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan itu terjadi, bangsa Indonesia perlu mengaktifkan 'alarm' perdamaian, yaitu prinsip paling dasar dari Pancasila sebagai dasar negara.

Perdamaian positif pertama kali diperkenalkan oleh Johan Galtung (1969) dalam penelitiannya mengenai kekerasan dan perdamaian. Dirinya membagi konsep perdamaian ke dalam dua bagian, perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif merupakan kondisi ketidakhadiran kekerasan, atau ketidakhadiran perang. Definisi ini muncul akibat banyak peneliti yang berfokus pada kekerasan langsung, seperti perang atau tindakan agresi lainnya pada masa Perang Dunia. Sedangkan Galtung (1969) sendiri melihat bahwa kekerasan juga muncul karena sebuah struktur, tidak secara langsung. Kekerasan seperti ini meliputi kemiskinan, kelaparan, diskriminasi, dan segala bentuk ketidakadilan sosial lainnya yang membuat masyarakat tidak dapat mengembangkan potensinya.

Kekerasan ini disebut kekerasan struktural, yaitu kekerasan yang terjadi ketika struktur masyarakat diarahkan pada suatu tata cara

yang menghambat ide-ide masyarakat itu sendiri untuk disalurkan.⁵⁴ Tahun 1990, Galtung memperkenalkan konsep kekerasan kultural yang muncul dari budaya sebagai simbol dari keberadaan seseorang. Kekerasan kultural adalah aspek-aspek budaya seperti identitas agama, ideologi, bahasa, seni berupa cerita-cerita, doktrin ilmu empiris, dan ilmu formal yang dapat dipakai untuk membenarkan atau mengesahkan kekerasan langsung dan kekerasan struktural.⁵⁵ Dengan demikian, keadaan tanpa adanya kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural di atas disebut Galtung sebagai perdamaian positif.⁵⁶

Agar sampai ke perdamaian positif, hal yang harus dilakukan adalah menguraikan fakta kepentingan-kepentingan atas pihak-pihak yang terlibat sekaligus mengapa konflik itu bisa terjadi. Hal ini sangat penting untuk diidentifikasi untuk kemudian melangkah dalam tahap mencari resolusi konflik tersebut. Mengenai hal ini, Johan Galtung kemudian memberikan penjelasan bahwa konflik dapat berupa *asymmetric conflict* dan *symmetric conflict*. *Asymmetric conflict* merupakan konflik yang terjadi antara aktor yang tidak mempunyai kekuatan dan aktor yang mempunyai kekuatan, seperti halnya konflik yang terjadi antara mayoritas dan minoritas, atau antara kelompok separatis dan pemerintah. Sementara *symmetric conflict* terjadi antara dua aktor yang keduanya tidak memiliki kekuatan signifikan.⁵⁷ Tidak hanya itu, Galtung juga menjelaskan dalam resolusi konfliknya, bahwa beberapa perubahan mesti disadari sekaligus juga diupayakan terlaksana, seperti upaya deskalasi konflik dan transformasi ke-

⁵⁴ A. Nicolaidis, "Learning their way through ambiguity: Explorations of how nine developmentally mature adults make sense of ambiguity," *Disertasi* (New York: Columbia University Teachers College, 2008): 14.

⁵⁵ Johan Galtung, "Cultural Violence," *Jurnal of Peace Research*, 27, no. 3. (Aug., 1990): 291-305.

⁵⁶ Anastasia Nancy Waas, dkk. "Upaya Transformasi Konflik oleh Search for Common Ground Organization dalam Konflik Dongo (2010-2013)," *Jurnal Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana*, 1, no. 03 (2015).

⁵⁷ Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, dan Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution* (Cambridge: Polity Press, 2011), 10.

pentingan yang bertabrakan satu sama lain sesama aktor yang berkonflik.

Lebih jauh, resolusi konflik juga dapat dilakukan dengan jalur diplomasi yang terdiri dari negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa, baik mediasi dan konsiliasi. Selain itu, bagi Johan Galtung untuk sampai pada tahap akhir, yaitu kedamaian yang sesungguhnya, diperlukan tiga tindakan yang berupa *peace-keeping*, *peace-making*, dan *peace-building*. *Peace-keeping* merupakan proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan perang sebagai penjaga perdamaian yang netral. Beberapa kasus yang terjadi selama ini mengatasnamakan agama di Indonesia, tidak bisa dipungkiri ada keterlibatan pemerintah dan militer atas kasus tersebut. Untuk sampai pada perdamaian positif diperlukan langkah yang inovatif atas pengembangan kebijakan Polri dalam menangani intoleransi beragama di Indonesia. Perlu adanya kesadaran berupa penegakan hukum secara maksimal atas nama demokrasi dan kemanusiaan, yang sejauh ini masih belum ditunjukkan dengan maksimal oleh negara dan Polri. Diperlukan peranan kesadaran kemanusiaan untuk menjatuhkan hukuman secara maksimal terhadap pelaku kekerasan, sekaligus mengidentifikasi secara holistik dan komprehensif mengapa kasus intoleransi itu bisa terjadi. Tidak kalah penting, Polri harus bersikap objektif, tidak pandang siapa pelaku dan dalang di balik kasus tersebut, sehingga akan menunjang proses rekonsiliasi untuk mencegah dan menghentikan kasus intoleransi kembali terulang.

a. *Peace-keeping*

Terminologi *peace-keeping* sangat sering digunakan untuk menggambarkan misi perdamaian yang melibatkan PBB atau yang berada di bawah komando PBB secara langsung. Di hadapan Dewan HAM PBB, pemerintah Indonesia dengan tanpa beban mengungkapkan bahwa Indonesia tanpa lelah terus mensosialisasikan sekaligus mempromosikan betapa pentingnya kerukunan beragama dan toleransi, meskipun faktanya tidak sepenuhnya demikian.⁵⁸ Melalui terminologi

⁵⁸ Kutipan dari Majelis Umum PBB, "National Report Submitted in

Peace-keeping, di dalamnya secara bersamaan termuat elemen *peace-building*, *peace-making* dan resolusi konflik lain yang memang dianggap inovatif dalam penyelesaian sebuah konflik.

b. *Peace-making*

Peace-making merupakan proses yang bertujuan mempertemukan sikap politik dan strategis dari pihak-pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elite atau pimpinan.⁵⁹ Penyelesaian permasalahan yang terjadi dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk berdialog pihak-pihak yang bertikai untuk menemukan resolusi efektif agar masalah tersebut dapat dengan cepat terselesaikan serta tidak sampai mengganggu stabilitas sosial dan politik di tanah air. Dialog itu berupa negosiasi atau perundingan. Hal ini diharapkan akan menghasilkan perjanjian atau kesepakatan yang tidak berat sebelah. Artinya, tidak ada di antara yang bertikai merasa didiskriminasi atau diintimidasi oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam proses ini, sekaligus pihak yang melanggar perjanjian kemudian akan dijatuhi sanksi sesuai dengan kesepakatan itu. Langkah-langkah ini menjadi pilihan utama Polri ketika terjadi konflik di masyarakat. Pada tahap ini, emosi terpendam kelompok yang terlibat konflik tidak benar-benar luruh, dan potensinya untuk meledak masih sangat besar, karena negosiasi yang mereka gelar juga sekaligus dapat menjadi instrumen untuk memobilisasi konflik selanjutnya.

c. *Peace-building*

Peace-building adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi, demi tercapainya perdamaian. *Peace-building* sejatinya merupakan sebuah upaya untuk mengubah *negative peace* (hilangnya kekerasan) menjadi *positive peace* agar masyarakat mampu merasakan sepenuhnya kedaulatan

Accordance with paragraph 5 of the annex to Human Right Council Resolution 16/21, Indonesia," A/HRC/WG.6/13/IDN/1, 7 Maret 2012.

⁵⁹ Yulius P. Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 93.

dari adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan politik.⁶⁰ Pada tahap ini fokus utama pascakonflik merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh mereka yang terlibat konflik, terutama oleh penegak hukum. Tujuannya, agar kesadaran penegakan hukum diimplementasikan secara maksimal tanpa dibebani oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam proses ini, upaya untuk menghindari konflik yang sama merupakan hal krusial demi tercapainya stabilitas pascakonflik, karena salah sedikit saja dalam proses ini maka konflik yang sama akan mudah tersulut dan menyebar kembali.

Tahap selanjutnya dalam meresolusi konflik adalah mencari mekanisme atau formula yang efektif dan inovatif untuk menuntaskan konflik sampai ke akar rumput. Ada beberapa resolusi konflik yang sering digunakan, tetapi peneliti akan mencoba memfokuskan pada mekanisme yang dianggap mampu menemukan inovasi dalam kebijakan kepolisian dalam penanganan kasus intoleransi beragama di Indonesia. Pada dasarnya Polri memiliki fungsi yang sangat komprehensif di dalam penanganan kasus. Fungsi preemtif, preventif, represif, dan rehabilitasi, menjadi titik sentral yang mengatur langkah-langkah kebijakan penanganan Polri dalam setiap kasus intoleransi beragama. Tetapi sayang, fungsi preemtif dan preventif Polri belum berjalan maksimal, tidak mampu melihat gejala dan potensi konflik di masyarakat, tidak mampu menganalisis dengan baik apa faktor dasar yang meledakkan kasus-kasus anarkisme dan radikalisme di masyarakat, belum ada strategi dan kebijakan yang jelas di dalam upayanya menangani kasus-kasus *hate crimes*.

2. Toleransi dan Intoleransi Menurut Para Ahli

Istilah “intoleransi” berasal dari kata “toleransi” yang memiliki makna positif tentang gambaran kerekatan suatu hubungan yang dianyam berdasarkan perbedaan. Lawan dari toleransi adalah kata “intoleransi” yang menunjukkan antitesis dari kata toleransi sendiri. Toleransi secara etimologis mengeksplanasikan suatu sikap yang

⁶⁰ Ray Murphy, *UN Peace-keeping in Lebanon, Somalia, and Kosovo; Operational and Legal Issues in Practice* (New York: Cambridge University Press, 2007): 2.

saling menghormati, menghargai, dan saling menyayangi tanpa memilah dan memilih, tanpa memandang warna.

Menurut Powell dan Clarke toleransi adalah, *an attitude of tolerance is only possible when some action or practice is objectionable to us, but we have overriding reasons to allow that action or practice to take place.*⁶¹ Dari pandangan ini tersirat bahwa, toleransi adalah suatu pengecualian dari suatu sikap yang tidak disukai oleh kehendak umum, tetapi tetap dilakukan. Definisi lain tentang toleransi juga bertendensi pada suatu sikap seseorang dikemukakan oleh Andrew Cohen bahwa, *an act of toleration is an agent's intentional and principled refraining from interfering with an opposed other (or their behavior, etc), in situation of diversity where the agent believes she has the power to interfere.*⁶² Asumsi yang dikemukakan oleh Cohen menandakan bahwa toleransi merupakan suatu sikap untuk tidak mencampuri, mengintervensi atau bahkan mencederai perilaku, dalam konteks ini adalah keyakinan beragama orang lain. Dari pandangan beberapa ahli di atas tentang toleransi, menyiratkan suatu gradasi sosial dan sekaligus simpati di dalam keberagaman, di mana jarak sosial dapat diukur dari seberapa besar seseorang dapat simpati dan menghargai pihak lain yang tidak memiliki kesamaan ideologi atau keyakinan.

Toleransi merupakan fondasi fundamental persatuan dan kesatuan bangsa, karena ia adalah jiwa Pancasila. Oleh sebab itu, toleransi menjadi sesuatu yang mahal, ia harus diperjuangkan dan dijaga karena ia adalah karakter bangsa Indonesia. Seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia, kini tiba-tiba kata intoleransi muncul di tengah-tengah masyarakat. Tentu, kemunculan kata intoleransi ini bukan suatu hal yang serta-merta, ia merupakan hal yang bergeliat di tengah-tengah masyarakat dan menjadi masalah besar yang harus disikapi dengan benar. Istilah intoleransi kemudian menjadi lawan dari kata toleransi sekaligus sesuatu yang mengancam bagi persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia yang beragama.

⁶¹ Rina Hermawati, dkk. "Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung," *Umbara: Indonesian Journal Anthropology*, Vol.1, no.2, Desember, 2016: 108

⁶² *Ibid.*

Istilah intoleransi merupakan gambaran sikap saling membenci, saling tidak memahami, iri hati, tidak mau mengalah, mementingkan golongannya sendiri daripada kepentingan bersama.⁶³ Implikasinya adalah, terkotak-kotaknya masyarakat berdasarkan ras, etnis, dan agama. Situasi ini akan menjadikan masyarakat mudah tersulut untuk saling berhadapan-hadapan, masyarakat berpotensi untuk menjadi sangat sensitif, eksklusif, dan saling tidak menghargai. Di sinilah kemudian potensi hilangnya kebersamaan sebagai karakter bangsa Indonesia terancam. Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih jauh apa sebenarnya toleransi. Berikut adalah pandangan beberapa ahli tentang toleransi:

a. Huber Cancik dan Hildigard Cancik-Lindermaier (Antara Sosial dan Moral)

Hubert Cancik dan Hildegard Cancik-Lindermaier mengungkapkan bahwa toleransi berasal dari bahasa latin *tolerantia*. Kata ini digunakan pertama kali pada 46 SM oleh Marcus Tullius Cicero. Ia menggunakan kata itu dalam upaya untuk memberikan istilah terhadap kemampuan manusia yang dapat menanggung keadaan dan halangan yang biasa dialami oleh manusia sendiri dalam kehidupannya. *Tolerare* adalah asal kata kerjanya dari bahasa Latin, yang artinya menanggung atau membiarkan.⁶⁴ Pengertian toleransi mulai akrab dengan bidang sosial dan moral saat ini, di masa paling mutakhir seperti sekarang, yang berarti kemampuan manusia untuk hidup dengan hal-hal yang berbeda atau hal yang tidak disukai, baik secara individu maupun kelompok. Keberbedaan itu menuntut manusia untuk mengalami ketersinggungan dengan realitas sosial di sekitarnya yang berbeda. Artinya, dengan kata lain 'hidup berdekatan' tetapi tidak 'hidup bersama'. Akibatnya tidak jarang kemudian tercipta kesan negatif yang menyulut konflik, sehingga persepsi emosionalnya bahwa, objek adalah negatif akan memicu tindakan yang intoleran,

⁶³ Umar, "Polisi dalam Arus Radikalisme," 53-54.

⁶⁴ K. Peter Fritzsche, "Toleranz im Umbruch- Über die Schwierigkeit, tolerant zu sein," *Kulturthema Toleranz zur Grundlegung einen Interdisziplinären und interkulturellen Toleranzforschung*, ed. A. Wierlacher (München: 1996), 32.

mulai dari kekerasan verbal ataupun fisik, pelecehan, hingga meluas terhadap hal-hal yang diskriminatif yang didasari oleh rasa benci atau intoleransi terhadap kelompok yang lain.

b. Iring Fletscher (Legitimasi, Gaya Hidup dan Kebudayaan)

Iring Fletscher melihat, toleransi adalah pengakuan terhadap orang lain dalam keberbedaannya. Definisi toleransi dalam kaca mata Fletscher ini, mengindikasikan heterogenitas sebagai sebuah takdir. Upaya membangun toleransi di tengah kejamakan, bukan dengan langkah ‘penyeragaman’, tetapi dengan legitimasi atau pengakuan. Fletscher menjelaskan pengakuan itu tidak harus melegitimasi kepercayaan ‘*the other*’, gaya hidup dan kebudayaannya, bagi Fletscher cukup menghormati dan memandang sederajat.⁶⁵

Pandangan Fletscher ini mendorong kelompok-kelompok masyarakat untuk menjaga diri dan saling menghargai. Asumsi ini mengakibatkan masyarakat menjadi pasif. Itu artinya, integrasi sosial akan sedikit sukar untuk diciptakan, karena kelompok-kelompok dengan latar berbeda ini, harus saling mengakui, bukan saling memahami. Konsep ini secara implisit mencitrakan garis-garis sosial yang memisahkan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang berbeda. Situasi politik, ekonomi, budaya, dan terutama agama oleh karenanya, akan sangat menentukan terhadap terbangunnya toleransi dan keselarasan sosial masyarakat.

c. Alexander Mitscherlich (Memupuk Integrasi Sosial)

Menurut Alexander Mitscherlich, toleransi tidak hanya menerima perbedaan dengan cara yang pasif melainkan juga harus menerima, menghargai, dan memahami perbedaan serta orang-orang yang berbeda itu sendiri. Mitscherlich sadar betul bahwa membangun sikap toleran bukan hal yang mudah. Persoalan toleransi merupakan

⁶⁵ “*Namun, saya ingin menambahkan bahwa gagasan mengenai intoleransi merupakan penuh legitimasi pengakuan atas yang lain dalam keberbedaannya. Pengakuan tidak membutuhkan penerimaan iman, gaya hidup, karakter budaya yang lain, tetapi hanya rasa hormat mereka yang setara.*” K. Peter Fritzsche, “*Toleranz im Umbruch- Über die Schwierigkeit,*” 33.

upaya melawan diri sendiri dengan semua bentuk kecenderungannya. Oleh karenanya, untuk membangun sikap toleransi terlebih dahulu harus mampu melawan kecenderungan, keinginan dan perasaan diri sendiri.⁶⁶

Lebih lanjut Mitscherlich mengatakan, toleransi bukan hanya sekedar upaya menyadari perbedaan secara pasif; suatu hal yang tidak hanya mendorong individu untuk sekedar memahami dirinya sendiri, tetapi juga membangun kesadaran diri terhadap orang lain yang berbeda. Persepsi yang dibangun dan terus dipupuk mengenai 'perbedaan' merupakan persepsi positif, tidak memberikan ruang akselerasi kepada diri, untuk melihat dan mempersepsikan secara negatif objek atau orang lain/kelompok yang berbeda, sehingga ia tidak peduli sama sekali tentang dan terhadap keadaan si objek itu sendiri. Untuk menjadi toleran, subjek harus menerima persepsi negatif terhadap objek, ia harus terus berusaha menyadari keberadaan konsekuensi negatif dari reaksi negatifnya itu.⁶⁷ Jika tidak demikian, subjek akan terjebak pada sikap intoleran, di mana sikap itu akan membuat segregasi sosial di segala lini. Segregasi akan memunculkan tindakan ketidaksediaan atau ketidakmauan untuk memberikan hak pada orang atau kelompok yang berbeda, baik berbeda dalam keyakinan, ideologi, status sosial, maupun etnik.

Indonesia merupakan negara yang beragam, baik budaya, agama, etnis dan lain sebagainya. Oleh karena itu, toleransi bagi bangsa Indonesia adalah harga mati. Cita-cita inilah yang tergambar jelas dalam falsafah bangsa yaitu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi meskipun begitu, seiring dengan perjalanan waktu, intoleransi muncul dan mengancam persatuan dan kesatuan

⁶⁶ "Dia mengajarkan toleransi sebagai upaya untuk hidup berdampingan dengan orang lain dan orang asing dengan maksud untuk memahami mereka dengan lebih baik. Dan berdampingan ini tidak lagi hanya penerimaan dan daya tahan pasif, tetapi untuk mengakui keberbedaan dan keanehan." A. Mitscherlich, "Toleranz-Überprüfung eines Begriffs", *Fremdgänge: Eine antologische Fremdheitslehre für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache*, eds, (Bonn: 1998).

⁶⁷ Andrew Fiala, "Toleration" dalam *Internet Encyclopedia of Philosophy*, diakses 21 Februari 2008, <http://www.iep.utm.edu/t/tolerati.htm>.

bangsa Indonesia yang beragam.⁶⁸ Fenomena intoleransi beragama di Indonesia oleh sebab itu, bukan semata-mata terkontaminasi oleh ideologi atau murni datang dari Barat, melainkan memang tumbuh dari diri bangsa Indonesia itu sendiri. Selama ini bagi kaum Muslim, teks-teks kitab suci seringkali dijadikan pijakan untuk menguatkan kesadaran negatif (intoleransi) terhadap kaum minoritas. Kitab-kitab suci itu, dilegitimasi sebagai tindakan positif untuk bertindak keras, atau mengancam kebebasan kaum minoritas yang secara historis lahir dalam bingkai intoleransi.⁶⁹

d. Max Weber (Agama sebagai *Held Meaning*)

Kekerasan dan intoleransi beragama merupakan wujud nyata dari kusutnya kemampuan orang memahami agama. Max Weber melihat, agama merupakan *Socially Held Meaning*.⁷⁰ Artinya, agama merupakan penggerak arah dan proses sosial masyarakat, yang pada akhirnya akan membentuk struktur sosial. Hal ini didasarkan atas kehidupan sosial masyarakat sebagai konstelasi makna keagamaan. Tindakan sosial masyarakat, ditentukan oleh cara bagaimana mereka memaknai agama.⁷¹ Agama dengan segala bentuk doktrinnya menentukan bagaimana bentuk dan pola sosial pemeluknya. Kapasitas di dalam memahami dan memaknai teks keagamaan oleh karenanya, menjadi unsur paling penting dan menentukan di dalam memaknai kehidupan. Berdasarkan pemaknaan atas agama, masyarakat bergerak dan menentukan sikap sosialnya sendiri dalam konteks interaksi sosial.⁷² Akan tetapi, mobilitas sosial yang cenderung berkembang sekarang, mendorong gelombang “anti yang liyan” atau gelombang intoleran, yang lebih banyak didasarkan pada pemahaman agama yang tekstual-dogmatis dan sangat sempit. Itulah mengapa dinamika

⁶⁸ Umar, “Polisi dalam Arus Radikalisme,” 53-54.

⁶⁹ Bernard Lewis, *What Went Wrong? Western Impact and Midle Eastern Response*, (Oxford: Oxford University Press, 2002), 13.

⁷⁰ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (New York: Charles Scribner’s Son, 1958).

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, 34.

sosial-keagamaan dari waktu ke waktu, menunjukkan kebuntuan pada sisi normatif; teks keagamaan tidak mampu membentuk sikap toleransi para pemeluknya. Hal ini dapat didasarkan pada kenyataan menguatkannya disintegrasi sosial atas nama agama. Itu artinya teks keagamaan tidak mendorong pemeluknya pada sikap positif melainkan sebaliknya. Fakta ini terjadi ketika ada kegagalan pada dimensi pemaknaan atas teks. Menurut Weber, proses pemaknaan setiap umat beragama atas teks harus berada di dimensi pemahaman *verstehen*, dan situasi umat beragama sekarang tidak berada pada wilayah itu. Pemahaman *verstehen* umat beragama cenderung eksklusif. Doktrin keagamaan oleh karenanya, tidak mendorong ke arah toleransi di tengah keragaman umat beragama sebagai sebuah kenyataan sosial. Tetapi sebaliknya, teks keagamaan itu dijadikan sebagai legitimasi melakukan tindakan intoleransi. Semakin marak tindakan intoleransi beragama akhir-akhir ini di negara kita, seperti di daerah Jawa Tengah, di mana isu-isu agama sering dijadikan *trigger* untuk memantulkan fibrasi intoleransi beragama, menjadi bukti yang tidak bisa dibantah bahwa, agama sebagai *socially held meaning* tidak mendorong umat pemeluknya pada arah toleransi.

Berdasarkan pemahaman di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penyebab atau kondisi-kondisi toleransi dapat terjadi jika terdapat pengakuan terhadap orang lain dalam keberbedaannya. Karena itu, upaya membangun toleransi di tengah kejamakan, bukan dengan langkah 'penyeragaman', tetapi dengan legitimasi, menghormati, memandang sederajat dan adanya pengakuan terhadap keberbedaan pihak lain dengan diri sendiri. Penerimaan sikap berbeda kemungkinan membawa individu terkait pada ketersinggungan dengan realitas sosial di sekitarnya, karena itu toleransi hadir di tengah kejamakan melalui legitimasi atau pengakuan dan membuka ruang untuk menghormati serta memandang sederajat pihak lain yang berbeda. Terlebih konteks Indonesia yang mendasarkan kehidupannya pada aspek Ketuhanan melalui agama, sehingga seharusnya ruang toleransi semakin bersemayam.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada riset kualitatif. Riset kualitatif menurut Taylor dan Moleong adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷³ Pada riset kualitatif ini menggunakan pendekatan metode fenomenologi.⁷⁴ Pendekatan fenomenologi merupakan upaya pencarian data dengan pendekatan empiris, yakni dengan melakukan observasi terhadap objek kajian secara langsung. Dikarenakan menggunakan pendekatan empiris, maka beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah proses pengumpulan data. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik sebagaimana diurai dalam bagian di bawah ini.

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi⁷⁵ dan media massa.⁷⁶

- a. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, foto, dokumen-dokumen Polres Sleman, Polresta Surakarta dan Polres Temanggung terkait intoleransi beragama.
- b. Observasi; peneliti melakukan pendekatan dengan sasaran penelitian sedekat mungkin sehingga seorang informan mau memberikan data yang seakurat dan sedetail mungkin. Informan dalam penelitian ini meliputi: pihak kepolisian, tokoh masyarakat, dan pemuka-pemuka agama di tiga wilayah ini (Sleman, Surakarta, dan Temanggung).
- c. Wawancara. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan pendekatan *in-depth interview* sehingga lebih terpercaya dan lebih

⁷³ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2005), 75.

⁷⁴ Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 13.

⁷⁵ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 56.

⁷⁶ Rachmah Ida, *Studi Media dan Kajian Budaya* (Jakarta: Kencana, 2014), 9.

bersifat intensif karena berbasis individu. Informan yang dijadikan sumber data di sini meliputi: orang yang mengalami intoleransi beragama, masyarakat yang terkait dengan intoleransi beragama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, aparat Polri, dan akademisi.

- d. Media massa. Media digunakan sebagai upaya pembandingan data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga diharapkan mampu menangkap realitas di lapangan dengan lebih kritis dan komprehensif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Sleman, Surakarta dan Temanggung. Tiga daerah ini dipilih karena berdasarkan data kepolisian memiliki kasus intoleransi beragama yang tinggi. Tiga daerah ini juga merupakan daerah yang masih memiliki budaya yang sangat kuat, namun juga memiliki kecenderungan untuk mudah tersulut karena persoalan perbedaan agama seperti yang tercatat dalam dokumen kepolisian di tiga daerah ini.

Secara historis, tiga wilayah ini (Sleman, Surakarta, Temanggung) ditetapkan sebagai lokus penelitian karena memiliki narasi historis yang sangat lekat dengan kelompok-kelompok militan. Sleman merupakan wilayah yang memiliki kedekatan historis dengan Yogyakarta, kota di mana organisasi-organisasi besar kelompok Islam politik lahir seperti Laskar Mujahidin Indonesia (LMI). Fakta historis ini menjadikan Sleman wilayah penelitian yang dipilih karena dianggap sebagai daerah yang memiliki kemungkinan besar terpapar oleh narasi historikal itu. Transisi historis kelompok militan Yogyakarta tidak bisa dipungkiri banyak mengilhami beberapa kelompok yang tumbuh di daerah Sleman, seperti FJI, FUI, GPK, yang masih mentradisikan pola yang sama dengan pola-pola yang dilakukan LMI dulu. Tidak jauh berbeda dengan Sleman, Solo atau Surakarta dipilih sebagai fokus penelitian ini karena, selain data dan penelitian yang menunjukkan Solo masih rawan terjadi intoleransi, kota ini juga memiliki sejarah

yang hampir sama dengan Sleman, melahirkan banyak kelompok-kelompok militan yang cenderung intoleran terhadap penganut agama lain. Beberapa kelompok seperti LUIS dan FPI masih memiliki eksistensi kuat di Solo, dan cenderung tidak bisa dikondisikan oleh aparat kepolisian setempat. Sementara Temanggung, kota yang memiliki banyak pesantren dan daerah multiagama, rentan terhadap tindakan-tindakan intoleran dan kekerasan atas nama agama. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir, Temanggung dianggap sebagai kota yang menjadi kantong-kantong teroris. Beberapa teroris berhasil diamankan di daerah ini. Oleh sebab itu, sangat menarik melihat Temanggung lebih dekat, serta penyebaran paham-paham berhaluan keras dan tindakan intoleran di daerah ini.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini secara umum adalah Polres Sleman, Polresta Surakarta dan Polres Temanggung, serta tokoh-tokoh masyarakat dan agama di tiga daerah tersebut. Penelitian ini ingin memotret permasalahan intoleransi beragama secara detail dan komprehensif di tiga lokasi tersebut. Menurut Moleong, subjek penelitian adalah orang yang bisa dimanfaatkan dalam suatu penelitian untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar dari suatu penelitian.⁷⁷ Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu memilih subjek berdasarkan ciri tertentu yang sudah diketahui sebelumnya untuk mencapai tujuan penelitian yang komprehensif.⁷⁸ Maksud dari *purposive* yaitu, memilih dengan sengaja subjek yang akan diwawancarai. Subjek dalam penelitian ini adalah, Polri dan dokumen intoleransi beragama dari kepolisian sejak 2014–2018, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan media massa. Sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang hendak diteliti,⁷⁹ yaitu kasus intoleransi

⁷⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineke Cipta, 2008), 188.

⁷⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 82.

⁷⁹ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), 135.

beragama dan kebijakan penanganan polisi di Sleman, Surakarta, dan Temanggung.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data secara sederhana adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan baru.⁸⁰ Analisis data dalam disertasi ini menggunakan analisis filosofis interpretatif berdasarkan teori konflik dan rekonsiliasi terhadap fakta yang ada di lapangan, serta menggunakan analisis komprehensif untuk membandingkan kasus-kasus yang serupa, tapi tingkatan efektivitas upaya dan penanganannya berbeda di tiga daerah ini, Sleman, Surakarta dan Temanggung.

Analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan. *Pertama*, reduksi data, yakni data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi disimpulkan melalui interpretasi peneliti yang dikelompokkan menjadi beberapa bentuk data. *Kedua*, memverifikasi data, yakni data dikelompokkan sesuai dengan kategori masing-masing pembahasan. Setelah itu data yang dikelompokkan dapat disajikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan.

5. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Dengan teknik triangulasi data ini peneliti dapat memeriksa keabsahan data dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Mengajukan berbagai pertanyaan.
- b. Mengecek dengan berbagai sumber data.
- c. Pemeriksaan dengan peneliti yang lain melalui diskusi.

⁸⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 121.

Dalam penelitian ini triangulasi data dilakukan dengan cara peneliti membandingkan hasil temuan wawancara yang telah dilakukan kepada pihak terkait yang telah ditentukan dengan hasil observasi di lapangan, serta melakukan klarifikasi terhadap beberapa informasi dari informan dan media massa.

H. Sistematika Pembahasan

Langkah untuk memudahkan pembahasan dalam mendapatkan kesimpulan yang tepat, maka peneliti membaginya dalam enam bab sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah dan batasannya, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II: Mengkaji tentang kerangka teori yang mencakup konsep tentang intoleransi beragama, tipologi kasus, teori konflik dan rekonsiliasi.

BAB III: Merupakan kajian terhadap data-data di lapangan di tiga daerah, meliputi Sleman, Surakarta dan Temanggung.

BAB IV: Memaparkan hasil analisis data terhadap intoleransi beragama di tiga daerah (Sleman, Surakarta dan Temanggung) yang mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan intoleransi beragama di tiga daerah tersebut; analisis terhadap tipologi kasus; dan analisis terhadap upaya penanganan kepolisian dan efektivitasnya.

BAB V: Merupakan temuan penelitian yang menjadi kebaruan atau *novelty* sebagai hasil penelitian.

BAB VI: Penutup yang berisi kesimpulan pembahasan dan saran-saran yang didapat dari hasil penelitian. Penulis lampirkan daftar pustaka dan lampiran.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi teoretis dan empiris dari penelitian ini, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan:

1. Situasi setelah runtuhnya Orde Baru yang dilanjutkan dengan era Reformasi mengubah tatanan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, terutama terkait kebebasan berkelompok dan berpendapat di muka umum. Kondisi yang sebenarnya ideal ini, sayangnya memiliki efek samping berupa munculnya kelompok-kelompok masyarakat berbasis agama dengan pemahaman yang sangat tekstual dan kaku. Kelompok-kelompok ini dalam perjalanannya berubah menjadi kelompok yang tidak segan melakukan tindakan intoleran terhadap kelompok lain yang dianggap tidak sejalan dengan pemahaman agama yang benar menurut versi mereka. Meskipun masalah ini sudah disadari, sayangnya pemerintah dan kepolisian belum bisa berbuat banyak karena asas kebebasan berpendapat dan tekanan mayoritas yang justru merugikan kelompok minoritas yang sebenarnya memiliki hak yang setara untuk menjalankan keyakinannya.

2. Penelitian ini mendapatkan dua tipologi kekerasan berdasarkan dampak intoleransi beragama di Kabupaten Temanggung dan Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara garis besar, tindakan intoleransi beragama dapat mewujudkan sebagai kekerasan fisik dan kekerasan simbolik. Intoleransi beragama dalam bentuk kekerasan fisik misalnya terjadi dalam kasus penolakan pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Busukan, Mojosongo, Surakarta meskipun sudah diperoleh izin pendiriannya dari pemerintah. Tidak hanya terjadi antarpenganut agama yang berbeda, intoleransi beragama dalam bentuk kekerasan fisik juga menimpa penganut LDII di Temanggung. Pelaku tindakan intoleransi juga beragama Islam, hanya saja dari aliran yang berbeda. Sementara di Sleman, kasus yang terjadi adalah adanya penolakan terhadap kuburan jenazah umat Kristen, pemotongan lambang salib, bahkan *sweeping* oleh organisasi keagamaan di salah satu pusat perbelanjaan saat Hari Raya Natal. Intoleransi beragama dalam bentuk kekerasan simbolik misalnya terjadi dengan menguatnya mental membenci yang berbeda, serta menurunnya toleransi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari mulai muncul dan maraknya khotbah-khotbah yang mengampanyekan kebencian terhadap kelompok lain. Bentuk lain dari intoleransi beragama dalam bentuk kekerasan simbolik adalah penyebaran baliho yang berisi pesan-pesan intoleransi di Sleman.
3. Intoleransi beragama adalah permasalahan yang kompleks dan tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindakan intoleransi beragama di Kabupaten Temanggung, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sleman, yaitu: [1] adanya sengkabut administratif yang membuat masyarakat tidak memiliki panduan yang jelas dalam bertindak; [2] kebijakan yang tidak akomodatif dan ketidaktegasan pemerintah dalam memutuskan persoalan yang melibatkan umat dari agama maupun aliran yang berbeda, sehingga masyarakat terdorong untuk bergerak sendiri; [3]

terjadinya perebutan ruang publik dan sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat; [4] *law legitimation* yang membuat Polri tidak memiliki landasan yang jelas di dalam melakukan tindakan penanganan intoleransi beragama, serta mudah melakukan tindakan pengingkaran terhadap tugas dan fungsinya; [5] *public legitimation*, publik mengalami krisis kepercayaan terhadap Polri, khususnya di dalam masalah penanganan kasus intoleransi beragama, hal ini didasarkan pada tindakan Polri yang tidak objektif di dalam menindak, baik menjadi penegak hukum ataupun menjadi mediator antara pihak yang terlibat kasus; [6] ekonomi dan kesejahteraan yang rendah; [7] Penguatan politik identitas yang mendorong masyarakat untuk menonjolkan diri dan kelompoknya, mendorong terhadap munculnya kelompok militan dengan pemahaman yang tekstual, kaku, dan sempit sehingga tidak memberikan ruang toleransi untuk memahami konteks masyarakat yang beragam; [8] belum optimalnya peran kepolisian dalam menangani intoleransi beragama, baik pada tahap sebelum, ketika, maupun setelah intoleransi beragama terjadi.

4. Sejauh ini, peran kepolisian tidak optimal dalam penanganan intoleransi beragama. Hal ini karena tindakan kepolisian dalam tahap preventif belum maksimal sehingga intoleransi beragama tidak dapat dicegah. Langkah penanganan intoleransi beragama melalui deteksi intelijen, preemtif, preventif, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi (pemulihan) yang didasarkan pada sistem, manajemen dan standar keberhasilan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak didukung dengan kebijakan strategis yang seharusnya memaksimalkan pencegahan sebagaimana temuan di lapangan yang cenderung menonjolkan tindakan represif. Selain itu, secara institusional kepolisian tidak memiliki lembaga khusus yang berperan sebagai *leading sector* yang secara spesifik fokus pada penanganan intoleransi beragama. Sejauh ini, langkah dan kebijakan Polri di dalam menangani intoleransi beragama masih bersifat *ad hoc*. Hal inilah yang membuat penanganan intoleransi beragama menjadi tidak optimal.

Dari temuan-temuan di atas, selanjutnya peneliti mengajukan kontribusi teoretis untuk menangani intoleransi beragama di Indonesia berdasarkan teori Johan Galtung, yaitu dengan melakukan modifikasi strategi penanganan intoleransi beragama di Indonesia meliputi *peace-keeping*, *peace-making*, dan *peace-building*, serta menambahkan unsur protektif dalam langkah-langkah prosedur penanganan intoleransi beragama untuk melengkapi Peraturan Kepala (Perkap) Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, peneliti mengajukan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Menyusun dan mendorong aturan yang lebih komprehensif, tegas, dan jelas. Selanjutnya, peraturan ini diajukan untuk disahkan menjadi peraturan/ perundangan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menangani intoleransi beragama oleh Polri.
2. Membangun dan menciptakan struktur baru di kepolisian yang menangani intoleransi beragama di tingkat Markas Besar, Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor, dan Kepolisian Sektor.
3. Merekrut sumberdaya manusia yang memiliki pemahaman dan keahlian di bidang antropologi, budaya, agama, dan psikologi agar penanganan intoleransi beragama lebih komprehensif.
4. Mengajukan penambahan anggaran untuk mendukung tugas kepolisian dalam menangani intoleransi beragama agar gerakan kepolisian lebih leluasa.
5. Membangun kerjasama, misalnya melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan institusi terkait secara rinci dan jelas dalam rangka membangun keselarasan tindakan penanganan intoleransi beragama agar lebih efektif dan efisien, termasuk bekerjasama dengan media massa.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afala, Laode Machdani. *Politik identitas di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018.
- Ahnaf, M. Iqbal, dkk. *Politik Lokal dan Konflik Keagamaan*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, 2015
- Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998.
- Arendt, Hannah. *Teori Kekerasan*. Yogyakarta: LPIIP, 2003.
- Aristole. *Politics*. New York: Dover Publication, 2000.
- Bagir, Zainal Abidin. *Pluralisme Kewargaan*. Yogyakarta: CRCS Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Bekerjasama dengan Penerbit Mizan, 2011.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bawengan, Gerson W. *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Pradnya paramita, 1979.
- Chakraborti, Neil and Jon Garland, *Hate Crimes: Impact, Causes, and Responses*. London: Sage Publication, 2009.
- Dja'far, Alamsyah M. *Intoleransi: Memahami Kebencian dan Kekerasan Atasnama Agama*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

- Dunn, W. N. *Public Policy Analysis*. New York: Routledge, 2015.
- Esposito, Voll et al. *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press, 1996.
- Galtung, Johan. *Peace, War and Defense: Essays in Peace Research*; Vol. 2. Ejlers: Copenhagen, 1976.
- _____. *Rekonsiliasi Konflik*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1994.
- _____. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development, and Civilization*. London and New Delhi: Sage Publication, 1996.
- _____. "Peace, Positive and Negative," in *The encyclopedia of Peace Psychology*, D. J. Christie (Ed.), NJ: Wiley-Blackwell, 2011.
- Gerstenfeld, Phyllis B. *Hate Crimes, Causes, Control and Controversies*. California: Sage Publication, 2013.
- Giddens, Anthony. *Sociology*. Oxford: Blackwell, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Harris, I., & Mische, P. M. "Environmental Peace-making, Peace-keeping and Peace-building: Integrating Education for Ecological Balance and a Sustainable Peace," in *Educating for a culture of social and ecological peace*, A. L. Wenden (Ed.), New York: State University of New York Press, 2004.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indoensia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: LP3S, 2008.
- Hatta, K. *Trauma dan Pemulihannya Suatu Kajian Berdasarkan Kasus Pasca Konflik dan Tsunami*. Aceh: Ar-Raniry Press, 2016.
- Hermawan, Yulius P. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Ida, Rachmah. *Studi Media dan Kajian Budaya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Irawan, Dedi. *Kajian Teoritis terhadap Praktik Desentralisasi dan Integrasi Politik Pasca Orde-Baru*. Jakarta: Fakultas Ilmu dan Budaya, Universitas Nasional, 2013.
- Ismail, Faisal. *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

- Jones, Sidney dkk. *Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), 2015.
- Lattu, Izak. *Planting the Seed of Peace. Agama dan Pendidikan Perdamaian dalam Masyarakat Multikultural Buku Ajar Agama*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2015.
- Lewis, Bernard. *What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Maarif, Ahma Syafii, Ihsan Ali-Fauzi, & Samsu Rizal Panggabean. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Centre for the Study of Islam and Democracy, 2010.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya Offset, 2005.
- Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*. Amsterdam: Amsterdam University Press: 2006.
- Murphy, Ray. *UN Peace-keeping in Lebanon, Somalia, and Kososvo; Operational and Legal Issues in Practice*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Ngatiyar, "Kebudayaan Lokal Sebagai Common Ground Dalam Hubungan Antar Agama di Indonesia (Studi Atas Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Tlogowungu, Kaloran, Temanggung Jawa Tengah)," dalam *Agama dan Perdamaian: Dari Potensi Menuju Aksi*, Ahmad Suhendra dkk. Yogyakarta: CR-Peace, 2012.
- Panggabean, Samsu Rizal dan Ihsan Ali Fauzi. *Merawat Kebersamaan: Polisi, Kebebasan Beragama, dan Perdamaian*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2011.
- Putra, Nusa. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.

- Ramsbotham, Oliver, Tom Woodhouse dan Hugh Miall. *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge: Polity Press, 2011.
- Rustanto, Bambang. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Santoso, Thomas. *Kekerasan Agama Tanpa Agama*. Surabaya: Pustaka Utan Kayu, 2001.
- Suhelmi, Ahmad. *Dari Kanan Islam Hingga Kiri Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2001.
- Suhendra, Ahmad dkk. *Agama dan Perdamaian: Dari Potensi Menuju Aksi*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Filsafat & Center for Religion and Peace Studies [CR-Peace], 2012.
- Weber, Max. *Protestan Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York: Charles Scribner's Son, 1958.
- Windhu, I Marsana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Wilson, Ian Douglas. "As Long as it's Halal: Islamic Preman in Jakarta," dalam Greg Fealy and Sally White (eds.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.

ARTIKEL

- Ansori, Ahmad. "Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas," *Kalam: Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 9, no.2 (Desember 2015): 257
- Azra, Azyumardi. "Kegalauan Identitas dan Kekerasan Sosial: Multikulturalisme, Demokrasi dan Pancasila," *EMPATI; Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1, no.1 (Juni 2012).
- Barnett, M., H. Kim, M. O'donnell, & L. Sitea. "Peace-building: What is in a name," *Global governance*, 13 (2007): 35
- Bourgon, J. "Responsive, Responsible and Respected Government: Towards a New Public Administration Theory," *International*

- Review of Administrative Sciences*, 73, no. 1 (2007): 7-26.
- Brown, David dan Ian Wilson. "Ethnicized Violence in Indonesia: Where Criminals and Fanatics Meet," *Nationalism and Ethnic Politics*, 13, no. 3 (2017): 373.
- Carothers, T., & W. Barndt. "Civil society," *Foreign policy*, (1999):18-29.
- Diamond, Larry. "Toward Democration Consolidation," *Jurnal of Democracy*, 5, no. 3 (1994): 5.
- Esperian, John H. "The Effect of Prison Education Programs on Recidivism," *The Journal of Correctional Education*, 61, no. 4 (1974).
- Fritzsche, K. Peter. "Toleranz im Umbruch- Über die Schwierigkeit, tolerant zu sein", *Kulturthema Toleranz zur Grundlegung einen Interdisziplinaren und interkulturellen Toleranzforschung*, ed. A. Wierlacher, (München, 1996). 32
- Galtung, Johan. "3 Realistic Approaches to Peace-keeping, Peacemaking, Peace-building," *Impact of Science on Society*, 26, no. 1-2 (1976): 103-115.
- Galtung, Johan. "Cultural Violence," *Journal of Peace Research*, 27, No. 3 (Aug., 1990): 291-305.
- Gebert, D., S. Boerner, & D. Chatterjee. "Do Religious Differences Matter? An Analysis in India." *Team Performance Management: An International Journal*, 17, no. 3/4 (2011): 224-240.
- Goldsmith, A. "Police Reform and the Problem of Trust," *Theoretical Criminology*, 9, no. 4 (2005): 443-470.
- Goodall, Kay. "Conceptualising 'Racism' in Criminal Law," *Legal Studies*, 33, no.2 (June 2013): 213-238.
- Hamayotsu, K. "The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media Freedom and Religious Intolerance," *Journal of Contemporary Asia*, 43, no. 4, (2013): 658-677.
- Hassan, M.B., & M.B. Umar. "Ethno-religious Intolerance as an Impediment to Nation Building: the Nigerian Experience,"

International Journal in Management & Social Science, 2, no. 1 (2014): 130-150.

Jamil, Irpan dan Ozi Setiadi. "Politik Identitas Muslim di Jerman dan Prancis," *POLITEA*, 2, no.2 (2019): 136.

Jati, Wasisto Raharjo. "Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan," *Jurnal Walisongo*, 21, no. 2 (November 2013): 397.

Karpov, V., & E. Lisovskaya. "Religious Intolerance among Orthodox Christians and Muslims in Russia," *Religion, State & Society*, 36, no. 4 (2008): 361-377.

Mahmud, Mujtahidin, dan Mohammad Edy Nurtamam. "Peran Nilai Budaya dalam Membentuk Perspektif Toleran dan Intoleran di Madura: Studi Kasus Konflik Sunni-Syi'ah di Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang," *Jurnal Pamator*, 10, no. 2 (Oktober 2017): 123.

Muhdhor, A. "Menalar Asumsi Takfirisme," *ICMES*, 1, no. 2 (2017): 166-186.

Nur Kafid, "Dari Islamisme ke 'Premanisme': Pergeseran Orientasi Gerakan Kelompok Islam Radikal di Era Desentralisasi Demokrasi," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 21, no. 1 (November 4, 2016): 57-79, <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.4737>, 59

Nurish, Amanah, "Dari Fanatisme Ke Ekstrimisme: Ilusi, Kecemasan, dan Tindakan Kekerasan," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 21, no.1 (2019): 31

Qodir, Zuly, "Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama," *Jurnal Studi Pemuda*, 5, no. 1 (Mei 2016): 431.

Qohar, Abd. "Politik dan Islam di Indonesia," *TAPIS*, 14, no.01 (Januari-Juni): 2017

Raditya, Bambang, Bambang Wahyudi, dan Haposan Simatupang. "Implementasi Kebijakan Kodam XVIPTM Dalam Pencegahan Potensi Konflik di Wilayah Maluku Tahun 2015-2017," *Jurnal Strategi Perang Semesta*, 5, no.1 (April 2019).

- Rahman, Zaqiu, "Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah Mengganggu Kebebasan Berpendapat?," *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7 (Desember 2015).
- Sazali, Hasan. "Komunikasi Pembangunan Agama Dalam Mambangun Toleransi Beragama (Analisis Sistem dan Aktor)," *KHAZANAH: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13, no. 2 (Juli-Desember 2015): 209.
- Septanto, Henri. "Pengaruh HOAX dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat," *Jurnal Kalbiscientia*, 5, no. 2 (Agustus 2018).
- Sukanto, Amos. "Ketegangan Antar Kelompok Agama pada Masa Orde Lama sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik," *Jurnal Teologi Indonesia*, 1, no.1 (Juli 2013): 25-47.
- Suparto, D. "Konflik Identitas Sosial Masyarakat Temanggung (Kajian Kekerasan Sosial di Temanggung Tahun 2011)," *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3, no. 1 (2013): 56-72.
- Tilahun, Temesgen. "Johan Galtung's Concept of Positif and Negative Peace in the Contemporary Ethiopia an Appraisal," *International Journal of Political Sciences and Development*, 3, no. 6 (2015): 251.
- Tripp, A. M. "The Political Mediation of Ethnic and Religious Diversity in Tanzania," in *The Accommodation of Cultural Diversity*. London: Palgrave Macmillan, (1999).
- Umar, Bambang Widodo. "Polisi Dalam Arus Radikalisme, Intoleransi dan Disintegrasi Bangsa," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Edisi 089 (Agustus-Oktober 2019).
- Waas, Anastasia Nancy, Idin Fasisaka, Anak Agung Ayu Intan Prameswari. "Upaya Transformasi Konflik oleh *Search For Common Ground Organization* dalam Konflik Dongo (2010-2013)," 1, no. 03, *Jurnal Hubungan Internasional FISIP Univertas Udayana*, 1, no. 3 (2015).

Widiuseno, Iriyanto. "Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara," *Humanika*, 20, no.2, (2014): 62

Wulandari, Widati, "Hate Crimes di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum," *Veritas et Justitia*, 3, no.3, 2017.

Zainal Anshori Marli, "Dinamika Gerakan Islam Transnasional Dan Tantangan Pendidikan Islam Indonesia," *EDUKASI* 6, no. 01 (March 23, 2016), <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/edukasi/article/view/191>, 4

SUMBER ELEKTRONIK DAN INTERNET

"Bukan Salib, Desain Koridor Jensud Solo Terinspirasi Mataram Islam." <https://www.solopos.com/bukan-salib-desain-koridor-jensud-solo-terinspirasi-mataram-islam-965572>. Diakses 7 Oktober 2019.

"Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (2019)." *Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>. Diakses 23 November 2109.

"Menag Sebut Belajar Agama Lewat Medsos Rawan Jadi Intoleran." *Katadata*. <https://katadata.co.id/berita/2019/11/14/menag-sebut-belajar-agama-lewat-medsos-rawan-jadi-intoleran>. Diakses 11 Desember 2019.

"Mosaik Jalan Depan Balkot Solo Disebut Mirip Salib, Ini Faktanya." <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4386906/mosaik-jalan-depan-balkot-solo-disebut-mirip-salib-ini-faktanya>. Diakses 7 Oktober 2019.

"Polisi Nilai Neo Jamaah Islamiyah Lebih Militan daripada ISIS." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160314154258-12-117298/polisi-nilai-neo-jamaah-islamiyah-lebih-militan-daripada-isis> Diakses 7 Oktober 2019.

Abrori, Ahmad. "Refleksi Teori Kritis Jurgen Habermas Atas Konsesus Simbolik Perda Syariah," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1

- (January 28, 2016): 77. Diakses 12 Januari 2020. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2897>.
- Ahmad Asrori, "Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas," *KALAM* 9, no. 2 (December 30, 2015): 253–68. Diakses 17 November 2019. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>.
- ALI/AIS, "Pengamat: Intoleransi di Solo Lebih Mudah Tersulut." *Liputan6.com*. Diakses 05 September 2019. <http://m.liputan6.com/news/read/435039/>.
- Andita, Rahma. "Imparsial Sebut 31 Kasus Intoleransi Terjadi dalam Satu Tahun." *Tempo*. Diakses 10 Desember 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1273292/imparsial-sebut-31-kasus-intoleransi-terjadi-dalam-satu-tahun/full&view=ok>.
- Ayuningtyas, Kusumasari, "Puluhan Anggota Ormas Protes Peresmian Gereja di Solo," *Benarnews.org*, 18 Mei 2017. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/church-protest-05182017151523.html> Diakses 18 Desember 2019.
- Briantika, Adi, "Polri Sebut Ada Aturan Pencegahan Radikalisme Secara Internal." *Tirto*, 21 Juni 2019. <https://tirto.id/Polri-sebut-ada-aturan-pencegahan-radikalisme-secara-internal-ecPZ> diakses pada 8 Oktober 2019.
- Buana, Dedek. "Tugas dan Wewenang Polri (UU No.2 Tahun 2002)." Diakses 19 September 2019. <http://artikelddk.com/tugas-dan-wewenang-Polri-uu-no-2-tahun-2002/>.
- Campbell, J. "Terrorism and Counter-terrorism in China: Domestic and Foreign Policy Dimensions," in *International Affairs*, M. Clarke (Ed.), 95 (2019): 1197–1199. Diakses 3 Desember 2019. <https://doi.org/10.1787/g225859e2-en>.
- Council of Europe Portal. "Compass: Manual for Human Rights Education with Young people." <https://www.coe.int/en/web/compass/discrimination-and-intolerance> Diakses 12 November 2019.

- Doebler, S. "Love Thy Neighbor? Relationships between Religion and Racial Intolerance in Europe," *Politics and Religion*, 8, no. 4 (2015): 745-771. <https://doi.org/10.1017/S1755048315000607>
- Endro, "Luis dan Warga Ungkap Kejanggalan Pendirian GKI Mojosongo Soloh." *panjimas*. Diakses 6 Oktober 2019. <https://www.panjimas.com/news/2014/12/12/luis-warga-ungkap-kejanggalan-pendirian-gki-mojosongo-solo/>
- Fiala, Andrew, "Toleration" *Internet Encyclopedia of Philosophy*. Diakses 21 November 2019. <http://www.iep.utm.edu/tolerati.htm>.
- Galtung, Johan. "Gandhi and the struggle against imperialism." Diakses 15 Oktober 2019. http://www.oldsite.transnational.org/Resources_Nonviolence/2007/Galtung_UNspeech20Oct07.html.
- Hamdi, Ahmad Zainul, "Agama di Tengah Jaring-Jaring Dunia Modern," *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 2 (September 2, 2013). Diakses 7 November 2019. <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/religio/article/view/439>, 191.
- Herdiansah, A. G. "Public Policy and Religious Conflict in Indonesia: the Case of Ahmadiyah," *Jurnal Wacana Politik*, 1, no. 1, (2016): 79-90. Diakses 21 November 2019. <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i1.10541>
- Hootsuite We Are Social. "The Essential Headline Data You Need To Understand Mobile, Internet, And Social Media Use In Indonesia 2019." Diakses 12 November 2019. <http://wahidfoundation.org.php/publication/detail/Intoleransi-Kaum-Muda-di-Tengah-Kebangkitan-Kelas-Menengah-Muslim-di-Perkotaan>
- Hudaeri, Mohamad, "Agama dan Tantangan Kemanusiaan Kontemporer," *Al Qalam*, 23, no. 2 (August 31, 2006): 167-87. Diakses 28 Desember 2019. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v23i2.1491>, 168

- Isnanto, Bayu Ardi, "Solo Ada di 10 Besar Daerah Paling Toleran, Ini Kata Walikota Rudy," *Detiknews*. Diakses 17 November 2019. <https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah-/d-3731792/>.
- Khan, T., K. Österman, & K. Björkqvist. "Severity and Reasons Behind Religious Intolerance in Pakistan: Perceptions of Sunnis, Shias, Ahmadis, and Christians," *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 10, no. 2 (2017): 193. Diakses 14 Oktober 2019. <https://doi.org/10.26417/ejses.v10i2.p193-202>
- Lestari, Yeni Sri. "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama," *Journal of Politics and Policy*, 1, no. 1 (December 6, 2018): 19–30. Diakses 22 November 2019. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2., 26>.
- Muhdhor, Ahmad, "Menalar Asumsi Takfirisme," *ICMES*, 1, no. 2 (2017): 166–86. Diakses 9 Desember 2019. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v1i2.11>.
- Nurdin, Nazar. "Penelitian: Kasus Intoleransi Masih Sering Terjadi di Jateng Selama 2017." *Kompas.com*. Diakses 9 Desember 2019. <http://regional.kompas.com/read/2018/01/09/13593181/>.
- Nurjannah. "Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah," *Jurnal Dakwah* 14, no. 2 (2013): 177–98. Diakses 3 November 2019. <https://doi.org/10.14421/jd.2013.14202., 185>
- Sofjan, D. "Religious Diversity and Politico-Religious Intolerance in Indonesia and Malaysia," *Review of Faith and International Affairs*, 14, no. 4 (2016): 53–64. Diakses 18 Desember 2019. <https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1248532>
- Sofwan, Rinaldi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160310170458-12-116629/teroris-temanggung-anggota-neo-jamaah-islamiyah> Diakses 11 Desember 2019.
- Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/712442/markas-syiah-di-jalan-kaliurang-diserbu-massa-mengapa> Diakses 22 Desember 2019.

Testriono. "Why Has Policing of Religious Intolerance Failed?." *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/academia/2017/01/12/why-has-policing-of-religious-intolerance-failed.html>. Diakses 21 Desember 2019.

U.S. Code's 249-Hate Crime acts. Diakses 12 Januari 2020. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/249>

LAIN-LAIN

Ardi, Utuh Panggayuh. "Peran Polri Dalam Menanggulangi Premanisme di Karangayar." *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Fakultas Hukum, 2014.

Asgart, Sofian Munawar, "Politisasi Sara: Dari Masa Orba Ke Masa Transisi Demokrasi" *ISAIS*, Jakarta, 2003.

Boutros, Ghali, B. *An agenda for peacepreventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping. Report of the secretary-general pursuant to the statement adopted by the summit meeting of the security council on 31 january 1992* (No. F/341.73 B6), (1992):103-115.

Bukhori, Baidi "Toleransi terhadap Umat Kristiani Ditinjau Dari Fundamentalisme Agama dan Kontrol Diri (Studi pada Jamaah Majelis Taklim di Kota Semarang)." *Laporan Penelitian Individual*. Semarang: IAIN Walisongo. 2012

Data primer Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Sleman dari tahun 2014-2018.

International Association of Chiefs of Police. *Practices in Modern Policing POLICE-YOUTH ENGAGEMENT*. (Alexandria: International Association of Chiefs of Police, 2018).

Jones, Sidney, "Sisi Gelap Reformasi di Indonesia: Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran." Makalah di sampaikan sebagai *Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML)*, Aula Nurcholish Madjid, Kampus Universitas Paramadina, Jakarta, 19 Desember 2013

- Kutipan dari Majelis Umum PBB, "National Report Submitted in Accordance with paragraph 5 of the annex to Human Right Council Resolution 16/21, Indonesia," A/HRC/WG.6/13/IDN/1, 7 Maret 2012.
- Marbun, W. "Peranan Polri Memelihara Kamtibmas dan Menegakkan Hukum." *Makalah FGD dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Penguatan Sistem Pertahanan Negara*, Aula BPHN Jakarta, Senin, 19 September 2016.
- Nicolaides, A. "Learning their way through ambiguity: Explorations of how nine developmentally mature adults make sense of ambiguity." *Disertasi*. New York: Columbia University Teachers College, 2008.
- Panggabean, Samsu Rizal. "Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)," *Laporan Penelitian*, Jakarta: 2009.
- Parsudi, Suparlan, "Kekerasan dan Potensi Disintegrasi Masyarakat." *Makalah Seminar Nasional*, Jakarta: 1999.
- Rahardjo, Satjipto, "Pertanggungjawaban Polisi Berkaitan dengan Tugasnya," *Makalah Seminar*, PSK FH UNDIP, Semarang, 1998,
- Reychler, L. "Peace-making, Peace-keeping, and Peace-building," in *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, 2010.
- Salim, Dias Rifanza, "Deskripsi Toleransi dan Intoleransi Anak Muda di Jerman dalam Novel "Und Wenn Schon!" dan "Steingescht" Karya Karen-Susan Fessel." *Skripsi*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. (2018).
- Takwin, B., A. Mudzakkir, H. Salim, M.I. Ahnaf, & A.Z. Hamdi. "Studi tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia: Pembelajaran dari 4 Daerah, Tasikmalaya, Yogyakarta, Bojonegoro dan Kupang Jakarta: Infid.
- Zaenuri, Lalu Ahmad, "Konflik Jamaah Ahmadiyah dengan Masyarakat nonAhmadiyah: Studi Kasus di Lombok, NTB." *Disertasi*. UIN Jakarta, 2009.

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	STATUS/KEDUDUKAN
1	Ibu Ayu	Tokoh Agama dan Pemerhat Kasus Radikalisme dan Intoleransi Agama/Akademisi di salah satu perguruan tinggi Sleman.
2	Bapak Bowo	Kasat Intelkam Polresta Surakarta
3	Bapak Teguh Riyanto	Bakesbangpol Surakarta
4	Bapak Nur Khafid	Pengurus Kegiatan Pesantren Nasional (PKPN)
5	Bapak Hermanu	Guru Besar di salah satu perguruan tinggi Surakarta
6	Bapak Jundardo	Tokoh agama dan mantan sekretaris FKUB Temanggung
7	Bapak Munjid	Akademisi di salah satu perguruan tinggi Temanggung
8	Bapak Sancoko	Kasat Intelkam Polres Sleman
9	Bapak Kendar	PS. Panit Intelkam Polres Sleman
10	Bapak Supri	Pendeta di salah satu Gereja dan Anggota FKUB Temanggung
11	Bapak Udin	Anggota dan pengurus jamaah Gereja Kristen Indonesia (GKI), Mojosongo Solo
12	Bapak Waskito	Pendeta Gereja Kristen Indonesia (GKI) Mojosongo, Solo
13	Bapak Ramos	Jemaah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Mojosongo, Solo
14	Romo W	Romo Gereja Lidwina Sleman
15	Bapak Badri	Tokoh Agama/Pengasuh salah satu Pondok Pesantren di Temanggung

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN INFORMAN PENELITIAN

FKUB Temanggung

Selama ini saya merasakan, dan kondisi temanggung yang serbenarnya kondusif, selama kami berada di FKUB bersama tokoh-tokoh agama yang ada di temanggung. Alhamdulillah temanggung komplit, ada agama islam, kristen, hindu, budha, katolik dan konghucu. Dan setiap ada kegiatan 6 orang itu komplit. Temanggung sebenarnya Kompak dan rukun, kalau terjadi konflik itu sebenarnya pengaruh dari luar. Pertama, dulu pernah ada pengaruh dari jakarta, duren sawit yang menyebarkan pamflet-pamflet, menyebarkan buku-buku yang membuat orang temanggung tidak rukun. Orang temanggung jadi mengelek-elekan agama lain. Ia mengatas namakan satu agama, yaitu katolik. Tapi setelah kami rapat dan menkonfirmasi pada tokoh kataolik, yaitu romo, romonya temanggung bilang bukan orang katolik, tidak ada di daftar. Kemudian pernah dari orang luar, geger temanggung waktu itu memang diakui gegernya temanggung bukan hanya nasional tapi internasional. Waktu itu, temen saya yang ada di belanda juga tanya, bener gak tuh beritanya, **gereja di bakar (bentuk intoleransi)**, itu juga bukan orang temanggung, orang dari pantura. Pernah juga terjadi tembak-tembakan, itu bukan temanggung tapi jawa barat. Peristiwa-peristiwa semacam ini membuat nama temanggung masuk daftar yang tadi, 3 daerah yang rawan bukan kuning lagi, tapi merah. Waku menjelang pemilu itu merah, akan tetapi waktu kita rapat ke kejaksaaan ada polri, ketika ada FKUB selalu bersama, bukan Cuma kami tapi semua agama yang ada. Tapi kami bersama dengan komponin yang ada, polri, kadim, kejaksaaan, pemda terutama kesdangpol itu seelau bersama kami. Sebenarnya motornya FKUB ya pak jum ini. saya menerimanya wes dadi wesa dadi, ini begini pak begini....kemudian pernah terjadi yang telah disampaikan pak jum itu sesuatu yang intoleran itu dilakukan oleh non islam, moger munculnya sekian banyak gereja tanpa ijin, kami mendatangi beberapa gereja setelah mendapatkan surat dari lurah, dari masyarakat, laporan. Maka kami datang kesana, ke gereja bermunculan tanpa ijin dan ketika kami datang ke daerah-daerah itu bukan hanya ayg muslim, semua datang, komplit. Malahan kalau itu masalah gereja yang kami pasang di depan kalau masalah kristen yang kami pasang orang kristen kalau katolik ya tokoh katolik. Kalau kami menyelesaikan masalah itu ke kelurahan baru ke kecamatan. Selama ini yang terjadi adalah letusan-letusan kecil, itu bisa kami selesaikan dengan baik. Dengan cara menyelesaikan suatu masalah tanpa masalah baru, piye carane itu lah piye carane tanpa menimbulkan masalah baru. yang sampai sekarang masih menjadi ganjalan tapi sudah cukup bagus anunya, dengan perkataan katolik yang ada di kandungan itu sebenarnya bukan masalah apa-apa, tapi ia ingin menguasai tanah yang luas, itu bukan urusan langsung FKUB, tapi FKUB mesti selalu diminta langsung ke pemerintahan, sampai saat ini temanggung kondusif mas. Beberapa hari yang lalu temanggung mengadakan kegiatan pemuda remaja dari berbagai agama, jadi islam dll bertempat di kampung sawa, jadi kita kerjasamanya selalu dengan kemenag, apalagi kantor saya disana, polres temanggung. Kerjasama dengan polres di

semarang, kerjasama dengan wisata daerah kecamatan rogomulyo, saya yang mewakili bersama kesdangpol, dari kejaksaan intelnya, kodim juga intelnya ada juga yang dari DPR tapi tidak datang. Biasanya pak zaid. Jadi temanggung sebenarnya kondusif, kalau ada yang mengatakan tidak kondusif berarti ada yang ototo. **Tadi saya katakan yang kurang toleransi sebenarnya yang non muslim, pernah terjadi, kegiatannya dari pusat masuk temanggung tanpa ijin, harinya pas hari ramadhan, mengadakan kegiatan dengan dalih kebersamaan, kebinnekaan. Tapi karena waktunya ramadhan sementara umat islam baru melaksanakan ibadah secara intens dalam ramadhaan, maka menggagu, jadi FKUB tidak mau menerima, dan polrespun menolak, maka dari itulah terjadi geger. Karena disitu ada kegiatan-kegiatan, salah satunya kegiatan makan bersama waktu duhur, dan itu jakarta yang punya (orgluar) (bentuk intoleransi).** orang temanggung kita rangkul semua. Dan nanti kalau jenengan datang ke non muslim, misalnya konghucu, kristen, katolik. pendeta supriadi bener itu laporan, saya ngaji ke masjid sebelahnya.pak handoko konghucu dulu deket pak hasim sekarang pindah rumhanya. Kalau nanti ketemu sama itu ternyata klop apa yng saya sampaikan dengan apa yang disampaikan oleh pak handoko insyaaallah klop, karena selama ini kompak. Kristen, katolik, banyak kelompok-kelompok, kelompok-kelompok itu yang kadang-kadang soal ditoto, tp itu semua bisa diatasai. Itu yang sangat indah kemrin, ketika diadakan halal bihalal mas, beberapa kali saya diundang untuk ceramah halal bihalal itu, dan yang hadir tidak hanya yang muslim, non muslim juga hadir malah lebih dari separuh. Luar biasa, dan itu satu tempat, bagaimana kita bisa merukunkan hati ini, jadi sadar bahwa kita berbeda namun kita harus tetap satu, indonesianya satu. Memang halal bihalal sudah menjadi miliki bersama seluruh umat bukan hanya umat islam, sekalipun berasal dari islam. Malah hampir seindonesia, di indonesia tidak ada halal bihalal, kmrin kita memanfaatkan halal bihalal itu untuk bagaimana memperkuat kerukunan umat di temanggung.

ANGEL DITOTO = susah ditata, dalam hal aturan. Jadi begini, kalau ada gejala dari non muslim, kita FKUB itu sepakat yang mimpin tim kesana untuk menggerebek, kalau misal kristen jadi yang mimpin itu kristen. Laporannya Oh angel ditoto, itu semua kepingin muncul sementara tidak sesuai aturan. Contoh membuat gereja ia harus punya minimal 90 orang jamaah yang akan memakai gereja itu, tidak hanya gereja masjid pun begitu, ini berlaku secara umum. Nah mereka tidak punya 90 orang tapi maksa bikin gereja. Angel ditoto itu ya maksanya itu.

Kedua, bukan tempat ibadah, tapi ini tempat jualan (toko) dibuat sedemikian rupa jadi gereja, gak boleh, aturan gak boleh, kemudian di kota mas ini berapa daerah banyak, kemudian ada yang daerah janti ada satu, kemudian ada lagi yang tadinya kandang ayam dirubah sedemikian rupa jadi gereja. Nah itu yang dibilang pak pendetanya angel ditoto, bukan dari kita, kita hanya dapat laporan saja.

Umat muslim banyak yang lapar, tidak rela karena tidak sesuai aturan. Tapi kita merangkul tokoh2 muslim, pak kyai-kyai, saya di FKUB itu kebetulan wakil dari mui, yaitu pak kyai agung, saya meminta pak kyai agung bagaimana kita tidak gampang tersulut dari masalah yang terjadi.

Selama 2 periode jadi sekertaris, ada catatan yang sangat menonjol, meledaknya agama 2011 yang saya sampaikan . akhirnya temanggung dipancing dan panas temanggung, waktu itu ketuanya adalah pak rihwan, kemudian dia jadi saksi ahli pas persidangan. kedua pembakaran rumah ibadah LDII tolgowiro, yang bakar NU yang dibakar LDII karena rumah mau dijadikan masjid, kemudian vihara tanpa ijin di kota sari, bahkan tanahnya punya abah sewa, gak jadi untuk vihara tanpa ijin. Budi center di yumprit , agama budha mau buat juga pak hasim marah, pemindahan vihara pondok bambu runcing ke parangkautan prosesnya panjang sampai 5 th. Pendirian Gereja katolik di gudangwinangun dekat kecamatan , pendirian gereja di bangsari umatnya tidak memadai akhirnya menimbulkan masalah, gereja kristen di wonotirto umatnya hanya 15 sekarang 9 orang, toko besi di janti untuk tempat ibadah, akhirnya modusnya ganti, jadi membuat lembaga sosial keagamaan, tapi fungsinya tempat ibadah, kemudian budi center di kalora, indonesia agama 6, budha jawa tengah temanggung, jumlah budha dan viharanya dibanding umat islam dengan masjidnya lebih besar viharanya, mereka memaksakan untuk membuat budi center 10 ha utk budi center, menjadi kerawanan disitu, kemudian pemekaran rumah yang difungsikan menjadi tempat ibadah di pospo, masyarakat sepakat, wes to neng kono ada 5 rumah yang dibongkar, ra sah dipagar akhirnya ada bangunan dibongkar, masyarakat resah, ketika resah NU langsung turun tangan, akhirnya kita datang kesana benar terjadi, silahkan anda disana, tapi kalian tidak bisa keluar dari sini karena sudah ada aturannya. Kemudian di lowungu beberapa aset di bayur, lungu itu isinya bagus malah lungu cukup antik itu yang mengajak membuat ijin masjid adalah pamong agamanya hindu, kemudian waktu ada densus kemrin d temangggung di geddu ternyata wong temanggung datang kesini beritanya menjadi hebat banget, kemudian orang sulawesi menikah dengan orang tretet diburu seperti itu, lah disini gak ada apa-apa orang di rumah istrinya, kemudian orang banyumas di bengkal jualan sepatu kemudian di buru seperti drama.

Pengalihan status tanah HGU (hak guna usaha) menjadi HGB ini bukan kristen katolik, 10 ha dan bupati memberikan akomodasi 1.160 m untuk digunakan gereja dan pertapaan, kemarin FKUB bukan kecolongan, akhirnya tanah negara itu menjadi milik katolik. Untuk natal bersama ketuanya adalah sekwan sekretaris dewan gereja ini di mujahidin, seperti masjid itu normal. Saat ini biasa ketika maghrib sampai isya umat islam sholat, mereka beribadah disitu, ini fakta tidak taat aturan karena tidak boleh seperti itu, jadi kalau dikatakan radikalism atau intoleransi dalam islam ya seperti itu, tp kalau dilihat dari semua agama sebenarnya intolerans itu ada di setiap agama, kita membatasai agama diluar FKUB. Kalau mengenai kepercayaan kita serahkan dengan kejaksaan.

Temanggung telah membuat peta kerukunan, pendirian rumah ibadah, penjara agama, bantuan negeri, penodaan agama dll. Ada pendeta baru membuat masalah, bahkan d kampung ini sdh 2x. Aspek 6 agama, kemudian lemahnya penegak hukum, dan pemakaman jenazah.

Shohebul Umam : Jadi penelitian kita ini sebenarnya tentang intoleransi beragama. Lokus penelitian kita ada di tiga, daerah Sleman kemudian Solo dan Temanggung.

Ibu Ayu : Kenapa pilihannya Sleman?

Shohebul Umam : Karena Sleman katanya merupakan satu daerah yang paling tinggi angka intoleransi beragama nya. Kita mengukur itu dari sejak 2014 sampai 2018. Kita juga sudah berkoordinasi, bertukar informasi dengan pihak kasat intel dan data-data yang diperoleh oleh Polri terkait dengan hal itu. Jadi kita,, sebenarnya lokus kita ke ini.. apa namanya, peran Polrinya dalam, dalam penanganannya. Tapi terlebih dahulu kita ingin mengelaborasi lebih jauh tentang kasus-kasus itu dari latar belakangnya. Jadi mungkin yang kita pertama akan tanyakan terkait dengan intoleransi sendiri, kira-kira pandangan ibu terkait dengan intoleransi beragama sendiri itu gimana?

Ibu Ayu : Aku tuh kaget makanya tadi klo pilihannya ke Sleman. Yang saya tahu itu kayaknya di daerah Bantul ya akhir-akhir ini. Sleman setelah Lidiwina itu kayaknya nggak banyak kasus yang dulu pernah di Peggung itu, gitu. Makanya..., itu datanya dari mana mas yang intoleransi tinggi di Sleman itu?

Shohebul Umam : Dari POLRI Resort Sleman.

Ibu Ayu : owhh.. jadi punya data dari Polres ya! Bukan dari yang memang pendekatannya itu ya! mungkin iya sih. Yaaa, kalau di Jogja memang kan datanya memang tinggi toh, tahun 2014 Wahid Institute menobatkan paling tinggi. Kemudian baru tahun 2015 turun menjadi,, bukan paling tinggi nomor dua setelah sebelah Jawa Barat, Jogja. Habis itu tahun 2015 menjadi nomor 4 kan intoleransinya memang. Kalau di Jogja memang,,, lumayan memang

Shohebul Umam : Tapi secara narasi itu kan, secara historical itu kan, apa namanya Jogja sendiri dan Sleman ini punya historical yang sangat kuat dengan,,dengan multikulturalisme itu sendiri, tapi kenapa kemudian di akhir-akhir ini angka intoleransi beragama itu sendiri malah makin meningkat, khususnya di DIY itu.

Ibu Ayu : Itu sebenarnya nyambungnya dengan ini sih mas, menurut saya, politik identitas dan menguatnya islamisme. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau setelah pasca reformasi yang namanya identitas mau dirayakan, terserah itu kan. Maksudnya informasi itu membuka ruang bagi banyak identitas untuk muncul, baik itu identitas-identitasnya etnis, suku maupun agama. Itu pas kebetulan bareng dengan menguatnya islamisme di.., ini sebenarnya impor ya dari,, dari luar ya! Eeeh, bagaimanapun dan gerakan-gerakan yang mengatasmakan Islam itu menjadi sangat kuat. Kemudian ada ISIS, ada beberapa gerakan-gerakan yang di luar, yang kemudian diadopsi di Indonesia, yaitu yang sebenarnya menjadikan,, apa ya! Eeem... salah satu pemicu... Ah. Dalam konteks Jogja sebenarnya salah satu yang.... kenapa kemudian itu kok bisa muncul? Ada beberapa literatur yang mengatakan sebenarnya ini karena peran sultan yang tidak sekuat seperti dulu lagi. Ini banyak ya! Beberapa pertemuan saya kemarin setelah reset juga yang tentang Jogja. Ngumpulin beberapa kelompok yang pro-pluralisme dan anti-pluralisme. Bahasanya terlalu ekstrem ya? Pokoknya orang-orang yang pluralis dan tidak begitu pluralis lah gitu, bukan anti. Mereka melihat bahwa ini sebenarnya yang menjadikan Jogja jadi tidak nyaman ini, karena peran Sultan

sebagai jangkar itu sudah nggak berfungsi lagi, kalo dulu orang itu pokoknya kalau sultan sudah dauh apa itu manut, sekarang tidak semuanya seperti itu. Dan juga sultan sendiri, eeh, apa ya? Legitimasinya dalam kontek isu-isu itu juga tidak, tidak cukup jelas gitu, misalnya beberapa kasus itu Sultan, menurut saya, langkah-langkah nyata hanya sekedar ngasih himbauan, gitu aja, nggak,,nggak ada langkah konkretnya. Sebenarnya kalau dilihat itu yang cukup banyak di isu pluralisme itu malah di Gusti Ratu daripada sultannya itu, yang, yang kita lihat waktu itu, kenapa udah di Jogja kok sekarang jadi seperti ini? Itu karena sebagai rujukan nya itu sudah nggak,, nggak berfungsi seperti dulu lagi gitu.

Shohebul Umam : Berarti menurut Ibu ini karena degradasi figur gitu ya Bu?

Ibu Ayu : he'eh-he'eh,, ya! Sultannya sendirikan, maksudnya untuk mendapatkan legitimasi dari rakyatnya sendiri, ya! Kita sudah ada UUK ya!, Undang-Undang Keistimewaan yang menjadikan ia seumur hidup dan sebagainya. Tapi kan secara sosial, secara kultural, eeh.. saya nggak tahu, menurut saya sudah mulai agak ini Iya! karena juga kita ngelihat misalnya kasus banyaknya hotel-hotel itu juga masyarakat gerah. Tapi itu kan juga karena kontribusi bukan mereka.... Sultan yang ngasih izin gitu kan, seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu juga yang membuat orang kemudian nggak begitu percaya.

Shohebul Umam : Berarti ini juga ada kaitannya dengan,, dengan ranah ekonomi? Gitu bu.

Ibu Ayu : Heeh... Iya. menurut saya juga ada seperti itu. Kalau ngomongin tentang intoleransi di Jogja, nek ngomongnya kuat sekali. Yang suka rame itu siapa misalnya kelompok-kelompok sana. Mereka ngapain selalu ramai, karena itu urusan lahan parkir di Abu Bakar Ali dan di sekitarnya kok, gitu. Itu kan kayak gitu. Kalau ngomongin tentang bagaimana yang bikin rame lho ya di jogja. Kan semua orang juga tahu, giyu kan, siapa yang nguasain di sana, temen-temen yang di kelompoknya....sopo itu mas jenenge? aduhhh.. bukan asli, siapa sih aku lupa namanya.

Shohebul Umam : FJI?

Ibu Ayu : Nek, FJI itu yang di Bantul. Mereka geraknya kebanyakan Bantul, Gunung Kidul. Ini lho! Orang Ngabean ini lho. Siapa sih. Ya Allah kok lupa sih. Yang ngurus GBK itu lho. Kepala GBK-nya itu. Kalau yang parkir di Malioboro itu kan dikuasai oleh mereka, itu kan lahannya mereka memang. Mereka mainnya di lahan parkir.

Shohebul Umam : Jadi kenapa kemudian isu tentang agama yang bisa, yang boleh kita katakan sebagai komoditas jualan yang ...

Ibu Ayu : Paling mudah mas, dimanapun yang paling mudah dibakar emosinya, ya agama. Itu paling murah sekali lah, orang kalau mau rame-rame, yang paling murah itu, nggak usah pakai modal, itu langsung bisa itu. Banyak ya! Di mana-mana itu kasusnya, bukan hanya di Jogja. Maksudnya kalau ngomongin tentang isu yang seharusnya tidak ngomongin agama, kalau pakai isu agama, cepet banget Itu. Katanya yang Ambon itu juga bukan karena agama. Tapi kemudian, yang menyebar isu agama, langsung besar sekali. Gampang. Paling mudah, yang paling.... di media sosial aja kalau pakai bawa-bawa agama, cepet banget, ini berarti menjadi isu paling seksi. Itu urusannya nanti... ancumannya kan nanti

kalau nggak setuju dengan ini, berarti kamu bukan Islam. Begitu menakutkan kalau orang sudah dianggap tidak menjadi Islam itu, gara-gara tidak mendukung sesuatu.

Shohebul Umam : Ini kemarin saya juga membaca diskusi dengan Pak Kanit, intel-nya, Pak Endar, jadi kemarin katanya FJI ini di Sleman juga sangat kuat. Pernah sampai melakukan sweeping di Ambarukmo itu. Karena,, apa namanya, ada isu bahwa karyawan, salah satu karyawan memakai atribut Natal waktu itu. Tapi ternyata itu tidak terbukti. Jadi dengan dengan kondisi yang seperti itu, FJI merasa itu ancaman. Apakah sedemikian sensitifnya. Sedemikian takutnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam? Itu kan sebenarnya hanya simbolik itu kan?

Ibu Ayu : itu klo menurutku, mereka itu bukan karena unsur takutnya sih Mas. Dia mencari arena untuk menunjukkan kekuatannya dan dengan menunjukkan kekuatan itu,, itu adalah salah satu sumber pundi-pundi mereka. Menurut saya itu nggak ada urusannya. Apakah mereka sebagai orang Islam itu begitu terancamnya dengan hanya simbol-simbol yang pakai, misalnya pakai mengucapkan Natal atau kemudian pakai baju-baju natal, bukan baju natal pula itu. Maksudnya itu kan tradisi yang tidak kemudian berhubungan dengan agama sebenarnya kan, pakai kerudung, apa? Topi yang kayak gitu. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan,, dengan,, dengan agama sama sekali. Bukan itu sebenarnya... Menurut saya itu bukan karena ketakutan,,, kalau ngomong ketakutan itu kayaknya kan motivasi dari dalam begitu toh mas. Heeh enggak ah menurut saya. Itu menunjukkan *show off*, kalau saya lihat. Mereka menunjukkan ke publik bahwa mereka ada pertama, dengan melakukan eksistensi. Kalau sudah ada eksistensi, mereka membuat apa narasi tentang ketakutan. Ya. Kalo ketakutan berarti kamu membutuhkan saya untuk melindungi kalian. Kalo itu kemudian menjadi transaksi ekonomi. Berapa kamu berani bayar saya untuk kayak gini, untuk melindungi. Aku melihatnya mereka cari ini aja. Kalau di Jogja itu kan soalnya kelihatan sekali ini. FPI-nya itu kelihatan juga. Apa? motif ekonominya itu kuat sekali. Sangat kentara maksud saya kalau dibanding dengan tempat-tempat lain, jogja itu sangat kentara.

Shohebul Umam : Iya. Kasus yang di Lidwina kemarin itu, saya juga sudah diskusi dengan Bapak Pendeta yang ada di Lidwina. Katanya pelaku itu tiba-tiba datang dan ngamuk, dan sampai melukai beberapa orang di situ. Dan penanganannya hanya sekedar mediasi. Dan, apa namanya, pendeta itu mengira bahwa itu memang,, memang ada campur tangan pemerintah. Tapi saya tidak mengerti itu...

Ibu Ayu : Maksudnya gimana itu?

Shohebul Umam : Itu apa namanya, kejadian itu memang didalangi oleh pemerintah. Entah motifnya apa.

Ibu Ayu : itu malah baru dengar. Kalo kasus di Lidwina itu bagi teman-teman yang konsen di isu kekerasan agama di Jogja itu menganggap, itu sebenarnya kaya anomali. Karena agak susah nyari hubungannya dengan yang lain-lain, karena si pelaku ini sebenarnya juga baru kali itu melakukan. Ini nggak ngomongin tentang jaringan nggak,, nggak ketemu. Terus kemudian dia juga melakukannya sendirian, tidak bekerja sama dengan yang lain. Itu yang kayak

gitu klo bekerjasama itu kan, kita bisa menganalisis toh; ini jaringannya siapa? Motifnya apa? Gitu. Nggak tahu kalau Lidwina itu, temen-temen nganggepnya itu emang koyok, apa ya? Dia hanya tes-tes aja sih situasi juga pada waktu itu. Itu kan konteksnya sebelum, sebelum Sultan Mantu. Apa ya? Iya enggak sih?

Shohebul Umam : Enggeh, Enggeh, Enggeh

Ibu Ayu : Pokoknya sebelum sultan mantu toh. Tapi ini orangnya itu kayaknya bukan tidak punya,... punya,.. apa ya? Bukan orang yang memang kingmaker, yang memang dia mau bikin anu gitu. Kayaknya dia rendem aja sih. Nggak tahu sih. Kalau saya melihatnya seperti itu. Karena kan sampai kemudian, dilihat bahwa dia itu sebenarnya orang yang tidak waras, begitukan. Kayak,.. sempat kayak gitu juga kan. Terus itu penyelesaiannya pie toh? Aku orang dong.

Shohebul Umam : Itu kata,.. kata Pak Kendar kemarin, itu dengan memediasi kedua,.. ya! Ada negosiasi kemudian untuk tidak saling bertemu, itu kan. Itu.. kalau menurut saya itu merupakan pola, pola yang bisa dikatakan klasik, Johan Galtung sudah lama membicarakan itu. Tapi sampai sekarang karena penanganannya mungkin seperti itu, apa namanya? Masalah ini selalu lahir gitu. Itu kan yang,.. yang baru sekarang, yang ada di daerah Kotagede, yang salib dipotong. Dan sampai sekarang kata Pak Kendar pelakunya masih belum ditangkap, masih belum diketahui. Jadi melihat, melihat, eeh, melihat masalah ini kalau menurut Ibu, ini kan sebenarnya bukan, bukan persoalan yang besar gitu, ini mungkin tidak,.. tidak mengancam terhadap ketahanan Nasional. Tetapi kalau misalnya dibiarkan, itu juga bisa menjadi masalah yang besar.

Ibu Ayu : Enggak tahu kalo yang di Lidwina itu, dianggap sebagai sesuatu yang besar nggak? Karena kan kemudian langsung ke tangkap, juga kemudian sudah selesai gitu ya?

Shohebul Umam : Iya Bu

Ibu Ayu : heeh...

Shohebul Umam : Itu kalau menurut,.. kalau menurut Pak Pendeta kemarin itu,.. itu ada ada semacam ketidakpercayaan dari Pak Pendeta, kalau saya membaca pendeta. Seolah dia tidak percaya kalau orang itu, pelaku itu benar-benar, apa ya? tidak mental,.. penyakit mental, itu kan kata polisi, itu penyakit mental. Tapi saya khawatir jangan-jangan polisi ini tidak benar-benar bisa mengusut masalah itu. Sehingga ada,.. di jadikan, apa namanya? Dijadikan isu bahwa itu sakit mental.

Ibu Ayu : Tapi tetap selesai....., udah diselesaikan?

Shohebul Umam : selesai katanya.

Ibu Ayu : Iya, karena memang, kalo aku ngelihat, akhirnya itu, ya memang kemudian kayak antiklimak gitu loh. nggak ada,.. dan ketika dianggap dia sudah,.. karena dia siapanya itu juga, dia itu bukan *some body* yang,.. jaringan ... diusut dari jaringan mana, juga kayaknya enggak. Ini kan orang yang,.. dia pernah menyakiti Payaman gitu toh,

Shohebul Umam : Katanya dia dari Banyuwangi.

Ibu Ayu : iya orang Banyuwangi. Kemudian dia nyantri di Payaman. Terus dia di sini beberapa hari, terus kemudian melakukan penyerangan itu. Motifnya apa? juga nggak begitu jelas, gitu. Dan kemudian dianggap selesai gitu maksudnya..? kalo dari saya lho ya! Karena saya kebetulan juga ikut yang pasca itu, dengan

teman-teman healing ke situ. Pas waktu habis acara itu yang kita masih penguatan dengan ibu-ibu di sana,. Kita,, saya datang waktu itu. Dan kayaknya udah. Nggak ada perkembangan lebih lanjut gitu, dari kasus itu.

Shohebul Umam : Tapi korbannya pada trauma katanya?

Ibu Ayu : Oh iya. Kita makanya bikin program trauma healing pada waktu itu. Karena dia memang bawa pedang, kan memang. Masuk itu memang bawa pedang, sambil gerak-gerak. Memang waktunya cepat sekali. Udah. Banyak korbannya memang trauma. Karena saya secara kasus itu. Dia itu kayak kasus yang berdiri sendiri, tidak bisa dikait-kaitkan dengan yang lain gitu. Saya nggak tahu, mungkin kalau dia juga bukan orang dari anggota kelompok tertentu itu yang... yang maksud saya itu loh, yang kemudian itu jadi,.. jadi kayak kasus tersendiri yang lepas dari yang lain. Itu, ya itu.

Shohebul Umam : Tapi melihat kasus ini,.. ini kan lumayan besar kasusnya, ya Bu ya? apa namanya? Itu kan sampai kejadian seperti itu. Berarti saya melihat bahwa peran Polisi di sini, itu kan ada beberapa,.. ada berapa fungsi; ada preventif ada preventif dan Represif dan rehabilitasi. Itu kan polisi,.. Polri itu punya peran itu. Dan peran pre-emptif itu, di deteksi dini merupakan satu hal yang sangat vital, gitu kan. Dan itu tugas Intel. Dan tapi kenapa kemudian, saya lihat di beberapa kasus yang terjadi di Sleman itu,

Ibu Ayu : itu enggak jalan. deteksi dirinya jadi enggak jalan itu. Pada enggak bisa, atau bagaimana problemnya?

Shohebul Umam : Saya sebenarnya, kalau,.. kalau nanya sama polisi itu, sudah dilakukan oleh BIMAS, ada Bimbingan Masyarakat dan lain sebagainya. Tapi ini kalau misalnya kita berkaca pada masanya Benny Moerdani, itu kan, masalah-masalah yang seperti ini tidak sampai ke permukaan udah selesai. Jadi kalau menurut Ibu peran,.. peran Polri sekarang itu sebenarnya gimana khususnya di Sleman?

Ibu Ayu : kalau untuk kasus-kasus tentang kekerasan agama kan memang polri, kalau menurut saya, cara posisinya itu, kayak posisi orang bingung. Karena itu diakui oleh orang banyak. Karena makanya dulu banyak sekali project-project yang dilakukan oleh, terutama Pusham UII untuk mendidik para Polri, terkait dengan kasus-kasus kekerasan yang berbasis agama. Karena gini, misalnya ngomongin tentang kasus Ahmadiyah, misalnya. Itu Polri itu dalam banyak kasus laporan, misalnya mengatakan bahwa Polri itu anu, posisinya tidak menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat. Karena dia sendiri bingung pada,.. dihadapkan pada situasi. Apakah dia sebagai bertugas, sebagai abdi negara atau dia sebagai orang Islam. Misalnya itu ya. Dalam konteks kasus,.. Misalnya kasus-kasus yang Syi'ah, yang itu. Mereka kan pada posisi yang,.. saya ini,.. saya sebagai sesama, sebagai orang Islam yang lebih dulu atau saya sebagai abdi negara yang harus saya ke depan kan. Banyak polisi bingung dalam konteks itu. Dan sebagian beberapa riset menunjukkan mereka memposisikan diri sebagai orang Islam terlebih dahulu, kemudian mereka nggak mau membantu banyak, karena dia di dalam kepalanya sendiri sudah mengatakan bahwa mereka orang sesat.., mereka ini.., jadi mereka melakukan,.. melakukan kegiatan yang... Itu yang, saya kira dalam banyak kasus kekerasan agama, ya. Mereka...mereka,..eeeh, mereka ada apa? kebingungan antara sebagai warga

negara atau sebagai orang Islam. Itu yang,,... yang,,... yang itu. Yang memang,, memang nggak selesai. Dan menjadi wajar menurut saya, kalau kita melihat ada beberapa laporan, saya nggak tahu ini masih berlaku, atau nggak. saya pernah melakukan penelitian ke Jawa Timur. Mereka setiap pagi itu ada tadarus. Jadi proses penguatan pengentalan itu memang dilakukan, yaitu pengentalan identitasmu sebagai orang Islam duluan daripada sebagai warga negara.

Shohebul Umam : Jadi Polri ini, di 3 daerah ini hampir sama dalam penanganannya. Cara mendeteksi dini itu hampir sama, yaitu ada Safari subuh, di Sleman, di Solo dan di Temanggung.

Ibu Ayu : Setiap hari itu?

Shohebul Umam : Kalau,, kalau mereka para... aaah .. polisi ini mengatakan itu setiap hari dilakukan. Tapi..., tapi kalau begini caranya, itu kan, menunjukkan bahwa memang tidak ada kebijakan yang akomodatif gitu. Jadi kalau ibu sendiri melihat Sleman itu, kebijakan untuk masalah ini seperti apa? Apakah Polri sendiri memang harus perlu, itu penting untuk ada instansi yang memang membaca kasus terlebih dahulu untuk deteksi dini?

Ibu Ayu : Membaca kasus ya? Aku nggak tahu, aku merasa bahwa persoalan kewarganegaraan itu harus *clear* dulu ya di tingkat para... apa?.. aparat negara itu. Jadi kalau dia pada posisi ini mana yang harus dia dahulukan, misalnya. Itu harus clear dulu dari awal. Misalnya tentang kewarganegaraan itu kan memang saat ini juga kita punya problem, ya! makanya kita kemudian kemarin sampai HTI dilarang itu kan salah satunya kan. Karena kita melihat di dalam konteks negara. Apa ya? di dalam badan negara sendiri kan memang kita juga melihat ada banyak,.. banyak yang menggerogoti kan gitu. Lah maksud saya, selain dia paham konteks yang lebih luas, lo ya! itu misalnya, dari situ aja yang tentang kewarganegaraan,, kurang perantara sebagai Citizen, kemudian apa tugas dia dalam konteks itu. Itu menurut saya harus clear dulu di tingkat.... mereka nggak menga mengo lagi, nggak usah bingung, bingung lagi kalau ada kayak gini mana yang harus didahulukan gitu. Mereka harus mikirin dulu. Kayak orang mau mati, mau ditanya dulu Agamamu apa gitu, baru nanti ditolong, gitu kan nggak, nggak,.. nggak bisa seperti itu. Terus kalau tadi paham kasus, itu yang aku nggak ngerti, mahamin itu pasti susah sekali, siapa yang.... orang karena memang isu ini kan banyak toh di Indonesia, banyak sekali. saya yang terlibat dalam.. apa ya? Isu-isu ini kan sejak tahun 2008 ya! yang tahunan kehidupan beragama itu. Eeehhh, dan memang orang yang di bidang itu pun, ini kasusnya kadang-kadang itu rumit sekali gitu. Kalau memang dia nggak punya fashion untuk, untuk ke sana ya! akan agak susah nanti, gitu. Mungkin perlu mereka punya paham, paham konteks ya! Tapi menurut saya yang paling pertama kali di dalam mereka sudah selesai tentang tugas dan kewajibannya itu, seperti itu.

Shohebul Umam : Kalau di Solo begini Bu. Kemarin kan saya juga di Solo. Di Solo itu Polri dengan, dengan pihak FKUB, dalam kasus ini memang sangat dekat sekali cara menanganinya. Jadi FKUB yang, yang membangun pengetahuan masyarakat untuk penanganan itu, Polri hanya sekedar mengamankan. Nah, sedangkan di Sleman, saya tidak terlalu banyak tapi kemarin kata Pak Kendar, tugas FKUB, FKUB seolah mereka tidak punya sinergi.

Ibu Ayu : Nggak. Memang nggak. Dulu kayaknya pernah bikin yang namanya di Jogja Jaga Warga atau apa gitu lho. Pernah denger nggak itu? Itu lewat dengan kesebangpol. Itu bagian kayak siskamling itu ya! kode pengamanan yang basisnya dilevel...

Shohebul Umam : Owh sekarang Dimas?

Ibu Ayu : heehh, yang kayak gitu. Tapi jaga warga itu memang khusus untuk isu-isu tentang kekerasan berbasis agama. Tapi enggak tahu. Coba cek Jaga Warga itu, bukannya kayak mas Eko Prasetyo yang minta izin dari Kesbangpol waktu itu. Tapi nggak tahu. Aku enggak ngereset di level, di level apa? Di level masyarakat itu, pemerintah terlibat NJO. Kayak kasus misalnya kemarin, pemilu, itu kan bikin di bawah kan luar biasa ya segregasinya. Tapi Negara tidak melakukan apa-apa kayaknya. Tidak ada proses preverensi atau apapun dari negara. Yang dari, dari pemerintah nya nggak ada. Yang melakukan temen-temen LSM. Yang jaga di bawah itu temen-temen LSM sebenarnya kalau sekarang. Malah apalagi kalau polisi. Citra polisi itu kan masih menakutkan ya? Meskipun telah berusaha friendly, atay pun itu, enggak akan melibatkan mereka untuk tanya-tanya saya seperti itu, maksud saya begitu. Saya nggak tahu kalau di sini misalnya kasus yang kemarin rame... apa?... polarisasi gara-gara Pilpres misalnya. Itu ndak ada yang bisa dilakukan. Maksudnya ndak ada himbauan dari pemerintah atau apa. Saya malah terlibat dengan teman-teman sendiri, yang melakukan itu di level ibu-ibu, di PKK- PKK gitu.

Shohebul Umam : Kemudian ini Bu, apa namanya? Di tiga daerah ini, Sleman, Solo dan Temanggung memang punya kesamaan, salah satunya adalah banyaknya berdiri pesantren-pesantren gitu. Kalau di Temanggung kita main juga ke pesantren. Kemarin saya, saya sendiri ke sana katanya memang ada., apa namanya? Ada semacam fokus ke sana untuk menguatkan toleransi, salah satunya dengan kitab-kitab yang memang membahas soal seperti itu. Dan Masalahnya kalau di Solo ini banyak pesantren-pesantren kecil. Saya bertemu dengan Pak hermanu kemarin, yang tidak terdeteksi, tidak terjangkau oleh,.. oleh Polri. Itu masalahnya. Kemudian kalau misalnya di Sleman kira-kira Seperti apa?

Ibu Ayu : Nek aku sendiri enggak ngerti ya. Maksud saya, kalau selama ini layaknya juga kita kerjasama dengan kepolisian, nggak pernah tahu, aku nggak yakin Polres Sleman tahu sini gitu. Saya, saya kok enggak yakin gitu. Maksudnya tahu, terus kemudian fungsinya apa gitu, misalnya ini kan, sini itu kan termasuk dalam.... dulu sempat telah beredar tentang list Pondok liberal, gitu-gitu. Gara-gara kita sering menerima temen-temen Nasrani belajar ke sini, gitu-gitu. Nggak tahu sih kalau intel, aku nggak ngerti cara kerjanya ya. Tapi aku kok nggak yakin mereka tahu. Jadi maksud saya kalau di Sleman, mungkin juga sama ya. Wong banyak sekali orang juga nggak tahu kalau, misalnya saya ngomong Melangi pesantren ya Mbak? Iya misalnya gitu. Orang mengiranya kalau Mlangi itu hanya ada satu pesantren. Padahal di sini ada banyak pesantren gitu.

Shohebul Umam : Tadi saya bingung juga, makanya saya di sana Assalamu Alaikum.

Ibu Ayu : makanya pada... maksudnya yang pada... informasi yang paling basic itu aja, mungkin nggak nyampek gitu. Apalagi kemudian ngomongin tentang apakah ini corak pesantrennya apa gitu ya. Nggak tahu. Saya nggak yakin mereka

akan punya databest itu. Mungkin ya! Aku nggak ngerti, gimana ya caranya. Padahal itu pusat informasinya negara ya. Makanya gimana yaa. Pie ya caranya negara untuk bisa mendeteksi dini itu. Aku jadi bingung. Makanya itu lewat apa kemudian. Aneh ya.

Shohebul Umam : Saya kemarin juga nanya sama Pak,, Pak Kasat Intel, Pak Sancoko. Kenapa kemudian tidak bisa terdeteksi dulu? Saya juga minta dihubungkan dengan beberapa pesantren, tapi ternyata beliau berdua Pak Kasat Intel dan Pak Kendar ini tidak, tidak tahu. Karena memang sampai sekarang nggak ada kabar, meskipun sudah ngomong “iya saya hubungkan.” tapi nyatanya tidak ada.

Ibu Ayu : Aku nggak yakin mereka, apa ya? Mekanisme. Mungkin sampean lebih tahu daripada saya ya. Karena kita itu kan jadi objek yang diteliti toh, maksudnya saya yang,, yang jangan-jangan intel bekerja di sini, tapi aku nggak ngerti, gitu lho. Maksud saya gitu lho. Karena aku nggak merasa ada apapun entah kegiatan atau proses yang, kira-kira kita tahu, owh kita sebenarnya diperhatikan bersama kepolisian gitu. Aku nggak ngelihat seperti itu di sini. Kita kalau ke mana aja kayak nggak pernah mengundang juga sih. Kayaknya nggak pernah menghubungi, kita juga kalau bikin kegiatan di sini Nggak perlu pakai surat-surat ke pemerintah sini juga kayaknya.

Shohebul Umam : Tapi kalau menurut jenengan kira-kira peran Polri ini seperti apa untuk, apa namanya? kalau tidak menyelesaikan, minimal mengurangi masalah-masalah yang intoleransi beragama?

Ibu Ayu : Kalo yang kelihatan ya? Tentu preventif harus ada ya. Harus dicari formulanya bagaimana mestinya melakukan prevensi. Tapi yang paling dibutuhkan menurut saya dalam konteks, ketika ada kejadian cepat aja. Nggak kayak,, apa?.. polisi di film-film India. Misalnya kasus yang dulu pernah saya ikut di situ adalah waktu penyerangan LKIS. Waktu ada Insan Anji. Pernah dengar enggak itu? Itu kan aku di sana. Tuh kan isu bahwa FPI akan, akan menyerang acara itu. Sebenarnya sudah dari sehari dua hari sebelumnya toh. Bahwa nanti akan ada FPI nyerang acara ini, dengan informasi itu. Karena kan acara siangnya digagalkan yang di pascasarjana, sekolah pasca. Terus kemudian malamnya kan temen-temen bikin acara di LKIS situ. Kita sudah tahu itu. Maksudnya kita juga sudah laporan minta-minta untuk di, di ini. Dalam konteks kasus-kasus seperti itu yang dilakukan oleh Polri adalah meminta kelompok-kelompok yang melakukan kegiatan itu, mending tidak jadi mengadakan acara. Itu kan yang dilakukan. Itu yang dilakukan dulu waktu di pascasarjana. Ketika ini, ketika udah rame itu akhirnya kan kita ditekan dari Rektor. Saya waktu itu di Pascasarjana. Soalnya saya terlibat di situ. Kita ditekan oleh Rektor, mbok wes nggak usah bikin acara aja gitu, karena nanti akan diserang dan lain sebagainya. Jadi polisi tidak pada posisi berbeda memberikan...apa?.. kebebasan untuk.. ya kalau ini forumnya ya silahkan jalan kemudian dia dalam posisi mengamankan kegiatan, bukan. Dia pengen menghindari hari itu, agar tidak terjadi bentrok. Caranya seperti itu termasuk yang di LKIS itu kan seperti itu. Tapi temen-temen kan nggak mau, udah nggak usah aja, temen-temen nggak mau, akhirnya di serang. Baru polisinya datang belakangan pasca kejadian itu.

Shohebul Umam : Apakah memang situasi itu memang sudah apa ya? disetting atau memang gimana ya?

Ibu Ayu : Tapi selalau penyelesaiannya begitu mas. Kalo ada kasus-kasus seperti itu selalu penyelesaiannya, kayak diskusi senyap misalnya, itu kan kayak gitu juga, diharapkan nggak usah aja gitu. Pada tahap penyelesaiannya Polri itu, dia cenderung kayak, entah nggak mau kerja, nggak mau,, itu kan kalo nanti bener-bener,... kalau sudah enggak jadi acara, dia enggak perlu kerja. Tapi kan enggak begitu toh sebenarnya cara ini-nya, cara menyelesaikan masalahnya itu bukan, bukan hanya ketiadaan konflik. Tapi bagaimana mengelola konflik sebenarnya kan. Itu yang nggak dilakukan kan, dari proses bagaimana,... ya kalau setiap aktivitas warga negara seharusnya kalau dia sekaligus tujuan dilakukan aja dan tugas yang paling jelas sebenarnya melindungi itu, mengamankan. Tapi cara dia mengamankan adalah dengan tidak perlu mengadakan, heeh, itu yang problematic. Kenapa kemudian sampai pada....? itu yang menurut saya perlu ditelisik, kenapa kemudian pilihan, pilihan action mereka adalah menahan untuk pilihan, pilihan... apa ya? pilihan kerjanya adalah dengan mencoba agar itu tidak terjadi gitu. Maksudnya ditiadakan kegiatannya itu, kenapa seperti itu. Apakah itu semata-mata karena pertimbangan keamanan atau kemudian karena ada motif-motif lain selain? Maksud saya motif lain, ya itu tadi yang mereka belum clear tentang persoalan bagaimana, misalnya itu isu-isu yang menurut agama mereka tidak,, apa? Sesat. atau yang menurut kayak ustadz Panji itu kan banyak orang bilang itu sesat, kemudian faham keagamaannya mempengaruhi dia untuk bersikap. Itu yang menurut saya juga... karena memang banyak kasus misalnya kalau ketahuan kalau memang biasanya pimpinannya adalah dekat dengan kelompok-kelompok kanan ya! akan berbeda gitu. Jika melihat persoalannya seperti seperti itu apakah problemnya memang dia yang enggak, memang enggak mau kerja, apa itu, itu urusannya dengan ideology. Itu yang menurut saya bahaya kalau alasannya adalah ideologi.

Shohebul Umam : Jadi perlu diperjelas lagi...

Ibu Ayu : Kenapa ada keputusannya harus mending milih nggak usah diadakan gitu. Aneh menurut saya itu. Apalagi waktu itu di kampus, ah ngawur itu. Kenapa kok jadi kayak gitu.

Shohebul Umam : Kemarin kalau di Solo motifnya kalau menurut pembacaan Prof. Herman kemarin, memang situasinya sama. Polisi sudah tahu

Ibu Ayu : Pak Hermanu itu yang proses di Pancasila itu, bukan?

Shohebul Umam : Bukan yang di UNS Bu. Beliau itu membaca bahwa ini berkaitan dengan kesejahteraan Polri sebenarnya, karena menurut beliau konflik-konflik seperti itu memang ini ada, ada kepentingan ekonominya itu, karena tidak jarang katanya Prof Herman itu menemukan ya memang ada transaksi gitu. Apa kemungkinan itu memang, itu memang kuat?

Ibu Ayu : Bisa jadi. Bisa jadi. Soalnya dari orang awam yang jauh kayak gini kita nggak bisa. Tapi kan kita lihat kayaknya memang ada, ada itu, kemungkinan itu, bisnis keamanan itu, luar biasa.

Shohebul Umam : kayak di Madura itu memang sangat bagus sekali

Ibu Ayu : Apanya?

Shohebul Umam : di Madura itu kan, ini kalau politik hanya ada dua kekuatan Kyai dan para Blater. Dan Blater itu memang punya definisi tersendiri terhadap kesejahteraan masyarakat dengan aman saja itu.

Ibu Ayu : Aman sudah Sejahtera

Shohebul Umam : itu kalo di Madura emang gitu. Yang penting aman masyarakat udah nggak ngerti, entah haknya udah ke mana. Dan LSM kebanyakan memang takut. Saya, saya pun sendiri kemarin cuma upload, upload ini tentang dana desa itu udah, udah disatroni.

Ibu Ayu : Sampean mana Maduranya Mas?

Shohebul Umam : Madura, Sumenep saya Bu.

Ibu Ayu : Sumenep?

Shohebul Umam : Jenengan pernah main ke Madura?

Ibu Ayu : Pernah. Pernah. Tapi cuma nyampek ke Sumenep saya. Dimana sih. Banyak teman-teman saya dulu, bukan dulu sih. Sampean Sumenepnya mana?

Shohebul Umam : Guluk-Guluk, Annuqayah.

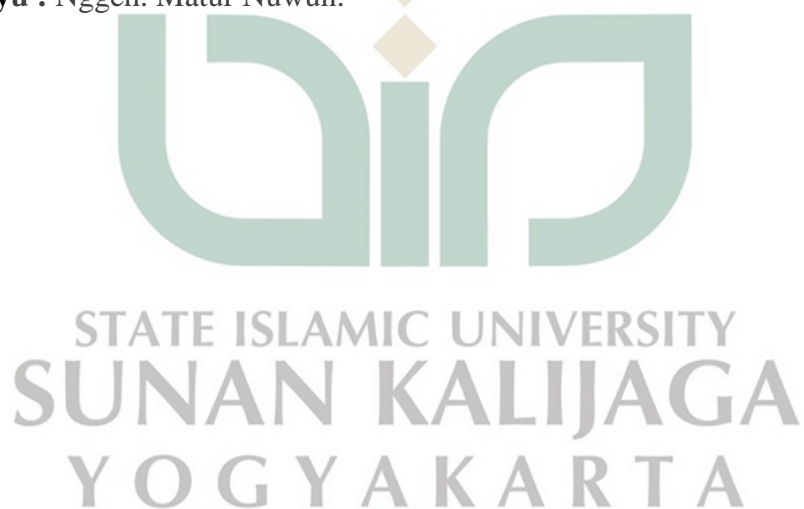
Ibu Ayu : Annuqayah itu Neng Ila, yang saya tahu. Kakak saya Mbak Is. Neng Is kenal?

Shohebul Umam : Owh iya. Itu kepala sekolah MTS saya dulu Bu.

Ibu Ayu : Owhggg. Adeknya di Balikpapan toh. Yang neng Ila.

Shohebul Umam : Mungkin. Mungkin untuk wawancaranya segini dulu Bu. Nanti kalau misalnya kita perlu diskusi lagi, kita akan hubungi Ibu.

Ibu Ayu : Nggeh. Matur Nuwun.



Pak Sancoko

2014 rumah ibadah perum ykpn, yang terjadi seperti di laporan yang ada, waktu itu sudah clear. Waktu itu saya di sosial budaya, tersangkanya sudah di proses. Lama tidak ada lagi kejadian sampai 2016 2 kejadian 2017 1 kejadian, polanya makin masif pak ketika mendekati pemilu tanggapan bapak bagaimana?

Untuk 2018 ada 6 kasus terkait isu-isu intoleransi agama mulai pembacokan, pengrusakan tempat-tempat ibadah dll. Kalau terkait politik yang awal 2017 itu yang livina yang gereja itu murni mereka kan masuk kategori....politiknya itu tidak ada, soliyono di laporan kita itu murni dari dia. Yang kedua di brebah itu, itu kan terungkap orangnya agak gimna ya, kalau ke arah politik juga belum begitu anu, Cuma kebetulan awal 2018 itu anu ada rentetannya. Mereka beda orang beda aliran. Yang 2017 masalah buku itu sudah didatangi sama ormas islam, di jogja itu kan ada LDII, MPI, FPI dll. LDII yang aktif, ada kegiatan masyarakat yang menjadikan rumah sebagai tempat ibadah tanpa ijin itu didatangi sama kelompok ini, bukan hanya di sleman tapi bantul dan gunkid juga ada.

Yang masalah cetakan banner juga didatangi dan telah selesai secara kekeluargaan bukan pidana. Terus 2018 untuk informasi yang di amplaz itu FJI kan yang melakukan pengecekan disana. Dari FJI sebenarnya tidak apa-apa kalau yang melakukan sama-sama dari yang merayakan natal, kalau umat muslim tidak setuju. Terus solusinya bagaimana pak?, kemrin yang saya baca melalui negosiasi dan mediator, menurut bapak sudah efisien dan efektif atau belum?, menurut saya efektif, karena dengan dipertemukannya kedua belah pihak akan mengadakan negosiasi, jadi mediasi sangat diperlukan. Dulu juga yang masalah gereja itu sering dilakukan negosiasi, mediasi sering ditengahi oleh satpol pp. Pihak polisi menjadi broker sudah sangat efektif untuk mengatasi masalah ini. namun kenapa masalah ini masih memiliki potensi untuk muncul. Sebenarnya menurut saya ini karena orang ketiga, dulu pernah seperti ini, yuk kita lakukan lagi, sebenarnya yang bermasalah sudah selesai karena mungkin kan muncul di medsos nah itu bisa memancing. Orang ketiga itu adalah orang-orang umum, contoh yang di pangkolan itu orang yang nyebarkan lewat mulut ke mulut atau wa, nah itu orang ketiga yang mengkompor-kompri akhirnya masyarakat panas dan berkumpul. Saya kira yang sudah-sudah itu tidak terulang lagi, artinya dari pihak FJI mendatangi, kita himbau jauh-jauh hari, misalnya natal, janganlah melakukan seperti itu, kita adakan himbauan. Menurut bapak apakah masyarakat sleman ini sudah bisa bersikap toleran atau sangat rentan untuk bersikap intoleran?, saya rasa sudah termasuk masyarakat yang toleran, kalau intoleran itu hanya untuk masyarakat tertentu bukan masyarakat luas. Jika melihat kasus penguburan jenazah kemrin yang sempat di gergaji kmrin, dia kan dimakamkan di tempat pemakaman muslim, itu kan termasuk intoleran. Kalau yang itu saya koordinasi dengan dipok dulu.

Disitu kan kmrin ditemukan kotoran manusia, kayu-kayu di bakar, sebelumnya masyarakat melihat ada orang edan, kalau pelaku sebenarnya belum terungkap, apakah itu dilakukan orang gila itu atau bukan, kita belum bisa pastikan. Saya koordinasi dengan polsek dll

Langkah-langkah penanganan kalau di kepolisian itu kan ada tindakan preventif, repressif dan rehabilitatif apakah hal itu sudah dilakukan untuk mengatasi

intoleransi agama?, kalau di sleman sudah dilakukan dalam penanganan kasus intoleran. Secara persuasif kita sudah melibatkan bimas, kabinbabis, polsek mereka kan sering ketemu warga untuk berdiskusi, dari pihak kepolisian sudah melakukan itu, walaupun sudah sampai persuasif tindakan itu karena belum tentu orangnya ketangkap, tapi efek dari itu sudah ada istilahnya, dari bimas ada himbauan, kalau ada orang seperti ini hubungi kami di bimas. Berarti polisi juga sudah berbaur dengan masyarakat. kabim itu membawahi 1 kelurahan 1 orang jadi, setiap kegiatan harus tau duluan karena sudah wajib. Bimas itu adalah fungsi (bimbingan masyarakat), jadi potensi ada masalah langsung terdeteksi sejak dini oleh kabimbabis. Sehingga jika terjadi masalah sudah bisa dicegah dulu sebelum menyebar keluar. Istilahnya ujung tombaknya kepolisian lah. Sama dengan intel juga di polsek itu, harus menguasai seluruh kecamatan. Jadi pencegahannya itu bersifat edukatif, jadi secara bertemu langsung, suatu masalah sudah diredam dulu oleh bimas sehingga tidak jadi masalah meluas. Kalau mempertemukan tokoh masyarakat, tokoh agama apakah sudah pernah dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal intoleransi agama?, setahu saya itu sudah menjadi agendanya bimas juga intel juga, itu FKUB. Nanti yang kabupaten melibatkan pemda, bupati yang memimpin, dari kesbangpol nanti bertemu disitu, nanti setiap tahun ada pertemuan. Terus di polsek juga ada pertemuan seperti itu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten.

Di solo sangat kuat di FKUB-nya sehingga sangat sistematis cara membangun pengetahuan masyarakat terkait intoleransi beragama, disini FKUB-nya yang milik sleman itu cara kerjanya seperti apa?, saya pernah memonitor di ruang rapat bupati sleman, membahas tentang, waktu itu kan ada tokoh-tokoh dari semua agama, pemda, kita kesbangpol. Misalnya di sleman ada hal-hal terkait agama disana sudah langsung dibahas disitu, pencegahannya bagaimana, jadi ada pertemuan tidak harus menunggu kejadian dulu, biasanya sebelum natal dan sebelum ramadhan. Itu sdh rutin. Pernah di grand sarinafidini pernah melibatkan forum banyak di masing-masing umat, jadi kiranya sudah secara rutin, mungkin di solo juga sudah semakin intens.

Kata pak kasat mulai dari 2012-2018 sudah tidak ada lagi kasus, berarti kan sangat bagus penanganannya. Kalau di sleman sendiri, ada inovasi-inovasi tidak pak untuk penanganan kasus intoleransi agama itu?, kalau tertentu saya rasa hanya berkesinambungan saja. Pertemuan rutin antara tokoh, tokoh-tokoh saling kenal dengan situasi tapi yang terjadi di lapangan itu akan berbeda secara spontanitas jika terjadi itu kan dampaknya luas, itu kan harus dari pihak keamanan harus ekstra kerja lagi. Karena yang melakukan belum tentu orang sleman, bisa jadi orang bantul. Saya rasa dari pihak kita saya rasa itu sudah rutin ke kecamatan, ke kelurahan bahkan ada pertemuan setiap minggunya kan berpindah-pindah. Kalau kabupaten itu ada savari sholat jumat, kalau dari pak kapolda itu ada tiap bulan minggu keberapa gitu dijadwalkan nanti pejabat pertama pak kapolda, nanti bergiliran ke sebelas kecamatan, biar saling mengenal masyarakat.

Kasus intoleran beragama bukanlah kasus besar, namun apabila tidak diatasi apakah ini akan bisa mengancam pada pertahanan nasional?. Sebenarnya kecil nanti besar kalau tidak ada yang mengkondisikan akan selesai disitu saja, artinya jika tidak ada yang mengkompori maka tidak akan besar, jika tidak ada yang

membuat hoax dimana-mana, karena perkembangan sosial media. Kalau mengancam negara dalam porsi yang bagaimana kan mas.

Kasus-kasus intoleransi beragama yang terjadi 2014 sampai sekarang kira-kira ada kepentingan elektoral atau kepentingan sepihak saja untuk memainkan isu-isu saja atau bagaimana?. Kalau menurut saya tidak ada, karena kasus-kasus yang ada itu murni dari misalnya kasus gereja rivina itu jihad dia sendiri, pengetahuan islam dia yang mungkin kuat ia ingin jihad disitu. Berarti bisa dikatakan bagi masyarakat yang memiliki paham-paham radikal agama bisa dikatakan sebagai harga diri? Bagi orang-orang tertentu bisa, intinya kalau yang di dina itu kan karangan anyar artinya bukan orang sleman, itu sudah beberapa bulan di sleman ia hidup hanya dengan berjualan hp, lokasi yang ditentukan di tempat lain ternyata.

Kira-kira untuk kasus intoleransi beragama, polisi memerlukan suatu instansi atau lembaga sendiri untuk menangani kasus ini atau cukup di bimas saja?. Kalau itu kita mengedepankan dari kepolisian. Semua ada bagiannya, jadi dari kita intel, dari bimas mengemban tugasnya masing-masing, artinya bimas ikut, pak kapolres mimpin, ditambah dari pemda yaitu satpol pp, istilahnya dari pemda sendiri sudah mengetahui, artinya bukan bimas sendiri.

Berarti suatu lembaga yang memang khusus menangani hal ini tdk penting?. mungkin



KAPOLRES SURAKARTA

Pewawancara : Pandangan Bapak tentang toleransi beragama itu gimana?:

Responden : Sesungguhnya toleransi beragama itu sangat dibutuhkan bagi setiap insan yang berada di atas bumi, dimana saja dan kapan saja, harus, implimentasi itu harus ada dan harus dikembangkan kita pun bersama-sama, khususnya di surakarta. Surakarta ini sesungguhnya merupakan contoh paling toleransi, sebagai contoh ada keberadaan tempat ibadah dua-duanya itu berdampingan. Ini sebagai bentuk simbol itu di jalan Sarakeh sana, jadi ini ada masjid, sebelahnya ini paling ada beberapa meter ada, wah dempel itu, ada masjid ada gereja, paling toleransi semua seluruh ini. Belum pernah ada konflik-konflik agama di situ, tidak ada. Dari perjalanan saya dengan pak mukhtar ini mungkin selama dinas di surakarta ini, belum pernah ada konflik beragama (diamakumpulasem). Itu yang pertama. Namun beberapa perkembangan ke depan, ada beberapa yang mengatakan orang kelompok, sempet akan mengarah ke sana, namun berkat orang kita bersama-sama FKUB bersama stakeholder lainnya, aparat pemerintah dari kementerian agama, selalu kita cegah dengan langkah kongkrit agar tidak erupsi yang mana yang sudah cukup kita bangun bersama secara baik ini yang namanya toleransi. Di sudut banyak dari beberapa aliran agama dari apa itu berbagai anu banyak sekali, ada yang namanya LDI, MPA, Muhammadiyah, NU, kemudian ada dari non-muslim (nasrani, hindu, budha) semua praktis hidup berdampingan secara harmonis.

Pewawancara : Terus gini pak, kemarin saya sempat baca-baca, kira-kira pada tahun 2018 yang lalu salah satu lembaga survei, melakukan survei tentang intoleransi beragama terhadap 94 kota, salah satunya adalah Surakarta. Dan Surakarta masuk di 10 besar kota yang paling intoleran. Kira-kira untuk survei yang mengatakan bahwa solo termasuk kota 10 besar yang intoleran itu gimana?

Responden : klo saya kurang sependapat itu ya! Selama ini ada memang riak-riak yang mengarah ke Intoleransi, namun bisa kita atasi. Saya kok kurang sependapat ya klo 10 besar! 10 besar itu konsekuensinya harus kita anu bersama. Artinya sebagai aparat keamanan tanggung jawab kita cukup besar. Ya tapi yang saya sampaikan tadi itu benar, ada sementara kelompok yang ingin mengarah kesana. Jadi kelompok ini kami adakan penggalan pendekatan bersma stakeholder lainnya, FKUP, peranan FKUP itu kita galakkan. Sehingga apa itu, hal-hal permasalahan yang mau mengarah ke intoleransi itu kita cegah. Karena ini terus terang intoleransi ya! Sumbernya semua dari paham-paham radikal, pertama, yang kurang bisa menerima penderian tempat-tempat ibadah yang bukan pada tempatnya. Semua masalah-masalah itu saja. Tapi emang kalau kita melihat regulasi yang emang salah, tapi sempat kita berikan pemahaman pada masing-masing kedua belah pihak. Jadi semua bisa kita berikan masukan dan pemahaman yuk caranya *seragam* tempat ibadah itu yang boleh dan tidak, begini-begini. Bukannya kita melarang kita ikut campur prinsip anu nggak! Instansi yang di depan adalah FKUB, kita hanya sebatas pengamanan saja

Pewawancara : FKUB sendiri ranah kerjanya, gimana pak?

Responden : FKUB (forum kerukunan umat beragama) itu kantornya di Kesbangpol, dijadikan satu di kesbangpol, itu kita bentuk sudah lama ya! Kita sering didatangi dari berbagai wilayah dari luar provinsi kalimantan, dari sumatera, dari provinsi lain untuk melihat dari dekat bahwa solo kok bisa rukun, bisa anu, karena dia 10 besar itu kan sangat anuh, apa tuh, kan ngak lihat anu sebagai tujuan untuk studi banding, kok bisa, bagaimana cara mengelola cara mengadmistrasi FKUB itu.....

Pewawancara : Owh iya ini juga salah satu dari peneliti dosen UI Jakarta pak, yang melakukan penelitian melihat bahwa katanya solo merupakan salah satu kota yang sangat bisa cepat tersulut masalah intoleransi agama, karena solo itu mempunyai sejarah salah satu gerbong teroris katanya, jadi dikemungkinan besar tersulutnya sangat gampang?

Responden : kalo potensi sih ada yang mengarah ke intoleransi memang ada. Tapi potensi bagaimana kita bisa mengelola potensi yang berada di bawah permukaan tidak sampai muncul ke permukaan. Sehingga kita membutuhkan sinergitas orang dari FKUB tadi, kemudian masyarakat, semuanya dan tokoh-tokoh lainnya, masing-masing bisa memahami. Klo Potensi ya! Potensi yang mengarah ke intoleransi.

Pewawancara : kalo langkah-langkah untuk mencegah itu gimana pak? Itu kan sangat luar biasa pak bisa mencegah kasus yang saya pikir sangat sensitif pada masyarakat beragama.

Responden : iya pertama-tama kita harus mampu memetakan, mengidentifikasi sumber-sumber ancaman yang mengarah ke intoleransi. kemudian dari pemetaan itu nanti kita melakukan analisa dan kegiatan secara konkrit untuk mencegah itu, agar apa itu potensi-potensi itu tidak muncul ke permukaan. Sehingga bisa kita pisah-pilah. Ya bahasanya komunikasi dan kordinasi tadi. Itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus berkordinasi dengan kemenag, FKUB, dengan pemprov, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Jika kalo ada permasalahan yang kecipak iki, menyalahi aturan, aturan yang mana, ini ini, seharusnya, owh iya! Kita komunikasikan, kita kordinasikan, ini tidak boleh, harusnya begini-begini, jadi cepet. Karena sapa ini. permasalahan itu terlantar dan akhirnya eksploitasasi dan diangkat menjadi masalah waduh ini ini. makanya kita harus cegah dini. Cegah dini yang seperti tadi, komunikasi dengan pemerintah lainnya.

Pewawancara : apakah langkah-langkah untuk membangun komunikasi itu Pak mempertemukan kedua belah pihak? Misalnya mediasi.

Responden : iya. Secara formal maupun informal. Ini kan dari FKUB kita dorong untuk memanggil, yang bermasalah siapa, satu sisi. Kemudian ada kepentingan untuk anu siapa saja sehingga kita bisa terorganisir dan cegah dini, kita saling memberikan masukan, berikan audiensi. Sehingga permasalahan tidak bisa berkembang. Yang kedepankan FKUB itu untuk hal kepentingan agama, kita hanya menemani, ya soal keamanannya. Kita komunikasi bangun terus. Sehingga

keliatannya Solo dari luar itu wah kok keren. Lah mungkin panjenengan main-main melihat solo dari dekat, kayak kehidupan siang dan malam, kan bisa merasakan. Pokonya kita hadir mengamankan dan mengkhususkan persoalan dan memfungsikan peran masing-masing.

Pewawancara : terus ini, kalo menurut Bapak ada yang mengatakan bahwa masalah intoleransi beragama itu semakin masif setelah semakin mendekati asa pemilu, isu-isu agama itu dijadikan isu-isu politik sebagai kepentingan elektoral. Apakah itu bener?

Responden : dia itu moment aja. Mumen musiman, kayak musim politik identitas, masalah sara, masalah anu, dll. Kan masyarakat sekarang tuh udah pinter, udah cerdas. Berapa kali solo ini di isukan ini, itu, tapi masyarakat udah dewasa (bahasa jawa). Solo punya riwayat yang kelam, 81, solo kan kelam itu. kemudian kerusuhan 98..... ya itulah masyarakat sendiri akan membendung, akan memagari, akan mengantisipasi. Itu ya memang moment. Kadang-kadang yang memicu ini ya media sosial. Masyarakat yang awam, terutama ucapan saya kita imbangin dengan kontrol opini, kontrol media. Itu langkah-langkah kita, agar bagaimana masyarakat tidak mudah percaya dan termakan isu-isu.

Pewawancara : Jadi di FKUB tadi pak kan sudah sangat bagus ya langkah-langkah penanganannya. Apakah itu sudah di sosialisasikan ke masyarakat? Sehingga masyarakat mempunyai pengetahuan bahwa hal ini salah.

Responden : Ada. FKUB di sini terprogram. SKUB punya program tersendiri. Walaupun tidak ada persoalan program tersendiri. Dari SKUB sebulan sekali ada pertemuan serah keliling. Pertemuan itu memicu pertemuan masyarakat secara bergantian, sehingga masyarakat ow tahu kalo sekarang ada FKUB. Sehingga kalo ada apa kita kedepankan FKUB.

Pewawancara : Dalam pertemuan itu sendiri pak. Siapa yang menghadirinya Pak?

Responden : itu yang ketua FKUB beserta anggotanya kemudian yang bertugas di muspida, kadang-kadang dari polres, kemudian di kodim, kemudian di NU, Muhammadiyah, gereja, saling bertukar pikiran, saling bertukar informasi, ada apa-ada apa. Di FKUB ada islam, kristen katolik, nasrani, konghucu, Buda-hindu. Semua listas agama di situ bergabung

Pewawancara : apakah kalo pertemuannya di gereja. Apakah yang Islam juga hadir dalam pertemuan itu pak?

Responden : dateng sama. Tapi tanpa harus wah aku ini ndak. Ya gitu ajah. Yang siap ikhlas yo ini bukan untuk kepentingan agama kuat atau lemah. Nggak! Ya sama. Saya pernah mendatangi yang hadir juga budha kemudian dari islam juga hadir. di situ forum membicarakan apa permasalahan apa, temuan-

temuan apa yang harus segera di atasi. Biasanya begitu, kemudian pernah di kodim, kita juga datang. Kemudian pernah juga di gereja katolik sehingga praktis temuan-temuan yang mungkin kita belum tahu dari sana dapet informasi itu yang diangkat, segera kita tindak lanjuti. Permasalah itu terus kita monitor terus. Itu cara mengelola dan mengantisipasi informasi itu sampai sekarang.

Pewawancara : terus gimana cara menyikapi pesantren yang pernah punya sejarah terlibat dalam gerakan terorisme, itu kan ada di pesantren apa Pak, di sini Pak?

Responden : kalo penanganan memerlukan area yang khusus, tidak semua orang mampu dan bisa, dan apa itu? ngerti ya. Itu ada petugas sendiri, ada yang nangani. Seperti kita ya! Di intel ini kan ada petugas yang khusus menengani kontra kemudian kita mengadakan, apa nama itu? pendekatan-pendekatan secara personal, secara persuasif dengan kelompok-kelompok napitor terus kita bangun terus, berkesinambungan dengan kita, apa itu! sinergitas dengan



KEPALA DESA

Responden : Tapi ada ada juga dari sekelompok masyarakat itu yang menolak vaksinasi itu to.

Pewawancara : Oh itu itu kenapa ya pak?

Responden : Tidak tahu mereka kan vaksinnya haram atau apa itu loh.

Pewawancara : Kalau boleh tahu kapan aja ya pak? bulan berapa?

Responden : Kalau bulannya Nggak tahu ya.

Pewawancara : Jadi ada yang masyarakat yang menolak ya. Lalu yang menolak itu gimana ya pak? Dia kan bisa dibilang kekebalan tubuh anaknya kurang?

Responden : Iya jelas. Ya tidak tahu versinya mereka itu. Biasanya kan gini ya pak sudah didampingi dari pihak kepolisian juga dari TNI, keliling.

Pewawancara : Sosialisasi ya?

Responden : Tidak, pas mau pencahangan itu kan misalnya orang-orang itu yang menolak. Mereka diberi pemahaman semuanya, entah kenapa tetap menolak. Ada yang tetap menolak.

Pewawancara : Apa yang selama ini polri lakukan selain itu pak? Memberikan pemahaman itu apakah juga sering mendekati mereka dengan menyentuh....?

Responden : Ya jelas kalau Itu sering. Misalnya dhuur seperti sekarang, beliaunya ikut berjamaah di sana. Pendekatan terus pak. Pihak kepolisian juga membantu memberikan bantuan seperti keramik yang memang khusus dari kepolisian.

Pewawancara : Tadi pak Kapolres bilang kalau pihak kepolisian itu juga memberikan shodaqoh tiap hari Senin dan Kamis ya?

Responden : Iya iya lalu dikumpulkan untuk dibagikan. Tiap apel kan kita kadang membagi-bagikan sembako, keliling, atau di masjid Siti khatijah, masjidnya orang-orang seperti itu.

Pewawancara : Tapi apakah mereka sudah menganggap ini polri teman kita, bukan lagi, sudah mulai percaya atau bagaimana?

Responden : Sudah. Soalnya partisipasinya kemarin pas pileg dan pilpres, sudah. Biasanya kan golput terus.

Pewawancara : Berapa tahun mereka sudah golput?

Responden : Sudah lama. Sebelum saya mereka sudah golput. Termasuk juga Pilkada. Tapi setelah kejadian 2016, kejadian, seperti pelatihan teroris, terungkap, lalu di gerebek.

Pewawancara : Nah, ini selain polri kan tadi melakukan langkah-langkah pendekatan! Selain itu ada lagi nggak pak? Mungkin dari pemerintah daerah atau dari pemkab?

Responden : Kalo pemkab belum ada pak. saya sendiri, pemerintah desa, beserta kadus-kadus, misalnya ada bantuan rumah. Ternyata mereka ekonominya juga kurang.

Pewawancara : Owh berarti itu termasuk inisiatif pak kades sendiri ya.

Responden : Termasuk kemarin, mohon maaf, tadinya ikut ke prabowo semuanya, nah saya beri pemahaman seperti ini, langsung pindah semua. Kan kalau di kampung itu jadi di lema pak. Yang ini pilih satu, yang ini pilih no dua. Nanti jadi bersaing kan.

Pewawancara : Tapi itu bukan cuma di desa pak, di Jakarta juga begitu. Satu keluarga itu beda pilihan, konflik pak. Nah ini kan inisiatif Pak Kades, kalau dari yang lain gimana Pak, dinas kesehatan misalkan?

Responden : Dinas Kesehatan kemarin sosialisasi nggih! Pas mengadakan sosialisasi, yang di undang istrinya pemimpin itu. tapi meskipun sudah dikasih pemahaman tetap saja ada yang kolap, tidak mau. Tapi sudah ada juga yang berubah.

Pewawancara : kalau boleh pak kades kasih presentasi yang mulai menerima itu berapa persen pak?

Responden : sekitar 70% mereka mulai berubah. Mereka itu butuh sentuhan, butuh pelayanan juga. Klo memang sudah tidak mau, sekali tidak yang nggak mau.

Pewawancara : itu kalau boleh tahu, dilatar belakangi oleh apa yang Pak?

Responden : Kepercayaan aqidah mereka sendiri. Miskipun Islam kan, tapi aqidahnya berbeda.

Pewawancara : Nah kalau dari TNI pak? Ada support seperti yang dilakukan oleh polri gitu?

Responden : Ya kemarin juga ada. mereka nyamar shalat di situ, berkesinambungan antar kegiatan yang dilakukan oleh polri.

Pewawancara : Dari sisi ini, bagaimana pak kades memperlakukan mereka? Antara yang seperti itu dan yang berubah?

Responden : Kalau saya enggak pilih-pilih, kalau misalnya pastas saya kasih PKH, yang layak sesuai dengan kreteria saya kasih.

Pewawancara : Jadi memang ikut prosedurnya ya?

Responden : Iya. Termasuk kemarin bantuan dana desa lewat masjidnya mereka ini, masjid khadijah. Bahkan mereka tersebut antusias banget. Itu namanya dulu JAT pak. Tapi sekarang sudah berubah menjadi JAS.

Pewawancara : Lalu mereka sendiri berkomunikasi dengan orang sekitar mereka ya Pak?

Responden : Ya pak, berkomunikasi. Tapi yang tidak itu di masalah kebudayaan belum. Misalnya di sini itu ada kegiatan adat seperti wayang, mereka tidak mau iuran. Katanya itu kebudayaan hindu. Kalau diberi makanan oleh orang yang ikut Nyadran itu, dia mau, ini anehnya.

Pewawancara : Nah hal apalagi yang teman-teman kita itu ikutin, kebijakan apa saja yang sudah mereka ikutin sekarang pak? Dari sebelumnya nggak sekarang sudah tidak lagi

Responden : Sekarang itu, partisipasi ke pileg-pilres itu mereka sudah mulai banyak, tapi banyak juga yang keluar gitu aja. Pergi keluar kota gitu aja. Tapi kan nggak semuanya. Kalo yang memang sengaja pergi kota sekitar 35% dari jumlah penduduk 400 jiwa totalnya 4.300

Pewawancara : Ada berapa agama di desa ini pak?

Responden : Mayoritas agama Islam semua.

Pewawancara : Lalu apakah tidak ada kekerasan yang berlatar agama kah di sini Pak?

Responden : Tidak, tidak pernah ada konflik di antara mereka. Kadang-kadang ada yang dari kelompok itu kemarin yang di datangi oleh kelompok NU,

kebetulan lagi membangun masjid, mereka sangat antusias membantu. Toleransi, tidak beda, sama-sama Islam cuma beda aqidah, itu bagus. Yang belum mau berpartisipasi itu Cuma di kegiatan adat desa.

Pewawancara : Kalo sama kegiatan agama yang lain, apakah mereka terusik? Misalkan hari minggu kan yang kristen.

Responden : Di sini kan gerejanya Cuma satu pak, di atas desa Gandurejo ini. Tapi tidak pernah ada konflik kok pak.



KESBANGPOL

Pewawancara : Jadi selama rentang waktu 2014 sampai 2018 tidak ada kasus penolakan, misalnya kayak, penolakan pembangunan rumah ibadah?

Responden : kalo penolakannya sih ada. Tapi tidak sampai ke permukaan, tidak sampai konflik, itu tidak ada. Ya itu tadi. Karena ketika ada hasrat itu langsung yang bersangkutan masing-masing kita undang, kita ajak diskusi, maunya seperti apa sih dan sebagainya. Kita kan sering mengadakan peraturan bersama nggak tahu? Peraturan bersama no. 8 dan 9 dari kemendagri, 2006. Ini kan aturannya seperti ini, di atur pembentukan forum kerukunan umat beragama dari provinsi sampai kabupaten, tugas dan pokok fungsinya ada. Makanya ketika ada konflik-konflik di lapangan, itu musti ini kita kumpulkan, kita ajak bicara dan diskusi sampai mencari solusi yang tepat. Memang dulu ada sampai di geser, karena masyarakat setempat memang sudah tidak mau pembangunan gereja betul. Itu pun bukan karena masalah SARA-nya. Karena penunggunya itu tidak bisa bergaul dengan masyarakat setempat, sehingga masyarakat memberikan penolakan, jadi bukan, saya melihatnya bukan unsur agamanya, tapi personalnya, penunggu gerejanya ngomongnya enggak enak pada masyarakat setempat, artinya masyarakat tersentuh. Nah ini kan bukan masalah agama lagi, bukan masalah sosial lagi. Akhirnya pembangunan gereja di geser ketempat yang lain. Sebenarnya berdiri juga enggak apa-apa.

Pewawancara : jadikan ini Pak apa namanya! Membaca beberapa literatur, solo kan punya sejarah 1981 dan 1998 juga terkait dengan kekerasan, dan menarik juga ketika Pak kapolresta tadi mengatakan bahwa sekarang sudah tidak ada kekerasan itu. Nah yang kita mau gali di sini, langkah-langkah penanganannya, kira-kira ada inovasi apa saja dari FKUB itu sendiri?

Responden : ini tadi. Yang sata ceritakan ini tadi. Mediasi masing-masing pihak.

Pewawancara : jadi sebelumnya belum ada inovasi itu?

Responden : belum ada Pak. Saya ndak tahu persis ketika saya 2014 mulai di sini itu, langkah-langkah yang saya ambil di FKUB. Ya! Mediasi ini. masing-masing yang bersangkutan. Jangankan hanya antar agama, internal agama saja, ada. Sudah pernah kita mediasi. Kristen sama kristen rebutan gereja, ada. Islam dengan Islam konflik. Keras-kerasan pakai horen ada. Itu kita mediasi semuanya. Kericuhan kerukunan di solo seperti itu. Makanya tidak sampai mencuat. Nah sekarang untuk akhir-akhir ini kan peranannya, kendalanya bukan masalah di agama, tapi kan di politik, ya toh klo nuasa-nuansa politik, bukan nuansa agamawi.

Pewawancara : Tapi memakai topeng intoleransi beragama gitu pak ya?

Responden : klo saya tidak mengatakan intoleransi beragam, kayaknya nggak. Tapi sebuah ormas yang berafiliasi suatu agama membawa ke ranah politik. Jadi konfliknya bukan konflik agama. Karena kebetulan yang bergerak adalah orang-orang, salah satu ormas keagamaan.

Pewawancara : berarti bisa dibilang 2014 kemarin itu sudah mulai ada inovasi itu Pak ya. Secara konkrit boleh enggak Pak di paparkan sedikit di era yang disebut inovasi itu selain tadi katakanlah mengandaikan mediasi. Karena zaman soeharto pun orang berbagai pihak itu sudah diadakan konsolidasi, misalkan diskusi. Tetap juga lagi-lagi karena isu politik juga pak dari 97 kan membesar gitu, meledak,

lalu kemudian bapak tadi bilang dari 2014 sudah mulai menurun. Nah kita anu kan tema itu gini pak, tentang inovasi peran Polri dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan toleransi bergama, fokusnya di daerah DIY dan sekitarnya.

Responden : klo inovasinya, misalkan kita wong FKUB, mengadakan dialog agama dengan tokoh agama secara periodik. Jadi saya dalam satu tahun ini ada enam kali kegiatan sifatnya mengadakan dialog dengan tokoh agama. Itu yang kita lakukan. Semua agama yang kita undang, dengan mengangkat sebuah tema tertentu kaitannya dengan toleransi, membangun kerukunan kita adain. Tahun kemarin kita sudah mengundang seluruh guru agama SD se-Surakarta, kurang lebih 125 orang. Semua agama kita undang jadi satu. Kemudian guru SMP. Nah nanti rencana 2019 ini guru SMA. Membangun toleransi gitu biar guru gini sampai ke bawah. Kita bidiknya gurunya tidak aman. Memang ada rencana satu tidak hanya guru agama, nanti juga guru mata pelajaran yang lain. Inovasinya seperti itu. nah yang terakhir kami juga rencana ingin mengundang pelajar-pelajar itu yang berbeda agama bisa bersosialisasi dengan, bagaimana membangun sebuah toleransi atau kerukunan beragama. Dari hal begitu bisa kita antisipasi ya.

Pewawancara : Apakah dalam pelaksanaan inovasi itu mungkin bapak juga terapkan *take an error* gitu. Artinya ketika dia berhasil maka ada semacam defensif, klo nggak ini perlu dikasih pembinaan lagi atau bagaimana? Atau memang.

Responden : memang kita tidak sampai ke monitoring inovasi di lapangan. Enggak. Saya yakin melalui guru-guru itu akhirnya dia dengan sendirinya, dengan metode sendiri kan mengilustrasikan sifat-sifatnya dapat. tidak pernah solo terdengar konflik-konflik antar agama, kan tidak.

Pewawancara : kira-kira kan tolak akur yang menyebutkan bahwa terjadi penyuluhan perilaku intoleransi ini seperti apa Pak?

Responden : tolak ukurkan klo sudah tidak ada konflik kan udah kan berarti iya toh.

Pewawancara : Bapak tadi bilang tidak ada monitoring, kan mungkin saja pak di depan bilang nggak....

Responden : Kalo seperti itu indikatkan gini, klo tidak ada konflik yang tidak muncul ke permukaan berarti kan ini, artinya bukan peristiwa yang membahayakan. Dan sampai saat ini tidak ada laporan-laporan ke kami tentang konflik di sekolah antar agama itu, ndak ada.

Pewawancara : Misalnya begini pak muncul salah satu kemarin, saya tidak tahu apakah dia ikut jaringan siapa? Tapi pernah di laporan kapolri pernah bilang dia jaringan ISIS, itu kan enggak muncul dipermukaan, tapi begitu DAARRR, orang pada tahu. Apakah dampak. Bagaimana menyikapinya itu Pak?

Responden : Klo liatnya tidak seperti itu ya. Memang kita antar permukaan dan bawah sama. Klo aktivitas-aktivitas yang muncul selama ini rata-rata justru orang-orang luar. Orang-orang di luar kota solo misalnya sukoharjo, sragen, karanganyar, dan sekitarnya. Mereka-mereka itu klo demo tidak di depan kantor kementerian itu tidak merasa demo. Makanya gaungnya itu tidak terasa sampai ke nasional. Tapi kita demo di itu gaungnya sampai nasional. Jadi sehingga bukan masyarakat solo itu sendiri. Sekitarnya itu yang membawa. Barangkali ada mahasiswa UMR, mahasiswa UNITRI, rata-rata dari luar semua. Jadi kalo

masyarakat solo sendiri ndak begitu ini. maka sampai saat ini kan bundaran HI-nya masyarakat solo kan bundaran gladak, musti demonya. Supaya menarik perhatian memang harus begitu.

Pewawancara : Permisi pak Teguh dibidang apa ini Pak?

Responden : Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa

Pewawancara : Berarti itu di bawahnya kesbangpol ya Pak?

Responden : Iya di bawahnya kesbangpol

Pewawancara : Ini pak apanya, FKUB sudah punya kegiatan-kegiatan tersendiri. Nah kira-kira kegiatannya di wilayah edukasi itu kan ya pak, kira-kira sampai enggak pada akar rumput?

Responden : Asumsinya sama. Yang pertama itu, kita yang akhir-akhir ini aja merambah ke dunia pendidikan. Sebelumnya kita mengajak tokoh agama, tokoh adat yang kita ajak dialog. Otomatis ini kan sudah dua sisi, tokoh agama, tokoh masyarakat di setiap orang itu kumpulkan. Itu kemudian yang kedua kita dari guru-guru tadi



Kyai badri, pengasuh salah satu pondok pesantren temanggung

“Meneliti suatu tema tentang intoleransi beragama di 3 lokus selman, surakarta dan temanggung. Kenapa di 3 lokus ini, karena menurut data2 polri yang kami dapatkan itu menyebutkan 3 daerah ini mencuat isu itu. Jadi kalau dari sisi akademis itu layak utk diteliti apa yang terjadi sebenarnya, dan yang paling penting memang melihat seperti apa peran seua pihak. Sebelumnya kami sudah dapat data dari polres temanggung”, memang ada gitu kejadian itu, jadi polres kan data di polres itu kan memang yang terjadi, semacam kerusuhan yang sifatnya sara. Ya itudulu ada pembakaran gereja, kemudian ada aoa gitu semacam itu, sehingga dinilai memang rawan, padahal selma masyarakat temanggung itu, masyarakat temanggung murni tidak dipengaruhi dari luar itu ya berjalan apa adanya. Ya kalau yang mencuat sekali, itu ada **pembakaran gereja itu, itu kan ada seorang pastur yang dinilai menghina agama islam. Ya dalam al-qur’an itu ada apa, ya pokoknya orang islam itu pasti masuk neraka jahanam. Kalau orang nasrani dan kristen tidak, nah itu mencuat** (bentuk intoleransi). Akhirnya terus terjadi apalah, suatu gerakan. Kalau memang sara kan masuk pengadilan, setelah sidang lah ini ada dari luar, dari luar itu menyusuk dan memprovokasi. Polisi pun juga terprovokasi, dulu sidang kan diamankan oleh banser, tapi justru banser ini akan di adu domba oleh pihak lain. Akhirnya waktu sidang terakhir bansernya tidak masuk, jadi bansernya yang jadi sasaran, jadi saya juga kan melarang banser pas sidang terakhir jangan berangkat, nanti akan ada kerusuhan. Ternyata betul, dari solo ada 2 truk dari mana gitu, ketika kerusuhan terjadi, ini orang2 itu berlindung di rumah sakit. lah orang kan dibakar gak tau apa2, masak dari pengadilan bakar gereja-bakar gereja. Belum sampai ke gereja, gerejanya sudah terbakar. Itu, jadi ada settingan yang semacam itu, akhirnya itu kan membekas, bahkan jadi kasus internasional. Masyarakat temanggung pada umumnya itu biasa-biasa saja. Kalau tidak ada provokasidari luar itu...ya seumpama ada orang nasrani itu ya yang blok nasrani ya sesuai kehidupannya, yang blok muslim ya sesuai dg kehidupannya. Yang satu desa macem2 ya biasa, gak pernah ada apa2. Hanya ketika ada provokasi dari luar. Sehingga sampai sekarang memang betul itu, ada catatan semacam itu. Ada dasarnya biasanya kan terusik, jadi kalau tidak ada gereja pure secara spradis mendirikan gerja gitu, tidak ada masjid secara sporadis mendirikan masjid. Selama tidak ada itu, itu tidak pernah ada masalah. Coba anda lihat di desa gesing, ya saya lihat di desa gesing itu disini ada gereja besar, disini macem2, bahkan hari raya orang2 nasrani ini biasa berkunjung ke rumahnya, dan nanti kalau pas natalan yang muslim juga gitu, itu aslinya temanggung. Selama tidak ada “keinginan utk bangun satu rumah ibadah” nanti kalau ada pembangunan rumah ibadah itu nanti agak panas, itu aja kalau tidak ditangani secara...sekarang sudah lumayan ada FKUB, layak atau tidak sdh ada FKUB baik bangun masjid atau apa . nah Dulu memang akadang2 gak ada masyarakatnya bangun gereja,gk ada apa2 bangun masjid nah ini yang akhirnya desa tidak bisa tentram. Tapi kalau yang sudah mapan ya tidak ada masalah. Kan Mohon maaf, mohon maaf aja, kan yo juga org islam mayoritas di temanggung kan bukan orang islam yang keras itu, sau dua ada yang keras. sekarang kalau org nasrani, itu kan kalau katolik lebih halus, sementara maaf maaf

yang protestan lebih kasar. Biasanya yang katolik tidak pernah sporadis tapi kalau yang.....tinggal liat kondisinya aja, temanggung aslinya gitu. Saya pernah kemana kemana gitu, ternyata semacam itu ya. Ada satu desa itu di cemoro, disana itu saya kaget, masjidnya dibongkar. Ternyata satu desa kerja bakti agamanya macem2. Sesekalibangun gereja, ya semuanya ikut semua itu. Hanya karena pernah terjadi, mohon maaf yang jadi catatan itu karena ada faktor dari luar. “nuwun sewu itu terjadi tahun berapa ya pak, mulai adanya konflik iu pak, mulai tercuat?” ya kalau sekarang itu hampir,konfliknya itu gak ada, tahunnya iu saya lupa 2000-an. Jadi mohon maaf ya disini, pentapan itu di rowo seneng itu ada pentpan terbesar se asia tenggara. Ya gak pernah disitu ada konflik, gak pernah ada apa2. Hanya sesekali muncul kalau ada peristiwa terus ada org dari luar, nah ini. temanggung itu apapun suhu politik juga gak masalah sebenarnya, tapi kalau ada kepentingan luar yang masuk lah itu terus saya amati sejak partai P3 dulu dari 77 itu sebenarnya tidak ada masalah, tapi ketika terjadi disana, ya masyarakat temanggung, tapi ada org luar.kemudian 82 itu di medono itu sampe geheran sama org golkar itu sana, tapi ada unsur lain dari luar. Temanggung sini pernah ada itu 97 kek P3 ano kendro gtu tapi ada org luar. Jadi temanggung selama tidak terprovokasi dari luar itu tidak ada masalah, tenram. Jadi kalau sampai dikatakan intoleransi saya kira tidak sampai disitu tidak termasuk disitu, tapi peristiwa2 itu yang menjadikan merk. Merk yang muncul, ya saya wajar2 saja. “kalau di temanggung ada berapa pesantren pak?”. Temanggung ya,,,, pesantren kecil2 itu kira2 ada 120-an kecil2 itu, “berkapasitas berapa santri pak?” di temanggung ini ya paling banyak 100rb 200rb paling banyak. “kalau disini?” ini kira2 450. “msh belajar tentang kitab2 turast itu ya pak?” iya masih,kitab lama. “nuwun sewu pak kira2 dari beberapa kitab turast itu, saya juga santri di guluk2 dulunya, jadi kalau di annuqayah dulunya memang ada beberapa kitab yang memang dikaji setiap malam, yang mendorong kita utk bersikap toleran, kalau disini kira2 juga ada? ”. disini kitab2 klasik seperti tafsir2 yasin, kan disitu mengajarkan tolerans, dan hadis2 riyadus sholihen, kalauhikam gaka sampai anak2 sini. Duratus shalihin itu kan di dalamnya banyak mengajarkan tentang toleransi, bahkan sampai diceritakan dalam suatu kitab nazatul majalis tentang org yang dermawan, dicatata disitu ada Qadhi (tokoh agama islam), saya sering ajarkan ini, Qadhi ini ada yang mau minta uang gak dikasih, bahkan kpd org nasrani kok dikasih. akhirnya si Qadhi itu bermimpi org nasrani kok masuk surga, trus loh kamu wong nasrani kok masuk surga,ada apa, ada amal apa. Saya gak punya amal apa, tapi kmrin ada org minta saya kasih 1 dinar, lah padahal minta Qadhi gak dikasih. Ya sudah saya ganti nanti 100 dinar. Sebenarnya ajaran2 tdk sampai begitu. Dulu kadang2 ada gereja berdiri masjid berdiri, nah sekarang ada FKUB sdh aman. Nah iya tidak iu kan tergantung. “kalau masyarakat sekitar sini kan berdampingan ya pak dg masyarakat ini, biasa. Trus ikut kegiatan pesantren ketika ngaji atau ? ” gak gak, ada sendiri, saya buat pengajian sendiri di masjid “setiap malam apa gitu ya pak?”. Ya pokoknya setiap malam beberapa org dtg kesini, tapi utk yang masyarakat saya setiap hari ahad sore “itu dg tausiyah, tahlilan atau gimana pak?”, ya di awali dg tahlilan nanti tausiyah, nah ini kan menyatu, karena pesantren yang bangun kan masyarakat. “sistemnya sama dg annuqayah juga spt itu, para kiyainya juga ada semacam kumpulan ”. dan saya juga org masyarakat terlibat di

pesantren, saya terlibat di masyarakat. itu ada pengajian besok ahad, jadi saya dtg keisni kurang ini kurang ini, kalau tenanganya kurang ya anak santri saya suruh bantu. “kalau dg pihak polri pernah bekerjasama gk pak dg pihak sini?, pihak polri dtg misalnya”. Polsek itu, jadi polsek itu ya datang, biasanya kan polsek itu tdk datang. Setiap th kan pasti minta dtg, pesantren dan,,,ya tidak ada masalah, tiap pergantian kapolrek ya datang kesini perkenalan, kalau di temanggung ya sebenarnya gk ada masalah, toleransi itu cukup disini itu, hanya karena data dari polri begitu, karena disana kan prefentif supaya diantisipasi. Dengan data itu yo dari polri satu langkah2 prefentif. “kalau dari polri sendiri pak, tidak pernah bekerjasama secara program, misalnya mengadakan acara seminar atau sosialisasi dg pesantren terkait intoleransi agama” disini gk pernah, yo karena gak ada masalah kok, yo paling itu kalau polri dg bukan pesantren, di sekolah2 itu kan narkoba, apa gak pernah disini. Sesekali ada seminar yang ttg toleransi dan intoleransi kemarin yang ngadakan kemarin itu malah FKUB yang melibatkan polri dan sebagainya itu. Sebenarnya kalau polrinya ndak, istilahnya wong gk pernah ada kok istilahnya.....”nuwun sewu pak kyai, saya kan punya temen juga di temanggung, sempet cerita2 juga, katanya ada beberapa jaringan kelompok yang mengatasnamakan islam namun sering mengharam-haramkan ritual keislaman baik yang dilakukan Muhammadiyah atau NU, menganggap nyadran masih tergolong eksklusif, itu menurut pak kyai gimana pandangan pak kyai?”. Ya itu kan, nah dulu itu kan Muhammadiyah, tapi lama kelamaan Muhammadiyah di temanggung ini lunak, mohon maaf jenengan di jogja, Muhammadiyah jogja dg solo keras mana?, keras solo. Mislanya kalau Muhammadiyah jogja lunak, nah kalau disini itu, amaliyah2 biasanya temenw yang muhammadiyah itu yang baru2 yang pemuda-pemudanya, tapi kalau yang kalangan tua2 skrg sudha ndak.... yang memang skrg itu genjar yang dari MTA, majelis tafsir al-quran solo itukan punya pemergot beberapa org. Lah ini yang gencar.....bahkan ya pokoknya.....pinggir jalan MTA itu. Kemudian yang afiliasinya ke HQI, ada semacam, yak disini kan ada gerakan pemuda ka'bah, GPK disini ternyata tdk loyal P3-nya tetapi justru loyak ke FPI. Jadi GPK temanggung rata2 pengaruhnya FPI dan FPI nya terpengaruh HTI di temanggung, saya gk bicara di tempat lain. Sampe kmrn pilihan presiden, P3 itu kan pak jokowi tapi GPK nya prabowo, padahal kan GPK dibawah P3. Lah ternyata saya selidiki, GPKnya pengaruhnya FPI, tokoh GPK yang ada di temanggung ternyata juga tokoh FPI, terlibat dalam FPI, kalau ada kegiatan FPI wong GPK..... disini saya amati yang terakhir itu dari MPA, dia punya radio, radionya sampe dimana2, ini dlm ceramahnya sering begitu. Sementara utk yg lain ya apa, sumpama gk matuk ya diam. “katanya, di temanggung ada jaringan ansar tausiyah atau apa?” ansarut taufit itu juga ada, tetapi orgnya, mohon maaf yang ansaruttaufit itu nanti kalo, FPI ya ituuuu ngono lo, ansaruttaufit ya orgnya org itu, saya melihat disini ada, dulu ada org apa gitu ya, yg skrg jadi FPI jawa tengah kan org temanggung, dulu itu juga ikut gerakan apa itu jihad fi sabilillah atau apa gitu, kalo ada yang terjadi itu satu orgnya kadang2 tapibisa kemana2. Kemarin juga polsek menyisir ke desa2 siapa yg ikut 212 dijakarta, itu kan saya amati disini yang perangkat kan org2 GBK dan FPI dan juga sebagian org2 MTA. “mungkin ini yang terakhir pak kyai, saran pak kyai utk mempererat hubungan umat antar agama kira2 seperti apa?”. Menurut saya,

karena memperkuat hubungan ini kan satu daerah dg daerah yg lain itu metodenya beda2, jgn disana diterapkan disini. Kan pernah, disini ada dari kapolri adakan doa bersama, doa bersama jadi yang doa org islam, ganti org bedang itu. Itu banyak yg kritik, mau kumpul mau, mau doa bersama mau, tapi setelah itu, sana yg hindu doanya disana, nah itu di jakarta begitu mungkin gk masalah, tapi disini, ya wong islam dikumpulkan di pendopo, trus stlh acara ceramah macem2, doa nah yang katolik sendiri, sendiri2. Saya pikir setiap ada momen apapun unsur itu terlibat. Kemarin spt mau pemilu itu, pak bupati konsultasi kemana2, pokoknya elemen yg ada di temanggung ini diundang semua, pokoknya deklarasi pemilu damai. Ini ya sudah, ada pengaruh dari luar,. Nah seumpama, kemrin ini, ini dari FPI, gerakan sholat subuh indonesia, ini setelah jadi 1 kelompok, ada ketuanya, mohon kpd masjid ingin sholat subuh berjamaah, trus setelahnya itu ceramah disitu membawa teman2nya itu, saya lihat endingnya itu kampanye 02. Awalnya mengkritik kebijakan pemerintah, saya pikir org ngritik itu kan boleh2 saja. Akhirnya endingnya kok 02, akhirnya banyak masjid yang bersedia akhirnya menolak. Ojo, koe kampanye, istilahnya kampanye yang lain banyak, ya kalau kampanye istilahnya gak usah dibungkus pakek sholat subuh berjamaah,itu ada semacam itu ya. Saya pikir peran pejabat publik ini harus...pokoknya melibatkan elemen yang ada di daerah setempat, apapun.ya tinggalporsinya toh kalau banyak ya banyak, kalau sedikit ya sedikit, Ya barangkali kan gini, disini ada satu desa yang, mohon maaf karena mayoritas tadinya muslim, nah masjid2 itu kan biasa adzan keras, tapi ada satu desa yang mayoritas non muslim, akhirnya ya org islam disitu tau diri, kalau masyarakatnya dengar adzan tdk senang ya terpaksa masjidnya gk pakek....itu tdk benturan, itu yang muslim tau diri, memahami sendiri, tidak pernah terjadi konflik dan sebagainya, tu ada, tapi di kota paraan itu ada, ya ini ada gereja karena semangatnya aja itu dulu, ada masjid, tadinya ada musholla kecil, yor sebelahnya ada tanah pemerintah kosong, dibuat gedung pertemuan. Lama kelamaan gedung pertemuan ini dibuat gereja, ya akhirnya masyarakat diam saja, gak protes gak apa2, tapi begitu ada kesempatan bangun masjid di deket gereja, kalau masyarakat sudah banyak harus jumat, ada tempatnya teko...lah ketika mau diprotes macem2,lah wong jenengan gawe....akhirnya gpp, gawe jare ijine gedung pertemuan kok jadi gereja, ya sdh skrg mushollanya kecil msh jalan, gerejanya jalan. Akhirnya yg gereja kristen jawa deket masjid, pas acara natalan atau apa masjidnya pas ada ceramah pakai pengeras, kan direkam di shooting nah di shooting itu yang masuk suaranya bukan suaranya yg di gereja tapi suaranya yg di masjid, pernah terjadi. Dan sampai skrg tdk pernah terjadi konflik, ya sebenarnya kalau memang itu konflik potensi tapi tdk terjadi karena tdk ada org luar “menurut bapak langkah apa yang harus dilakukan oleh polri sb.....supaya menciptakan iklimnya tetap bagus itu”,**kalau polri iu saya pikir polri punya tugas pengamanan, ya sudah kalau pas ada kegiatan nasrani ya amankanlah nasrani, kalau muslim ya amankan muslim, gk ada masalah kok. Disini polri jaga gereja, wong temanggung gk ada masalah kok. Bahkan nanti jagane ya kadang2 kan mohon maaf ada di polri itu kan juga...nah skrg saya kira banyak di polri disusupi org2 semacam itu, bahkan dulu saya pernah berada oknum polisi itu.....nah itu anggota polri, seng gawe itu malah....(tindakan penanganan polri) ya tapi ini oknum saja**

“tapi langkah2 yang telah dilakukan polri sdh bagus ya pak, mulai dari preentifnya prefentif represif dan rehabilitasi” iya sudah bagus kalau di temanggung ini, saya kira di temanggung kondusif adem ayem kok, hanya saja pernah ada catatan kelam ini karena aprovokator, itu kan ada pembakaran gereja, yang dibakar pintunya saja. Nah itu kan dari pengadilan, wa ada seruan bakar gereja bakar gereja, waaa siapa yang ngajak itu, ketika di depan gereja org2 yang ayo bakar uda gk ada, saya justru pas k RSUD org2 itu masuk RSUD, kayaknya dai solo atau darimana itu. “pak nuwun sewu kemarin kami diajak ke satu desa, itu oleh kepala dusunnya, itu memang ada sekelompok, nama dusunnya gandu rejo. Kepala dusunnya bilang kalau ke atas sedikit itu ada komunitas yang lebih.....tapi memang kami mau bicara dg mereka tapi ia bilang jangan.....karena polri sdh berupaya mnjembatani itu supaya tercipta kondisi yg kondusif, nanti org2 baru dipikir siapa lagi mau merusak”, itu ada kelompok yg beberapa segmen yg ada disana, jadi ada kelompok LDII, ada kelompok apalagi itu, disana mayoritas yg muslim tapi kan kebanyakan tdk menjalankan sholat. Ada org dtg dari mana itu, org itu kerja di jakarta trus buat komunitas itu, dulu LDII. LDII memang sulit toh tidak terbuka, biasanya komunitasnya begitu. Jenengan liat LDII dimana, kalau di temanggung ini ada pusat LDII, di maron itu ada, di ngadirjo itu di sebelah utara paraan itu ada desa dangkel “ada satu kelompok” ini kan LDII emang gitu. Di ngadirjo misalnya satu kelompok gk berhubungan dg yang lain, emang begitu LDII itu tdk bisa berbaur dg yang lain, mohon maaf sentuhan saja mereka basuh. “faksin pada anak mereka juga menolak” oiya, itu kalau salaman mau tapi nanti di basuh. Pernah di temanggung ada seorang pedagang,lah kok uang gk dibasuh itu kan sdh kena saya. Ada masjidnya juga, LDII kan pusatnya di kediri, saya di kediri tau betul. Dulu kan namanya masih islam jawa....kemudian ada kasus yuk pindah lemhari,kemudian ada kasus lagi kemudian jadi LDII sampai sekarang. Saya tau betul itu di jl. Cokroaminoto burengan itu yg pusatnya msh ada tokohnya sentral hasan ubadah, saya kesana masuk kesana, ratusan org ribuan org semuanya diajak jabatan tangan kecuali saya dan teman saya, tau kalau saya bukan anggotanya, gk mau diajak, saya duduk di masjidnya setelah saya pergi di pel, ternyata sampai disinin nah itu betul kalau disana, jangan nanti gak.....gk mau itu satui kelompok org situ pak siapa namanya yg bekerja di jakarta terus buat.....nah ini kadang2 maaf maaf polri itu mengindikasikan apa ini yg ekstrim, padhal saya pikir kadang2 iya kadang2 bukan, “artinya memang mungkin bukan yg radikal juga, tapi kadang2 eksklusif ya”, nek radikalnya,,, saya tak nek prospeknya saya tau, tapi yg jelas itu malah justru kelompoknya bukan ajaran agama tapi bisnis. Saya pikir itu mengelola bisnis besar itu, “yg kelompok LDII itu punya bisnis?” nek yg disini gk tau apa, coba bayangkan itu utk derma kpd lembaga itu 10% keuntungan, bahkan saya pernah ngintip kelompok yg sedang pengajian, ini kalau ngaji ngelempar uang seribu mungkin lima ribu, dia di doktrin makin lama uang yg di lempar itu makin kaya. Saya kan lama di kediri lihat di perak itu dan sebagainya. Nanti kalau yg sdh sadar, sdh habis hartanya, apa jual rumah jual itu sadar. Langkah2 utk polri ini sdh nek d temanggung sdh bagus, memang aslinya temanggung bukan daerah yang intoleransi, walaupun dg keadaan saya melihat disini.....yg tidak mayoritas muslim pun gk pernah ada konflik kok. Yg ada konflik itu malah justru bukan disitu, ya pernah di satu desa itu, karena salahnya

makam, wong makam ki dikei salib, sebenarnya gini aja pak lurah buatlah tempat utk makam yg jangan campur, ya ada disini pengkok buat makam yg bukan non muslim di sebelah sini kiri, yg muslim kanan, dibedakan kan gk masalah. Nah di satu desa katakanlah komunitas ii org non muslim tp dekat menolak, kalau ada suara adzan dibilang kelompok kain kain wong asu saya pikir wong muslim gk jadi masalah, wah geger itu kan, ya jangaan begitu. Kamu pun kalo di depan gereja ada suara itu kadang2.... ya salaing hormati saja, jangan begitu. Saya lihat di desa2 gk pernah ada konflik kalo tdk ada unsur dari luar. Kalau ada unsur dari luar brangkali, mungkin seorang pejabat hati2 disini akan didirikan gereja wahhhh ono wong sing gonggoni ini...tapi kalau masyarakat desa, alhamdulillah sekarang ada FKUB ini gk pernah ada masalah temanggung ini. ada satu desa itu budha semua, tapi yg muslim hanya satu rumah, tapi kaya dia seorang penyanyi perempuan yang cantik, saya tak damel musholla, ya jangan buat musholla di komunitas budha, anak kulo tak damel musholla neng jejer rumah kulo mawon mungkin nek ono wong arek wong lewat gimana saat itu, ya asal yg lain mengijinkan saya sarankan begitu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PAK HAFIDZ (KETUA PKPN)

Bagian 1

- Pak Haifzd** : Diperdalam terkait dengan standar-standar sertifikasi tadi. Karena kalau enggak, nanti akan terjebak lagi, pada soal legalitas formal, yaitu penting kan lulus. Sama dengan misalnya, ya.. temen-temen UGM dan UIN tau itu, proses rekrutmen ASN baik itu dilakukan sekolah maupun perguruan tinggi, dosen maupun non-dosen, ini kan sudah melalui ujian dan pelayanan yang luar biasa kan, ada wawasan kebangsaan dan lain lain. Tetapi kan kelompok-kelompok itu, kan bukan tidak memahami unsur kebangsaan. Standarnya lolos dan akhirnya diterima tapi dalam prakteknya banyak kemudian aparatur sipil yang terindikasi ikut HTI ya kan ada ada. Itu sudah menjadi rahasia umum, gitu loh....
- Pak Raja** : beberapa alasan kerjaan gak ada, Pak?
- Pak Haifzd** : Artinya kan tidak menutup kemungkinan, Dai juga kan seperti itu
- Pak Raja** : Tapi tugas itu kan oleh negara pak ya iya nah kalau polri gimana, Pak?
- Pak Haifzd** : Kalau Polri sendiri, saya kira menterjemahkan itu...mmm...menterjemahkan misalnya yang di divisi moderasi dan kebinekaan ini ke dalam eeh... operasional teknis. Maksudnya, bagaimana kemudian polri dengan keterbatasannya ya ..! kami juga memahami banget pak. Polri..mmm..polri kan bukan superman juga kan iya..! dan mereka juga terbatas dalam banyak hal, personil, maupun anggaran,, gitu kan! Tetapi setidaknya bisa membentuk atau terlibat dalam komunitas komunitas kecil di kampung-kampung yang itu, tentu yang menjadi wilayah binaan mereka. Nah..! selama kalau itu enggak,.. kalau mereka hanya.... berpaku pada juknis dan protab semata, ya repot... atau yang sifatnya kegiatan eksidental juga enggak akan bisa mengantisipasi.
- Pak Raja** : Iya karena polri harus ada tindakan dulu baru dia bisa masuk iya dia hanya bisa prihatin deteksi dini mencegah ini gitu kan tapi di sini tidak bisa involve ketika enggak ada ini action.
- Pak Haifzd** : Artinya harus ada polri, polri harus membentuk semacam, dalam tanda kutip ya..! kepanjangan tangan dari ini.. mmm.. untuk mampu melakukan tindakan sebaliknya melawan potensi-potensi itu, dengan cara-cara yang itu, misalnya dengan melibatkan masyarakat, masyarakat lokal, ya...! bukan hanya sifatnya kampanye tapi terus, artinya kan mereka juga harus perlu berdisiplin.
- Pak Raja** : Yang tadi ya... ketika dia katakan empirik di masyarakat maka dia dia mulai dari tahun oh ini kayaknya bakal radikal nanti mungkin kasih tau... tadi ke panitia rekrutmen... artinya ada sinergi antara mereka...

Pak Haifzd : Iya ..! kalau enggak kayak gitu, kan repot, Polri juga terbatas Pak, kita harus mengakui itu kan!

Pak Raja : Enggak! Yang saya maksudkan gini Pak, memasukkan konsepantisipasi tadi di dalam empat tindakan polri tadi, seperti itu ya! Pre-emptif kan... dia mulai melihat. Nah, tidak masuk di preventif, ketika pencegahan dini, dia kan laporkan, ini kayaknya seperti ini.

Pak Haifzd : Dan nanti begini Pak, karena yang dibutuhkan di daerah saya begini, kan begitu.

Pak Raja : Karena memang ujungnya nanti enggak ikhlas memberikan ceramah kepada masyarakat yang bisa meneduhkan atau sebaliknya..... Udah? Owh ya udah Pak, melimpah banget dari Bapak. Hahaha,, hehehemmm...

Bagian 2

Pak Raja : Kita polresta.. jadi itu... bahkan kami sudah minta data, apakah ada data-data mengenai kasus intoleransi beragama, itu mereka bilang tidak perlu data. Bagi saya itu surprise gitu ya... lalu kami kroscek sama FKUB, FKUB juga bilang sama.

Pak Hafidz : kalau data based saya enggak yakin ya... artinya, kalau misalnya di kepolisian data itu akan diproses kalau sudah mengarah pada sebuah tindakan. Harusnya kan begitu..

Pak Raja : Artinya, kalau ada laporan, berarti tidak ada dilaporkan ya...

Pak Hafidz : iya... Jadi polisi juga nggak akan tau kalau nggak ada laporan. Mereka kan juga nggak bisa mendata, tapi saya yakin, mereka kan ada intelegennya juga to, ada intel... nah itu pasti punya. Tp pasti tidak bisa dipublish.

Pak Raja : Kami sudah kasat intel.

Pak Hafidz : Tp pasti tidak bisa dipublish, karena berdasar dugaan mereka kan..

Pak Raja : betul...

Pak Hafidz : ...analisa mereka. Saya memahami betul, polisi juga serba ada posisi yang dilematis.. dan misalnya kayak aparatur sipil ini tentunya, eeeee... harusnya itu ada kebijakan yang sifatnya yang sifatnya *top down* kan, artinya kan kebijakan di pimpinan polrinya kan... kan mereka aparatur. Artinya, orientasi itu yang kemudian dirumuskan dalam kebijakan pimpinan polri bagaimana mendeteksi, mengantisipasi dan mendokumentasikan eeeee... apa namanya item-item yang terkategori.. mana intoleran, mana radikal.., mana ekstrimis ini kan beda. Pemahaman ini kan... jangan- jangan berbeda dengan kita yang di-NGO.. saya dulu juga di NGO gitu kan... terus kemudian di perguruan tinggi... yang mereka aparatur sipil. Tetapi setidaknya bahwa di kepemimpinan Pak Tito, saya kira ada sedikit perubahan di mana bukan persoalan peson pak Tito-nya ya... tapi di polri secara institusional bahwa disana tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada intoleransi dan radikalisme sebenarnya menjadi satu

prioritas. Kalau njenengan ke kantor polisi dimana pun itu kan ada promotor ... jadikan itu kan ada... saya kira itu satu ... satu terobosan yang cukup bagus di awal, meskipun perlu dioptimalkan. Artinya bagaimana kamudian ini diimplementasikan sampai ditingkat bawah sehingga polri ini juga punya apa namanya ukuran ukuran... yang itu juga sinkron dengan... mmm.. yang di... maksud oleh temen-temen masyarakat sipil tentang apa itu intoleransi, tentang apa itu radikalisme, tentang apa itu ekstrimisme. Ini kan ada tiga hal yang berbeda kan pak sebenarnya ya ... nah, saya kira definisi ini juga yang harus dipahami oleh polri secara institusional, sehingga nanti ketika mereka mendokumentasikan atau merekam sebuah kejadian-kejadian, tidak hanya dari apa yang misalnya langsung tampak dan berdasar laporan. Misalnya kalau bom bunuh diri kan jelas...

Pak Raja : iya...

Pak Hafidz : itu jelas jelas gitu lo... terus kemudian ada pengeroyokan ini kan jelas banget, tapi yang misalnya hate speech dan lain sebagainya kan susah, kalau ini tidak ada... kalau di kitab misalnya... kalau di... itu kan ada semacam juknisnya apa? kan begitu... ya saya kira polri secara institusional perlu duduk bersama dengan masyarakat sipil, perguruan tinggi ... untuk punya semacam kategori-kategori dari tiga hal... kalau enggak nanti ... karena mereka juga kan tidak bisa bertindak di luar kewenangan mereka, karena nanti juga salah (bentuk penanganan dan masalahnya). Misalnya mereka asal ... misalnya ada orang yang kemudian langsung ditindak tanpa ada laporan dan tanpa ada juknis yang rijit.. ini kan repot juga. Di satu sisi dilemanya aparat sipil begitu... eh aparat sipil negara maksudnya ... polisi ... sebenarnya kan untuk melakukan tindakan ini juga di situ. Kemudian, seperti bisa jadi masyarakat... karena soal melanggar kebebasan, dll., tapi kita punya satu pengalaman di IAIN, saya kira temen-temen UGM tahu, karena kita dulu koordinasi dengan temen CRCS juga, pak zen khususnya... mmm ... tahun 2017, ketika kita membedah bukunya pak Haidar Bagir di sini, waktu itu kan sangat mencekam situasinya. Dan memang waktu itu ada teman yang punya jalur lalu minta ke kapolri secara langsung... karena bahkan polres minta agar acara dibatalkan. Kemudian kita bisa usahakan untuk menghubungi Kapolri, kemudian kapolri menghubungi Polda, dan seterusnya... akhirnya mengikuti. Dan, akhirnya acara berjalan meskipun ada demonstrasi gitu lo... ini selalu seperti itu.. sedikit ya kalau kemudian kita bayar bagaimana ... kemudian ini tidak berbelit harus mengajukan surat ke polri misalnya.. padahal kita sudah memberitahukan untuk izin ke sini.. polsek ... polres gitu lo. Bahkan mereka juga menyarankan sebaiknya diganti saja, karena ada tuntutan masyarakat. Pada konteksnya kita bukan persoalan Syiah atau apa?! tapi ini kan konteksnya adalah bedah buku, kultur akademik kalau bahkan

waktu negosiasi dengan kelompok itu, kita udah sampaikan, kalau memang tidak setuju iya silahkan, gelar acara serupa yang menyangkut ini... kan begitu... setara akademis gitu loh pak. Tapi kan, itu tidak diterima oleh mereka, dan demo tetep berjalan, tapi setidaknya aparat sipil negara juga hadir... ya meskipun melalui proses yang cukup njlimet dan cukup tegang. Di sini ada sekitar 1. 250 atau 1. 100 ...

Pak Raja : Peserta? Pendemo?

Pak Hafidz : bukan aparat!!! karena memang langsung dari POLDA.

Pak Raja : Tahun berapa itu, Pak?

Pak Hafidz : 2017! Itu dimuat semua media kok, baik lokal, nasional maupun Internasional. Tempo juga dimuat. Termasuk UGM itu, dilaporkan kebebasan beragama itu, di halaman depan, ada juga. Artinya dari situ, kami merasakan: satu ada apresiasi juga dari polri waktu itu kan... meskipun cukup jelimet... ininya... prosesnya... karena kan kita di satu sisi merasa temen-temen di kampus... e.. pimpinan kan, dalam tanda kutip merasa terintimidasi oleh kelompok itu, mahasiswa juga terintimidasi, merasa! karena kan, memang hal itu muncul di media sosial gitu loh.. ada yang bahasanya... kita masih simpan semua kok! kita diancam mau dibunuh lah, apa lah gitu? Kan?! Temen-temen kan takut! Ya... akhirnya desakan-desakan itu, dengan berbagai cara... ya akhirnya tetep dua-duanya berjalan. Demo silahkan... kan begitu... kita juga sebenarnya enggak masalah, tapi kan ya akhirnya semuanya berjalan, tapi kan itu menjadi catatan kita...

Pak Raja : perlu punya akses gitu ya?

Pak Hafidz : iya gitu loh

Pak Raja : Kalau kita punya akses?! Ya.. lancar...

Pak Hafidz : Kalau pertanyaan besarnya... kemudian bagaimana orang yang enggak punya akses gitu loh? padahal jelas, di setiap kantor polisi hari ini kan, itu salah satu prioritas kerja. Terus katanya banyak juga... dan kita juga mengizinkan mereka masuk, cuma kan masuknya melalui pemeriksaan. Artinya kan... pemeriksaan bukan berarti pemeriksaan ktp lo ya, tapi kan pemeriksaan senjata tajam, benda-benda ini kan... ya mau enggak mau diperiksa! Biar dia semuanya berjalan lancar!

Pak Raja : Artinya dalam hal ini POLRI, dalam kasus itu, berlaku sangat fair gitu ya, mengizinkan ini berlangsung, ini demo, kalau masuk monggo, tapi dengan otaknya mereka gitu ya, tapi itu setelah dari atas dilonceng gitu ya.. Itu kan memang jadi satu... satu ... apa... tindakan... yang.. yang... bisa dibilang, bagi sebagian orang, ya tumbang pilih ininya...

Pak Hafidz : Iya... dan menjadi sangat lambat kan pak?! Nah, kalau.. masak kita membayangkan bagaimana kemudian masyarakat, ya... wong cilik misalnya, seperti saya pribadi yang enggak punya ini itu kan, kayak

orang biasa kan, iya masak nunggu kejadian dulu?! Baru kemudian ini...

Pak Raja : Itu mungkin di dalam POLRI itu ada protipe-nya gini pak, lebih dari mungkin berapa orang itu dia enggak bisa handle.. polsek... dibeberapa... polres enggak bisa... karea harus polda.. polda pun enggak bisa... mungkin di atas seribu mungkin... harus ke KAPOLRI... mungkin begitu.

Pak Hafidz : Nggak... alasannya waktu itu begitu... alasannya pertama bukan itu... ada tekanan, terus kemudian tekanan apa? kan kita waktu itu... ya kan... polisi mengatakan, adanya tekanan yang kemudian minta acara ini dibatalkan. Ok... ini kan akademis! Terus setelah itu alasan diberikan... itu kan berhari-hari, pak! Sampe belasan hari sampai hari H. Kemudian alasan berikutnya, kita enggak punya cukup personil untuk *meback up*, akhirnya kita koordinasi dengan kodim juga kan. Setelah kodim siap, tapi kan koordinator garis komandonya tetep polisi kan! Karena kan bukan tentara kan gitu?! tentara kan cuma *mem-back up* kayak gitu. Nah, mereka masih ini juga... "Pokoknya enggak bisa ini, ini enggak cukup!" segala macem lah.. ya sudah lah akhirnya daripada kita ribet, ya... sekalian lah! Temen-temen berinisiatif, kemudian lapornya... modelnya... di KAPOLRI kan begitu.

Pak Raja : Dalam konteks ini... intoleransi beragama ini... nah... ada tindakan... empat tindakan POLRI, yaitu pre-emptif.. itu dites dini. Lalu kemudian ada preventif, pencegahan dini, gitu kan... Lalu, ada represif, itu tindakan. Dan, rehabilitasi. Jadi empat tindakan ini, e... praktek intoleransi beragama yang terjadi saat ini di surakarta ini... ..beberapa... apakah memang sudah efektif berjalan di... da... dilakukan POLRI? Atau memang seperti apa, Pak?

Pak Hafidz : Mmm... saya kira, kita perlu kembali pada pemahaman definisi temen-temen di POLRI seperti tadi saya sampaikan, karena kan... kadang-kadang ...mmm... info... kita kan enggak tahu ya... enggak tahu detail mekanisme di dalam. Misalnya, kayak pre-emptif deteksi dini mereka itu kan, itu kan, informasi konsumsi internal mereka, intelegen mereka kan. Tetapi kemudian, yang... kalau misalnya... yang di situ itu kan jelas, apa??? bukan destruktif? apa namanya?

Pak Raja : Represif

Pak Hafidz : Represif... tentukan jelas ketika sudah ada...

Pak Raja : iya

Pak Hafidz : ...kejadian. Kan gitu. Terus kemudian rehabilitasi kan juga sudah jelas. Yang saya kira, perlu diduduk bersamakan dengan POLRI itu, bagaimana mereka mendefinisikan... apa namanya... kategori yang kemudian bisa dimasukkan sebagai intoleran atau potensi radikal, ini yang perlu dibicarakan pak...

Pak Munjid, Tokoh Masyarakat akademisi Temanggung

Pandangan bapak bagaimana?

Sebenarnya saya bingung kalau mengatakan ingin melakukan penelitian intoleransi beragama temanggung, karena sebenarnya temanggung sudah intoleran, suatu bukti bahwa suatu keluarga saja itu beda agamanya, dan semua agama ada di dalam keluarga tersebut, hindu buda, islam, kristen, katolik, konghucu, temanggung kebanyakan seperti itu. khususnya di wilayah kandangan dan kaloran, candi rogo dan beijen itu seperti itu kalau disini jarang. Sampai kegiatan beragamanya sehari-hari kerukunannya bagus, sampai meninggal kuburannya pun berjejer-jejer, ada islam, katolik, hindu, budha, konghucu. Kemudian intoleransi yang ada saya belum tau. Kalau selama ini ada kejadian teroris itu hampir 90% itu pendatang dari luar temanggung yang masuk, saya tidak tau apa kepentingannya, apa Karena temanggung itu aslinya adem dan mungkin menurut mereka mudah tersulut, sehingga mereka masuk sini, sehingga memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Mungkin menyulut supaya temanggung menjadi chaos, teroris anak buahnya nurdin entop yang kejadian di makukuwan itu juga bukan orang sini sebetulnya. Kemudian yang tetangga saya sebelum kejadian di kranggan kemarin itu disini, itu memang penangkapannya dramatis, itu memang mbahnya yang orang sini tapi dia kecilnya ngak disini, sejak kecilnya lahir di jakarta, katanya ikut gerakan mujahidin di afganistan, setelah pulang kesini dia sering jamaah sama saya, tapi gak ngerti ternyata dia terlibat jaringan teroris. Akhirnya 2/3 th yang lalu beberapa hari itu ada anak-anak muda ternyata intel disini ya, orangnya muda-muda kalau malam pagi disini di depan rumah saya, ini orang jauh tapi kalau ngomong sebentar-sebenar pak maturnuwun. Ternyata dia intel. Pada akhirnya habis subuh kena disini satu orang yang dianggap teroris. Itu juga lama gak disini sebenarnya. Lah yang kemarin itu orang banjarnegara dia jualan mainan ternyata dia orang luar juga nyewa tempat disini di samping sma muhammadiyah atau apa, itu kejadian terakhir. Maysrarakat disini damai-damai saja di luar agama, kerukunannya bagus, menurut pandangan saya khususnya temanggung.

Sebelum penangkapan apakah ada deteksi dini dari kepolisian, dan apakah polisi sering datang kesini?, iya seperti itu, contoh kejadian yang saya persis alami mas ngapaian disini pinara tau-tau pergi nongkrong disana pakai sepeda motor, ternyata itu lagi ngawasi orang yang dianggap teroris, larinya kemana, tau-tau dia ternyata uda tobat, Cuma pada saat penangkapan setiap tempat sudah ada polisi. Kesehariannya pihak polsek ikut jamaah gk?, polsek sering berbaur di balai desa, sering ikut kegiatan keagamaan. Kemarin katanya dari kapolsek mengadakan kegiatan yang sifatnya humanis, misalnya menyumbang kramik, ikut safari subuh?, saya belum tau kalau masalah itu, karena saya sering ngisi pengajian belum pernah ada polisi yang ikut, Cuma kalau di kepala desa ada.

Cara penanganan dari kepolisian sudah dikategorikan tepat efektif? **Terlalu didramatisir kalau menurut saya** (bentuk penanganan polisi). Satu contoh kejadian, yang paling heboh waktu itu di azzahri daerah beiji geddu. Di atas gunung desa terpencil, masuk dibronjong rumah itu tidak terpencil. Rumah itu dekat bukit tapi tidak sepi banyak yang lewat. Sepertinya antara biaya dengan

anunya tidak seimbang. Masalah itu katanya jaringan teroris dan ngumpet disana, nah dia sudah jadi orang biasa itu tukang nambal ban kemudian pulang ke rumah pak lenya karena pak lenya kepala sekolah mi muhammadiyah, pak zahri, dia tukang ceramah juga, tapi pak zahri tidak tau kalau dia terlibat jaringan teroris. Tapi sekarang rumahnya sudah di perbaiki oleh brimob oleh densus, saya sering kesitu akrab sama yang punya rumah. kemudian waktu di metol kalau di pegang bisa mlayu di pinggir jalan. Yang paling heboh pada saat penagkapannya lupa namanya itu, heboh betul pakai alat pakai alat yang ada monitornya, supaya polisinya tidak kena dulu. Pas kejadian itu yang diduga teroris tidak ada perlawanan?, tidak ada, hampir semua disini tidak ada perlawanan dari dalam tidak ada. Tapi untuk aktor-aktor yang sudah ditangkap itu gimana?, baik orangnya, saya kadang ngimami kadang dia yang ngimami, tapi saya gak ngerti kalau dia teroris. Eh tau-tau ditangkap. Kalau disini gak pakai penembakan, ditarik seret untalke mobil, sebagai orang sipil itu tidak baik. Sebagai akademisi, cara paling benar adalah pembinaan, penyuluhan pengetahuan, mereka dikumpulkan dijelaskan agama itu seperti agama, agama itu kan tidak ekstrim rahmatan lil alamain. Kebanyakan dari mereka yang ikut adalah mereka-mereka yang agamanya lemah, terpinggirkan. Tapi mereka yang agama-agamanyanya bagus kan mudah, misalnya saya orang NU, saya kan tau kalau ada NU itu ada NU fanatik, tapi kalau NU fanatik pun dijelaskan itu selesai. mereka kan tidak punya pimpinan seperti NU atau muhammadiyah, mereka punya jaringan sendiri. jadi ya eksis seperti itu wajar, memang sudut pandang mereka dengan kita beda. Selama ini polri punya beberapa fungsi untuk menanganai kasus (prefentif represif dan rehabilitas) menurut bapak kira-kira yang dilakukan polsek sudah memenuhi ngak terhadap fungsi itu, khusus intoleran?, saya tidak tau persis karena saya tidak pernah gabung dengan kegiatan mereka. Mungkin mereka punya kegiatan seperti itu dengan sisi yang berbeda, tapi mungkin mereka tidak sama dengan FKUB atau dengan organisasi-organisasi masyarakat dan agama, karena saya orang akademis sehingga tidak terlalu menanganai masalah itu. Tapi mungkin polisi dengan MUI, oncor, ibnu, dll melalui pembinaan. Tapi mungkin orang-orang seperti itu yang ngundang polisi mereka tidak mau, kalau tokoh agama pasti mau, karena mereka kan pendidikannya memang militer, militer afganistan. Kemrin kita ngobrol sama pak kasat intel cara mengatasi intolereansi adalah dengan berbaur dengan masalah tapi tidak secara gamblang bahwa itu adalah proses edukasi untuk membangun pengetahuan masyarakat, Cuma ikut bergabung berjamaah menyumbang kramik, itu menurut bapak sudah bisa dikatakan sebagai langkah konkrit efektif gk?, itu belum, bagus tapi tidak, gimana ini masalah ideologi amalan agamis ya. Tapi blum begitu pas, paling baik itu menyadarkan secara pribadi, seperti itu, tapi polisi punya hubungan itu baik-baik saja, tapi terkait intoleransi itu kurang pas. Karena mereka merasa paling benar (setiap org beragama). Tapi masuk tapi belum berguna karena masalahnya ideologi. Kalau polsek disini bersinergi tidak dengan FKUB?, pernah mengadakan kegiatan secara periodik bersama?, saya tidak tau tapi sepertinya tidak ada. Saya gak bisa jawab tapi kata pak jum ada. Pendektan personal kelompok. Berarti dengan membangun pengetahuan masyarakat itu pak, kalau sumbangan-sumbangan itu hanya

hubungan baik polisi dengan masyarakat secara umum. Masyarakat kita ini kan menganggap polisi citranya masih kurang, sekalipun pemerintahan jokowi citra polisi mulai dibangkitkan. Seperti tidak ada polisi dipertigaan lampu merah, rasa takut masyarakat terhadap polisi masih sangat kuat, ya ujung-ujungnya duit. Itu sih karena oknum-oknum yang keji-keji itu, ini bayar, ini bayar, data-data orang diperulit, yang bener salah yang salah bener. Karena orang penelitian di masyarakat dan di kepolisian itu beda, orang anteknya aja beda, tangkep polisinya sulit kalau tidak ada buktinya. Pembinaan peyuluhan jelaskan masalah agama sadarkan masalah kebinnekaan sadarkan masalah negara, sistem ketatanegaraan jelaskan, agama-agama yang seperti itu kan sering terjadi chaos, negara lainnya kan perang saudara trus. Wong indonesia ini tanpa agama aja rukun, wong jawa ki gampang rukun, wong punya norma kok. Ada rasa terpanggil jihad di jalan allah ini malah isis di afganistan ya allah.

Pak raja: Pertama, pak ketua FKUB menjelaskan beberapa agama dan masalahnya, dari tahun berapa peristiwa-peristiwa tadi, apakah itu dalam lingkup 5 th terakhir atau kumpulan FKUB?, ya itu kumpulan 5 tahun yang lalu, di data mulai 2011. 2 th yang lalu ada penangkapan disini, yang disana 1 th yang lalu, nah ini belum ada lagi kejadian, kalau data lengkap tahunnya pak jun lebih tau kalau saya kira-kira saja. Kalau pak kyai itu ponaan saya itu lebih anu. Dari pesantren ada pembinaan sendiri gak?, hampir semua pesantren mengadakan kegiatan, masyarakat ikut misal ritual tahlil bersama pengajian jamaah di masjid hampir setiap hari. Berarti pesantren sendiri sudah bisa dikatakan berkontribusi dalam membangun pengetahuan masyarakat. kalau dipengajian itu ada literatur toleransi?, oo ada mas pesantren saya juga ada, nu muhammadiyah ada, muhammadiyah dan nu bareng minta tolong banser untuk penjagaan. Di ceramah-ceramah?, tentang islam-islam garis keras itu di pesantren. Hati-hati dengan ajaran-ajaran baru yang tidak tau hukum-hukumnya, yang tidak mau binneka tunggal ika, yang tidak mau menghormati. Kyai anyaran, maunya Cuma ngajingaji tok. Saya walaupun tidak sependai mereka saya kan orang pesantren saya tau persis kui salah ya ngerti, itu bukan orang agama sebenarnya cuma tau masalah agama, ya saya tau. Ngomongnya pinter saya tau kalau agama mereka tidak sampai di hati.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pak Raja : Selamat pagi pak waskito, mohon maaf, terkait dengan peristiwa, katakanlah, isu nyata adalah pelarangan pendirian tempat ibadah, begitu pak ya? atau boleh bapak ceritakan apa yang menjadi masalah di dalam konteks intoleransi yang dialami oleh jemaat?

Pak Waskito : Jadi ini adalah bakal jemaat GKI, bakal jemaat itu berarti cabang, karena perkembangan, karena pemekaran dari GKI-GKI yang ada di kota Solo seperti GKI Sangdra, Sayudan, Nusukan, Sorogenen. Anggota-anggotanya yang secara natural itu, akhirnya tinggal di perumahan Mojosongo ikut pemekaran kota. Akhirnya mengalami kesulitan untuk beribadah di gereja induknya, karena faktor jarak. Nah akhirnya terbentuklah sebuah bakal persekutuan yang disebut sebagai pos-pos kebaktian. Itu terdiri kurang lebih 24 tahun yang lalu. Nah setelah beberapa kali mengusahakan untuk mencari tempat ibadah, kami mengalami kesulitan maka akhirnya kami menyewa beberapa lokasi dan berpindah-pindah dan hingga akhirnya tahun 2009 itu kami mendapat informasi tentang tanah yang dijual

Pak Raja : oke

Pak Waskito : Nah tanah itu adalah tanah sawah, lokasinya di depan kuburan. Jadi nih,, hahahah. Kemudian setelah negosiasi, akhirnya sang pemilik tanah sungguh amat terbuka. Pak Atmo memperkenalkan, 'Ini tanah saya sedemikian rupa, total sekian dua ribuan miter yang saya mau berikan ke anak saya. Tetapi ini terlalu lebar, anak saya juga enggak akan mampu mengelola. Maka biar anak saya mengambil jatahnya. Lalu yang lain saya jual.' nanti dibagi-bagi ke anaknya juga. Nah maka anaknya mengambil jatah yang dia mau itu di bengkel sebelahnya

Pak Raja : oke oke iya

Pak Waskito : Dulu ini semua sawah. Jadi ketika kami tanya ke tetangga-tetangga, tetangga memperbolehkan saja, akan mendukung. Karena rupanya, pak Atmo juga sesepuh di lingkungan sini. Tetangga-tetangga itu malah masih anggota keluarganya, terkait sanak famili yang bebas. Nah setelah proses jual beli itu selesai, maka kami mengajukan surat izin untuk membangun ibadah, membangun tempat ibadah dan disetujui oleh pemerintah kota. Sehingga keluarlah IMB. Saat mau mulai membangun, kami mengundang Walikota, pak Budi untuk meresmikan peletakan batu pertama, dan beliau sudah meresmikan. Saya agak lupa tanggalnya... mmm... ya! nanti kita lihat datanya ya. Nah lalu berlangsung lah pembangunan, hingga tahun 2012 pembangunan ini selesai. Kami berencana... mmm... dengan selesainya pembangunan ini di bulan Oktober, nanti Desember kami akan gunakan sebagai tempat natalan pertama. Kami sudah rencanakan nanti awal atau pertengahan Desember. Kami sekali lagi mengundang pak Walikota untuk meresmikan. Nah tetapi tanggal 28 November, hari Jumat, kami tidak menyangka...

Pak Raja : Tahun 2009?

Pak Waskito : 2012. Ya. kami tidak menyangka kalau rupanya... eeh... kami di demo, mendapat kunjungan demonstrasi. Karena ini kompleks enggak ada yang tinggal. Pendemo ya... cuman di depan aja. Dan kami tidak ada yang di sini. Tapi karena tetangga-tetangga yang baik, ibu Harnani rumahnya di kampung seberang sana.

Pak Raja : oke

Pak Waskito : pak Widodo di jalan jalur jaya dan beberapa orang jemaat memang lokasinya di sekitar sini, maka kita kenal di kota “eh gerejamu kene di demo,” maka ya sudah ya! kami ketawa aja, kami perlu datang, ndak usah. Tapi ketika itu demonstran datang memasang spanduk-spanduk, yang tidak bisa kita berikan. Lalu rupanya difasilitasi oleh pemerintah untuk diadakan dialog. Maka kami diundang untuk berdialog di kantor kelurahan siang itu. Demonstrasi terjadi setelah sholat jumat, kurang lebih ya jam 2-an, ada dialog di kantor kelurahan Mojosongo. Saya kebetulan ada tugas di kartasura jadi tidak bisa hadir, yang hadir dalam acara itu adalah Ibu Harni, Pak Sufyan (Alm) beliau sudah meninggal, pak Widodo atau pak kunjanto, kalau tidak salah, juga hadir. Nah yang intinya bahwa pendemo menyatakan keberatan kalau tempat ini digunakan. Padahal tempat ini sudah ada IMB-nya resmi, dan sudah dibangun, selesai. Jadi kalau IMB tidak kita lakukan justru malah melanggar hukum. Izinnya sudah ada, hanya tinggal dipakai saja. Nah berarti sebetulnya kan demonstrasi ini terlambat. Jadi kalo mau demo seharusnya dari kemarin-kemarin. Tapi kami diem-diem aja. Ya intinya kelompok tersebut rupanya menyatakan “saya warga busukan keberatan di sini ada gereja”. Padahal sebelum ada IMB secara jalan kami harus minta dukungan masyarakat sekitar dan seluruh kompleks mendukung. Jumlah resmi dari seluruh persyaratan yaitu, anggota, pengguna, jumlahnya sekian, itu semua juga sudah terpenuhi semua. Rupanya mereka minta banding dan difasilitasi oleh pemerintah kita. Ada berkali-kali pertemuan hingga akhirnya sampe tahun 2014 sampai 2015. Ya berkali-kali negosiasi. Tapi akhirnya di tahun 2015 karena perkampungan kita, semuanya kembali berjalan lancar, mungkin itu memang iklim yang tidak mudah, yang diakibatkan oleh iklim nasional seperti pemilihan gubernur DKI juga berpengaruh, lalu pemilihan wali kota itu juga salah satu pengaruh. Sehingga waktu itu mediasi pemerintah kota, kami rasa sih eh.....!!! ya, hanya sekadar ngomonglah membuat situasi kondusif. Sebenarnya kami menghayati bahwa kenapa kami masih akhirnya bisa pakai gedung ini yaitu sebab berkat tuhan saja. Sebab timing yang tepat, di timing yang singkat tuhan berikan informasi dan kami tindak lanjuti yaitu ketika pemimpin demonstrasi menyatakan diri bahwa saya dari laskar umat islam solo (LUIS) ditangkap dan suatu kasus kerusuhan kafe sosial kemudian wah ini kesempatan. Jadi kalau provokatornya sudah tertangkap karena kasus yang berbeda ini tidak ada penggerakannya apa-apa. Kita ajukan peresmian untuk segera diresmikan oleh wali kota yang kebetulan baru, yang terpilih lagi adalah Bapak Rudi. Bapak Rudi menyetujui segera dilaksanakan mendadak dalam persiapan yang hanya kurang lebih seminggu/sepuluh hari, maka tanggal 17 Februari 2015. Iya itu kira kira walaupun juga diresmikan dengan disertai demonstrasi juga. Tapi kan kegiatan ini legal, ada dasar hukumnya. Tapi ini sebuah kesempatan emangnya, ya sudah kita ambil sisi positif saja.

Pak Raja : nah yang menarik pak saya dapat info tuh, mmh.. awalnya katanya tempat ini tuh sebenarnya usaha, buat usaha, katanya sih, informasinya begitu. Lalu kemudian mau dipake untuk tempat beribadah. Itu yang menjadi keberatan warga. Nah bapak melihat ini apakah memang ini real seperti itu atau seperti apa?

Pak Waskito : kalau di sawah atau kalau berladang itu dianggap sebagai sebuah tempat usaha ya bagaimana? Ini kami belinya sama... hahahahaha

Pak Raja : Nah menurut pak Waskito sebenarnya apa Pak yang, yang menurut bapak nih setelah berdiri selama tiga tahun itu ada kemudian diskusi dan negosiasi gitu. Apa sih sebenarnya yang bapak rasakan yang jadi masalah poin pentingnya apa sih Pak?

Pak Waskito : Jadi kalau mau ngomong soal keberatan kita, berbagai macam bentuk alasan bisa diungkapkan termasuk ini dulu tempat usaha dan apa pun bisa dianggap sebagai tempat usaha misalnya dulunya rumah itu juga bisa jadi usaha besar

Pak Raja : iya betul

Pak Waskito : tapi yang penting tempat ini tanah belum ada bangunannya sama sekali termasuk di samping samping semua. Dan dalam proses yang berlangsung ingin melihat eh bahwa tidak ada kepentingan tertentu yang ingin diungkap dengan menggunakan kasus gedung gereja, menurut saya. Karena timing nya, timing di jalan menjelang pemilihan walikota mmm menurut saya. Dan setelah itu diskusi di Pemkot tidak sekenceng seperti waktu diawal, tidak sekenceng sewaktu pasca pemilihan walikota

Pak Raja : Tapi bukan, bukan LUIS yang hadir kan?

Pak Waskito : Yang hadir adalah LUIS

Pak Raja : Luis yang hadir? Di ini waktu berunding

Pak Waskito : Iya. Bukan warga

Pak Raja : Bukan warga sekitar, tapi dia mengatasnamakan dia adalah warga Busukan?

Pak Waskito : Bukan. Nah tetapi kalau seorang warga anggota LUIS yang, kalau tinggal di dekat Busukan ada kami kenal orangnya namanya (s) inisialnya. Ia tinggalnya di jalan Jaya wijaya

Pak Raja : Nggeh

Pak Waskito : Jalan Jaya wijaya itu, perempatan Indomaret itu kan masih termasuk Busukan. Kampung atau Desa Busukan. Dia mungkin bisa saja mengatasnamakan Busukan. Tapi dalam lingkup RT/RW kami tidak ada keberatan.

Pak Raja : Tidak ada yang keberatan. Emmm. Waktu peristiwa terjadi Pak, seperti apa ni? Pak, Pak Waskito ada ya Pak ya?

Pak Waskito : Saya ada. Walaupun pas demonstrasi saya tidak....

Pak Raja : Tapi artinya bapak sudah bertugas di sini?

Pak Waskito : Saya adalah pendeta jemaah di Nusukan

Pak Raja : Owh oke.....

Pak Waskito : Karena ini adalah anak, jadi di sini nggak ada pendetanya saya hanya bertugas di sini beberapa waktu tidak mesti setiap hari

Pak Raja : Saat ini siapa pak yang jadi tukang khotbah itu

Pak Waskito : Yang Khotbah Pak Antun Gerundeng, dari GKI Nusukan.

Pak Raja : oooooh yang di warta ya

Pak Waskito : iya

Pak Raja : kami tadi ke situ pak makanya wa ini bekas kemarin iya gitu

Pak Waskito : Jadi memang GKI adalah gereja yang sistemnya memang semuanya adalah anggota, semuanya adalah keluarga. Apapun GKI-nya semuanya keluarga besar GKI yang saling melayani gitu enggak ada rebut-rebutan kalau

seperti didominasi gereja lain kan ada yang gitu ya? Walaupun namanya sama tapi rebut-rebutan.

Pak Raja : yang saya mau tanyakan apa atau selama peristiwa tiga tahun itu bapak melihat adakah peran Polri ?

Pak Waskito : Owh ada. Tentu besar?

Pak Raja : seperti apa itu pak?

Pak Waskito : Kami melaporkan tentang kondisi kami eh bahwa, apa namanya? Kami membutuhkan bantuan dan sebagainya. Ketika kami dimediasi di balai kota polri juga hadir di sana untuk menengai lalu ketika kami dapat informasi tentang, tentang ditangkapnya penggerak ini, kami juga dapat dari polri. Dan kami segera rapat, segera berkoordinasi mohon polri untuk mengadakan pengamanan berkaitan dengan peresmian anggota kami. Kebetulan juga kami segera ajukan ke walikota, pak walikota juga menginstruksikan ke kapolsek.

Pak Raja : jadi sejak awal polri hadir gitu ya? apa ya? menjaga gitu ya? Menjaga gitu oke.

Pak Waskito : ya memang ketika peletakan batu pertama.. hmmm. Kehadiran polri untuk menjaga situasi yang aman, itu ya, hanya datang beberapa orang, memang standarnya demikian. Tidak ada hal yang krusial. Tapi ketika ada masalah yang benar-benar krusial, polri hadir dengan kekuatan yang lebih.

Pak Raja : mmm artinya mereka juga sebenarnya sudah baca ya?

Pak Waskito : ya

Pak Raja : ini artinya kalau ini ya ini bakal

Pak Waskito : Termasuk kami dapat informasi juga yang berikutnya selain dari tetangga, juga dari polri juga “Ini loh tempatmu mau di demo,” mmm sehari atau semalam sebelum acara hari jumat siang itu didemo kami sudah tahu

Pak Raja : Oh jadi artinya polri sudah lakukan tugas preventif ya?

Pak Waskito : Iya

Pak Raja : Pencegahan dulu ya?

Pak Waskito : lalu kami tanya kami harus hadir pak? “Enggak usah hadir Pak”. Bu siap siap aja nanti kalau dapat undangan dari kelurahan. Jadi kami sudah siap datang dari kelurahan, kira-kira demikian.

Pak Raja : begitu. nah dari konteks kemudian eh ada gesekan enggak sih pak sebelumnya pak? jadi ada satu penelitian pak menyebut begini ya! Di Solo itu sering kali pakai isu agama tapi sebenarnya bukan itu substansi permasalahannya. Jadi hasil penelitiannya menyebutkan sebenarnya masalah yang paling substansi setelah itu adalah masalah ekonomi, bagaimana menurut Bapak? Apakah memang matching dengan apa yang bapak alami atau bagaimana?

Pak Waskito : kalau pengalaman saya. Saya ndak berani mengkaitkan dengan itu karena saya ndak mengalami pengamatan berkaitan dengan itu. Cuman saya hanya berpikir sendiri bahwa momen itu kok berdekatan dengan pemilihan walikota. jadi sangat dekat.

Pak Raja : jadi arahnya bahkan dicoba kedua titik itu ya! mmm politis dan agama ya? K

Pak Waskito : Kalau tentang ekonomi saya ndak lihat, secara pribadi saya enggak lihat kaitannya, atau mungkin misalnya untuk demonstrasi-demonstrasi itu

didanai, tapi saya gak tau, heeh.. seperti apa sebetulnya, enggak..enggak liat gimana.

Pak Raja : ohhh gitu ya nah. bagaimana pak respon daripada petinggi GKI yang lain Pak? Mungkin se solo, se jawa tengah.

Pak Waskito : Kami wartakan kondisi ini kepada persekutuan se- istilahnya namanya Plases. GKI se-daerah Solo. Kami nggak ada bukti ya...! Ya udah kami dukung dalam doa dan kami dampingi jikalau ada kebutuhan pendampingan advokasi. Tapi kami nyatakan owh belum, kalo butuh ayo segera kami beri dukungan yaitu dukungan dari plades.

Pak Rajan : Nah Pak selama 2012, 28 November sampe dengan 17 Mei 2015 kurang lebih gitu ya? Katakanlah gitu ya! itu dua setenga tahun ya.

Pak Waskito : Ya

Pak Raja : nah itu ke mana nih gereja, jemaat ini beribadah? apakah memang tetap bisa pakai tempat ini atau?

Pak Waskito : Owh endak, kami menyewa.

Pak Raja : ini tutup berarti, padahal sudah ada gedung bangunan seperti ini? sudah siap pakai.

Pak Waskito : bahkan di hari kamis, di hari-hari tertentu kami membersihkan gedung aja mereka memantau, si (S) itu yang dari pojok kecamatan itu memantau terus, orang kumpul apa? untuk apa? ketika kami kerja bakti beberapa kali untuk pembersihan aja, demo juga. Aduuhhh.

Pak Raja : semangat demonya terus terjaga berarti?

Pak Waskito : Semangat demonya itu muncul lagi padahal sudah diem gitu

Pak Raja : sampe akhirnya... artinya tidak pernah pakai ini? Gedung Jemaat ini?

Pak Waskito : selama itu kami tidak menggunakan

Pak Raja : baru dipake lagi 15 Mei itu pada waktu peresmian. nah artinya waktu negosiasi dengan masyarakat apakah ada pihak-pihak juga memberikan sesuatu ya! itulah seperti apa? supaya kita bisa tetap. Ya! artinya negosiasi seperti apa sih yang bapak lakukan, apakah ngobrol karena.....

Pak Waskito : Kami adakan negosiasi formal dengan sekretaris LUIS. Ya! mau sebut nama boleh nanti atau enggak?

Pak Raja : Boleh. Kita nggak sebut nama di sini kok.

Pak Waskito : Pak Hendro dan yang tadi yang dipojokan, pak soeparno. Pak Hendro adalah sekretaris LUIS.

Pak Raja : tapi bukan warga sini?

Pak Waskito : bukan warga sini. nah pak hendro itu kami negosiasi sebenarnya ada beberapa atau sebenarnya yang menjadi tuntutan ada apa? Lalu soeparno menyatakan "Gedung gereja kok! geles gede. Lekas jadi... besar lagi. Ini kami masjid sedang membutuhkan dana." Oke.. kalau demikian maka kami akan bantu. Tapi tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, kami belanjakan. Oke.. tersedia. Nah tetapi dalam waktu merealisasikan itu dapat info lagi jangan bentuk barang. Oke kami berikan uang. Tapi nggak berapa lama, mungkin ada kaitannya dengan pemanggilan dari pemkot. Tapi uangnya dikembalikan lagi. "kamu kemarin minta bantuan untuk membangun, kami membantu semen dan keramik yang disesuaikan dengan bentuk yang sudah dipasang. Ndak mau. Ganti uang. Oke.. kami kasih turuti. Ya! Dikembalikan lagi. Terus nek opo?" hahahaha

Pak Raja : jadi atas anggaran dari pemkot?

Pak Waskito : kan ada mediasi formal dengan pemkot namun juga kami lakukan...

Pak Raja : informal?

Pak Waskito : he'eeh. kontak secara informal.

Pak Raja : artinya informal ini diketahui pemkot donk?

Pak Waskito : iya sebenarnya

Pak Raja : atau hadir di pemkot di situ? Enggak? atau dua pihak ini aja? Atau ada intelnya pemkot yang hadir?

Pak Waskito : tidak ada orang pemkot.

Pak Raja : oh berarti, artinya ada dari dua pihak ini yang membocorkan ke pemkot? gitu kira kira?

Pak Waskito : ya mungkin siapa tahu.

Pak Raja : oke, oke... akhirnya kan pemkot bilang, "Jangan terima dong, kamu kan...!" gitu kira kira ya? Lalu dikembalikan uangnya. Oke.

Pak Waskito : jadi, mmm... kaitannya dengan motif ekonomi itu, ya... bisa jadi ya? tapi malu-malu mau. tapi akhirnya mereka tolak juga. Ya! Silahkan. Dan mereka isinya, "Kami betul ini. Butuh gitu kok. kamu kedung gerejanya gede, cepet." maka kami tidak mengkaitkan dengan itu.

Pak Raja : nah ini menarik pak! Menarik bahwa tadi bilang... eh... mereka kemudian dipanggil oleh pemkot, lalu mereka kembalikan dananya itu. Itu bapak pernah tanya enggak ke Pemkot, sebenarnya apa sih masalah kok kemudian.....! artinya gini kok anda mencampuri urusan kami yang informal nih ? Pernah enggak Pak. Bapak dapat bocoran dari Pemkot, sebenarnya apa sih?

Pak Waskito : hmmm.. Pemkot dalam hal ini sebagai khalifah. Ada lagi kesbangpol. Si kepala kesbangpol ini menurut saya tidak berani mengambil keputusan sebagai aparat. Sebagai aparat negara yang mengayomi warga secara netral. Karena apa kata pendemo itu yang menurut kami cemburu. Dan tidak berani mengambil keputusan tegas sebagai penengah, ini yang adil, ini yang tidak. Termasuk ketika banyak bukti sudah diajukan dan sudah nyata-nyata jelas, kami tidak bersalah, baik bukti yang kami ajukan. Sebenarnya kan ini masalah, bukan masalah kami ya. Ini masalah antara pendemo dengan pemkot.

Pak Raja : Karena apa?

Pak Waskito : karena kan ini masalah IMB.

Pak Raja : oke oke

Pak Waskito : ya kalau IMB kan yang ngeluarin Pemkot.

Pak Raja : artinya mereka tidak keluarin IMB? artinya mereka membangun ini.....

Pak Waskito : Bangunan ini sesuai dengan IMB

Pak Raja : ke mesjid juga?

Pak Waskito : Mereka keluarin IMB untuk pembangunan gedung ini

Pak Raja : Nggehh

Pak Waskito : Tapi terus kemudian mereka demo. Jadi yang salah siapa? Yang salah gereja, apa pemerintah? Harusnya kan ini masalah pemerintah. Kami, kami luruskan permasalahan ini demikian..

Pak Raja : ya ya

Pak Waskito : Dan kami oke. Tapi kami akan bersedia membantu pemerintah untuk memperlengkapi data-data melebihi kesbangpol yang tidak bisa disediakan. Maka kami siapkan copy-copy-an perizinan kami sejak awal prosesnya. Kami bantu pemerintah lah. Tapi sih, kepala kesbangpol ini mengalihkan permasalahan sedemikian rupa. Sehingga ini bukan masalah pendemo dengan pemerintah, tapi pendemo dengan gereja.

Pak Raja : Dipelintir ya pak ya?

Pak Waskito : oke sekalipun kami juga minta tolong FKUB untuk membantu menjelaskan. Dan FKUB sudah membantu menjelaskan bahwa penderian gereja ini, sah, sesuai dengan hukum, sesuai dengan yang pernah kami survei, sebelum gedung diberdirikan, sebelum izin diberikan.

Mengkonfirmasi apakah langkah-langkah ini juga dirasakan oleh warga atau tidak, supaya penelitian itu bisa komprehensif, terutama memang masalah intoleransi agama. Jadi temanya ini penelitian utama itu satu anggota polri maka judulnya beliau itu inovasi polri dalam menangani isu intoleransi beragama di 3 lokus. Memang jakarta itu penanggung, nah 3 daerah ini karena catatan polri menemukan. 3 daerah ini ada intoleransi agama yang perlu jadi perhatian, makanya kita telah mendapatkan informasi dari polri, jadi kita ingin memperkaya lagi supaya perspektifnya lebih luas.

Tadi kita sudah ketemu sama pimpinan FKUB dan pak jurdando, kita mau konfirmasi sekaligus memperdalam, pertama secara umum terkait intoleransi beragama menurut pandangan bapak itu bagaimana?, yaaa intoleransi itu artinya tidak mau menghormati, tidak mau menghargai, tidak mau tau, menangnya sendiri, kira-kira seperti itulah ya. Terus di temanggung sendiri yang melatarbelakangi kasus-kasus intoleransi beragama yang paling banyak itu apa?, ya kalau dikatakan banyak gitu ya kalau menurut saya sepanjang saya, sejak th 93 di temanggung itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang menurut saya itu apa ya, untuk masyarakat temanggung itu terlalu menonjol dalam hal intoleransi. Ya seringkali itu yang disebut kan kasus th berapa ya, pita biru, itu katanya orang dari jakarta yang membawa selebaran yang di bakar di sebar di daerah pangan, terus kebetulan itu kan sensitif terus menyinggung maka terjadi 9 berapa itu lupa. Di benak masyarakat temanggung sudah dilupakan. Kemudian kasus-kasus teroris itu menurut saya bukan intoleransi tetapi radikalisme sendiri. Pada waktu terjadinya kasus itu bapak sudah ada disini?, iya sudah disini. Pengalaman bapak bagaimana?. Waktu kami mendengar kasus itu, kami merapatkan barisan ke dalam, supaya di dalam, kebetulan kami waktu itu menjadi ketua badan pelaksana gereja-gereja di kabupaten wonosobo dan kabupaten temanggung, kami segera membuat semacam surat penggebalahan, isinya itu ya agar kita tidak mengedepankan emosi, tetapi nalar, akal yang kita pergunakan sehingga dari akal yang dianugerahkan tuhan itu bisa menyaring dan menentukan sikap, oo begini pas, begini tidak pas. Supaya tenang, damai. Kalau ada apa-apa ya segera komunikasi dengan kita jangan mengambil langkah-langkah yang tidak pas.

Tadi kita sudah sempat ngobrol beberapa kasus yang terjadi di temanggung, ternyata yang disampaikan oleh bapak junardo tadi memang dilatar belakangi oleh, apa namanya ya, tidak, ketika misalnya tidak ijin tokoh untuk mendirikan gereja, maksudnya bahwa teman-teman yang dari agama kristen sulit di toto

katanya, apakah memang benar demikian seperti itu pak?, dari jamaah bukan dari ...karena gak tau peraturannya ya pak, karena jenengi wong-wong....., ya itulah karakter gereja, setiap gereja memiliki karakter dan aturan masing-masing. Misalnya harus mandiri dalam bidang sdm-nya, dana keteologian, bahkan harus ada 15-an jamaah, bahkan ustadz-ustadznnya sangat dalam, jadi jamaah itu harus selesai sepakat di dalam dulu antara hindu sepeti ini dan kelomok, kemudian setelah disetujui di dalam itu nanti laporkan ke persidangan di atasnya, persidangan gereja-gereja temanggung, kemudian akan mengutus beberapa orang namanya visitator ke gereja yang mau dewasa itu untuk dilihat (survei) dari dananya, teologinya, jumlah jamaatnya, baru dibimbihg, pembimbingan paling cepat itu 6 bulan. Setelah itu silahkan menjadi gereja dewasa tentu dengan gedung gereja yang apa....ternyata karakter-karakter seperti itu tidak dimiliki oleh aliran-aliran yang lain, aliran yang lain katakanlah 7/10 orang sudah menyatakan diri sebagai gereja, tapi mungkin jumlah jamaatnya tidak seberapa ya. tapi jelas tidak ada aturan ke dalam yang jelas ADART kalau disini itu ada tata gereja dan tata laksana gereja itu salah satunya megatur tentang itu. Lah itu kok gak sama dengan saya, karakter mereka berbeda. Nah itu lah kelompok a dikatakan c itu harus mendalami karakter itu. Dan itu salah satu tugas saya yang terus saya sampaikan ke teman-teman kami, bahwa kita itu ada aturan keluar ke dalam, juga aturan bermasyarakat, berbanagsa dan bernegara. Jadi kalau dikatakan sulit itu ya, belum.

Dengan melihat situasi itu pak banyaknya kelompok-kelompok yang tidak sesuai langsung mengatasnamakan gereja, apakah melihat situasi itu bapak memandang apakah intoleransi agama dilatarbelakangi oleh nilai-nilai agama itu sendiri atau ajaran-ajaran agama itu sendiri atau ada hal lain yang melatarbelakangi seperti ekonomi atau lainnya?. Nilai-nilai dan ajaran agama saya pikir tidak tepat bahkan tidak boleh terjadi landasan kita untuk berintoleransi. Karena pada dasarnya ajaran dan nilai-nilai agama itu baik, orangnya lah, ekonomi juga saya pikir itu tidak. Karena saya melihat di kalangan gereja, di kalangan masjid, itu ya perekonomiannya luar biasa menurut saya, saya lihat di masjid gitu ya luar biasa. Ya biasanya itu karena pandangan sempit yang dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan saja. Gak tau karena tidak mau bergaul berkumpul berkomunikasi, kalau mau pasti ngerti kayak gini.

Jadi dinamika sosial atau relasi sosial antar umat katakan islam dan kristen yang paling besar itu gimana kondusif harmonis apa gimana?, kalau menurut saya cukup kondusif dan cukup harmonis dilihat dari segi sosial. misalnya ada kegiatan sosial bersama desa, ya bersama, misal keluarga ya bersama, misal ada nikah atau kematian itu jalan biasa, kompak. Saya itu seringkali di kampung saya, saya jadi ketua panitia nikahan berapa kaali. Kalau disini jadi panitia pembangunan balai RW. Untuk bapak sendiri mungkin mewakili teman-teman yang kristen, Meyakini agama itu sesuatu yang harus dibela itu adalah harga diri atau gimana pak?, kata dibela itu menurut saya ngak ya, dari sudut pandang kekristenan itu lho, tidak perlu dibela menurut saya, sehingga dengan demikian tidak perlu, kalau bicara agama kitab suci itu kan sesuatu yang absolut, yang akan menuntun kita sampai pada tujuan ya, ya kalau ada yang gak ngerti dengan cara bertindak dan cara bicara yang gak pas ya kita pahami gak ngerti saja. Trus ini fokus penelitian kita

mau mengelaborasi penanganannya dari polri, selama ini bapak kan bagian dari FKUB, melihat apakah ada sinergi antara FKUB dengan polri ?, misalnya dalam penangkapan teroris sebenarnya bisa ketangkap tanpa banyak yang tau, tp kan kita liha kata pakpakai senjata kamera, iya terlalu didramatisir ya. Kalau hubungan polri dengan tokoh-tokoh beragama di temanggung menurut saya luar biasa sekali, sangat dekat sekali dan itu yang menentukan situasi itu menjadi kondusif tenang, saya ketemu pak kapolres itu sudah seperti teman saja, makan bersama dengan pengurus FKUB pergi bersama, sehingga orang mau ketemu polri, orang mau ke kantor polisi itu tidak takut ya, karena sangat dekat. Kalau menurut saya erat sekali. Beberapa kali kegiatan di gereja kita juga undang dari polri, narkoba disitu kan juga mereka sangat mengerti ya, belum lama itu d fkj temanggung kita undang bahkan kapolres juga diundang, bahkan ke polsek-polsek juga bagus hingga seperti teman saling memberikan masukan. Kemudian masalah penangkapan itu kan polri punya protak sendiri, mungkin bagi orang awam seperti saya itu bisa mengatakan berlebihan, mereka punya protap dan wakil teroris itu kan biasanya sudah disertai dengan misalnya yang selama ini terjadi kan senjata tajam sehingga polri harus lebih hati-hati, kadang lebih pintar dari polri, menjaga keamanan diri sendiri.

Kalau misalnya antara polri sendiri dengan pihak FKUB sendiri kira-kira ada program yang sifatnya periodik untuk mengatasi kasus-kasus intoleransi agama?. Ada mas, jadi kita itu sering bersama polri ke desa-desa, dari FKUB dari polri, tni, kesbang itu sering ke desa-desa, contoh programnya seperti pembinaan, sharing dengan masyarakat, diskusi. Jadi kita mendapat masukan dari masyarakat, masyarakat juga menerima masukan. Jadi polri sekarang sudah beda dengan polri dulu, top down. Sudah sering kita lakukan. Masyarakat yang sering dilibatkan dalam kegiatan ini masyarakat secara umum apa Cuma tokoh-tokohnya saja?. Kita malah pergi ke desa-desa, dari dulu itu pernah Cuma tokoh-tokohnya saja, kecamatan, kabupaten. Sekarang sudah ke desa-desa. Karena memang program yang cukup lama, jadi kita harapkan bawah, bawah gitu ya. Waktu itu pernah studi banding di sragen, itu pernah fkub datang ke rw-rw. Upaya itu bentuk untuk membangun pengetahuan masyarakat atau apa pak?, menurut saya tidak hanya pengetahuan, tapi juga kebersamaan, kalau sudah bersama itu kan dekat kalau ada apa-apa itu kan enak mau lapor mau bicara itu enak. Jadi kebersamaan itu penting bagi saya, komunikasi penting menurut saya. Berarti rw dan rt juga dilibatkan untuk menanamkan sikap toleransi?, iya kalau dikelurahan kan yang dipanggil itu para rt rw dan tokoh masyarakat itu, dan jangan lupa kerjasama, kebersamaan di galang. Kalau gerakan-gerakan radikal ekstrim yang diluar teror kemarin apa ada?, kacamata kristen apa ada?.

Khusus kerja polri sendiri, apakah cara penanganan kasus intoleransi apakah menurut bapak itu sudah langkah efektif atau bagaimana?. Polri itu ada kalanya ya dengan segala kekuatan yang mereka miliki, tapi kalau di suatu saat tiba-tiba diambil tanpa keributan itu malah gak tau kalau ada keributan. Ya menurut pandangan saya itu namanya proses kan mas, ya harus diperbaiki, siapapun kayak apapun yang namanya HAM itu humanis nya itu yang perlu ditingkatkan. Siapapun itu kan saudara kita keluarga kita masyarakat kita, syukur kalau pada akhirnya bisa jadi baik seperti kita atau kebaikannya melebihi kita. Terakhir, kalau

menurut bapak sendiri langkah penanganan yang paling tepat untuk mengatasi kasus-kasus intoleransi agama masukan untuk polri itu apa?, yang paling tepat menurut saya itu, persaudaraan semakin hari itu harus ditingkatkan, memang agama satu dengan yang lain tidak bisa dibersamakan, tapi agama satu dan yang lain itu punya keprihatinan yang sama seperti kemanusiaan kemiskinan itu kan perlu agama itu perlu hadir kesitu tidak perlu hanya bicara di dalam tapi juga perlu aksi nyata di tengah kehidupan bersama. Alangkah indahnya kalau menurut saya itu jika dilakukan kristen muslim hindu budha, wah itu yang menurut saya adalah penanganan yang hebat, juga apa ya kalau ada kasus-kasus itu kita jangan terlalu cepat mengambil sikap mengucilkan, menghukum mereka secara sosial, saya pikir harus diupayakan untuk ditinggalkan, jadi pendekatan itu memang lebih penting, kira-kira itu.

Bagaimana mengedepankan diantara setiap masyarakat disini, apakah sebelumnya ada suatu kondisi yang sebelumnya tercipta?. Kalau kondisi menurut saya sebelumnya itu ya tercipta, hanya karena kebersamaan kedekatan, hingga setiap orang kan punya perspektif yang berbeda. Setelah pendekatan ooo ternyata begini, tapi kedekatan itu hanya sesama orang temanggung apa kepada setiap warga termasuk pendatang?. Karena menurut informasi yang saya dapatkan, temanggung ini telah menerima dampak dari perbuatan orang pendatang. Nah ini seperti apa?, ya orang-orang temanggung itu kan namanya ditamuni ya kita terima dengan baik, kita sambut dengan baik, dan ternyata ada sebagian kecil yang ternyata memberikan dampak yang baik itulah yang diluar dugaan. Nah bagaimana katakan fkub y mungkin dari perspektif kristiani menetralsir kondisi itu?, ya menurut saya perjumpaan itu penting ya kebersamaan kedekatan di kristen apalagi temanggung ini senang kekeluargaan. Emosionalnya itu, cepet akrab pada siapa saja gitu. Jangan ngomong dulu, berbaur dulu baru ita bisa menyampaikan ide.

Kejadian terkahir di banjarnegara itu, yang ngekos disitu dan ternyata dia mujahidin afganistan. Jadi apakah perilaku intoleran ini juga terjadi antar sesama agama katakanlah kristen dengan kristen. Karena narasumber yang tadi ada yang mengatakan kalau umat kristen sulit ditoto. Ya menurut saya itu memang aturan yang estapi menteri itu 60/20 ya, sementara orang berpandangan ya beribadah beragama itu kan hak asasi, hak pribadi. memang kita perlu laki-laki yang dekat dengan mereka, tetapi pribadi kita tinggal di suatu daerah suatu tempat dimana yang memiliki tatanan sosial dimana kita harus ngerti dan menjalankan. Sementara anda belum mencapai disitu secara intern harus diselesaikan. Misalnya saya punya usul di gereja temanggung supaya kecil-kecil itu juga soalnya kalau disatukan itu angel supaya dapat melaksanakan ibadahnya di tempat itu, menarik menurut saya, gereja disini bukan hanya untuk dikaji saja begitu kan supaya yang kecil-kecil itu bisa itu tadi, kebutuhan rohaninya juga terpenuhi, tersalurkan. Karena kita kan gak bisa raoleh nek raoleh y iye kan harus ada jalan keluar. Jadinya gereja menyediakan tempat untuk agar yang kecil-kecil juga bisa ibadah, itu ada contohnya mas jadi di sinorgaji slatiga itu memberikan tempat kelompok-kelompok kecil itu untuk beribadah disana kompleks gitu ya silahkan. Nah itu kan salah satu apa ya, sesuatu yang positif, karena kalau gak beribadah yo piye, mereka kalau gak jadi baik salahnya siapa. Maka penting itu sebenarnya bukan gak boleh tapi jalan keluarnya gimana, itu yang penting ya. kalau bicara gak boleh

y itu gampang tapi saudara kita yang punya hak juga untuk mengekspresikan kehidupan keberagamaannya dengan tuhan, lah tentu kami sebagai gereja bagian dari mahkamah itu ya harus berikan solusi, kami ini kita sudah besar banyak jamaatnya kan gk masalah. Tapi justru kebersamaan itu juga bermanfaat bagi yang kecil. Tapi itu terjadi juga pak sama agama lain katakanlah hindu budha, nah itu yang memberikan diri itu adalah pribadi-pribadi yang sudah menjadifkub karena mungkin sudah mengerti ini kan ya ada perspektifnya bagaimna harus menjalankana kerukunan dua agama atau memang sparadis siapa saja memang sudah menerapkan itu?, ya gak harus fkub banyak gereja itu yang dipakai pagi LKKB siang GKJ itu banayak, pernah ada sperti itu ya. Seperti kami ini gedung di bawah itu pertemuan mas, kegiatan rt rw bisa pindah disni, orang meninggal karena rumahnya kecil pindah disni, muslim juga bisa terbuka untuk umum.



PROF. HERMANU 1

Intoleransi itu sudut pandang, terutama di kota solo itu lama seklai, dari abad ke 19 erus berlanjut sampai dg abad yang sekarang, itu memang fiksi itu ada, dan terutama fiksi itu kaitannya dg etnis, kaitannya dg agama, wahab itu yang selalu menonjol itu disitu. Nah kemudian jika kita tarik kaitannya dg pasca kemerdekaan, kebijakan yang sangat kemudian menjadi suatu gerakan intoleran semakim meninggi itu karena kebijakan orde baru. jadi kebijakan orde baru itu kan cenderung merepresi orang2 islam yanag berpaham berbeda, salah satu contoh merepresi tiga tokoh, abu bakar basir, abdullah thahar, abdullah sungkar. Tiga orang itu yang kemudian direpresi, tetapi yang tidak disadarai bahwa tiga orang itu membangun sel sampe bawah tanah yang sangat luas dan lebar, dan itu sebenarnya sangat berbahaya kalau kemudian represi itu tidak dirubah menjadi suatu kebijakan yang akomodatif. Nah sekarang itu persoalannya kebijakan akoodatif seperti apa yang bisa menghilangkan itu, inilah suatu persoalan. Nah solo itu selalu konteksnya agama yang sedang berkembang saat ini, konteks agama itu menjadi satu kasus intoleran, salah satu contoh yang terkahir yang bisa kita lihat di solo itu ketika oranag2 chainis merayakan imlek, itu diteror oleh kelompok2 yang berafiliasi garis keras. nah itu yang kemudian bisa kita lihat. Kemudian saya melakukan gerakan2 untuk mendukung pemerintah kota, saya mengumpulkan 45 aliansi, orang solo ini kami kumpulkan untuk memberi dukungan. Dan itu suatu represi balik terhadap mereka bahwa kami ini ada, nah itu, itu satu hal yang perlu harus dilakukan seperti itu. Jadi itulah kalau kemudian kita flashback ke belakang itu memang panjang. Tapi sebenarnya yang kita lihat itu seberapa besar pemerintah mengakomodasi mereka. Di balik satu kebijakan warisan orde baru itu maupun orde lama yang, orde lama itu kan tensinya tidak begitu tinggi, tetapi tensi yang paling tinggi yang paling ditakutkan itu orde baru, karena masa orde baru itu komunis pki itu tidak ada. Kemudian ada yang ditakuti pak harto dari umat islam. Dan selalu islam itu di masa yang lalu selalu jadi barang dagang, islam itu selalu jadi barang datang. Bagi saya islam itu adalah suatu agama tetapi bisa saja masuk ke ruang politik seperti yang dikatakan oleh sunogrnonya, dia masuk ke runag politik ada sesuatu yang sifatnya urgent. Ketika pemerintah sudah berdiri, tidak urgent lagi dia masuk ke ruang politik. Nah itu kemudian, dalam tafsiran saya seperti itu. nah kemudian, kalau intoleran yang sekarang ini saya memang terutama di kampus, kebetulan pembantu rektor satu iu teman saya. Saya ingin merubah seting kampus ini bukan tempat hegemoni oleh kelompok agama, bukan itu. Saya ingin menaikkan kelompok2 lain fraksi2 lain di dalam kampus utk hidup. Nah ini kan sudah direstui oleh menteri, ada kelompok cipayung yang menghidupkan pmii, gmmi, pnkri kemudian ada hmi ada inkn juga, itu harus dihidupkan tidak boleh didominasi oleh kikami. Nah saya sedang setting ini sekarang, karena di kepemimpinan yang lalu kami tidak memiliki peran apa2, kami termasuk kelompok marjinal. Nah sekarang saya sedang mencoba utk itu. Nah ini sedang kami setting mudah-mudahan berhasil, dan setingnya itu sampai kelili masjid. Masjid itu harus saya rubah, sekarang tidak, tapi pengurusnya sudah. Tetapi perangkat di dalamnya itu masih, salah satu contoh khatibnya itu ngomongnya masih seperti itu. Khatib harus menyampaikan

dakwah, bukan dakwah yang sifatnya kekerasan, yang melawan pemerintah, yang melawan etnis, yang melawan agama lain, ndak boleh. Ini nih sedang saya setting, jadi ini awal permulaan karena perubahan kekuasaan baru bulan april kemarin. Aapril mei, bau beberap bulan, kamis edang menyeting ini. yang kedua yang ingin saya rubah itu adalah narasi anak2. Narasi anak2 tidak bisa kemudian menggunakan narasi radikal, narasi liandiadus, narasi yang kemudian marjinal itu tidak bisa.karena mereka juga bagian dari kehidupan yang ada di kampus ini, civitas akademika. Nah itu, saya ingin mereformasi semua buku yang ada di perpustakaan masjid. Itu tidak bisa menampilkan pikirannya hazam al-rabbani, ibnu taimiyah gak boleh, harus ada narasi tandingan, abdurrahman wahid, qurais syihab, nur kholis majid, syafii maarif, kalau tidak terus akan bergulat terus akumulasinya akan, ini tidak bioleh. Nah saya sedang berjuang soal2 itu.

Kemudian, kembali lagi tentang solo, kami membaca beberapa literatur latarbelakang yang memicu terhadapnarasi panjangnyaa itu adalah agama yang berusaha dilegitimasi untuk melakukana kekerasan yang sifatnya agama, apakah benar?. Benar, selalu agama itu menjadi komunitas2 tertentu,menjadi alat komuniti, kalau dalam bahasa ilmiahnya islam politik, jadi islam menggunakan itu, tapi saya selalu mengatakan politik islam, karena islam sebagai tull, tull mereka, selalu menggunakan tull meskioun di dalam ajaran islam sendiri, kita selalu mengatakan hanif, kita tuh hanif lho dengan orang lain, tuannya sama masuk surga. Tapi kemudian mereka mengatakan narasi yang bisa masuk surga ahanya islam, betul kan? Iya betul, qurais syihab juga mengatakan begitu. Orang yang perbuatannya baik di dunia, kemdian sesamanya juga baik lah itu mereka juga baik gitu. saya itu bekerja dengan pms (persatuan masyarakat surakarta). Dan notabene adalah seorang pengusaha2 semua, kemudian ketika saya menemui mereka, mereka saya ajak, mereka baru sadar, aku punya duit banyak tapi utk apa kalau kemudian kami terancam. Maka kemudian mereka amembantu kami. Inilah yang kemudian saya anggap ini embrio saya. Nah saya besok tgl 1 agustus itu, 1 2 agustus mengadakan interview dialog yang dibiayai mereka, jadi mereka bersedia, diskusi bukan kayak seminar. Nah ini baru embrio saya, kemudian embrio kedua saya yang sedang saya bangun, itu saya bersama gerakan simpang merah putih itu pecahan dari pms, sama2 orang cainisnya, hanya ayg ini adalah orang2 yang pengusaha punya duit tetapi yang mengelola ibu2. Jadi suaminya tidak terlibat dalam disini, tetapi dia biasa mendapatkan funding, nah funding inilah untuk membentuk kami, untuk mengelola kantor ya semangat toleransi gitu ya, iya. Nah saya selalu basis saya saya pakai adalah kampus, saya tidak berani menggunakan basis luar, basis luar itu bagi saya karena saya tidak punya packing di belakang ini. nah saya menggunakan ini bahkan gerakan cinta merah putih itu siap membantu utk kegiatan masisuhur. Jadi saya mencoba utk memasukkan2 gimana, ternyata mereka setuju, berapa mahasiswanya, ya sekitar 6rb 7rb, siap gak?, iya siap kami sudah siap, bagus. Ini ini awalnya, jadi saya sedari awal mencoba berinteraksi dengan wali kota dg teman2 yang ada d luar itu, kenapa saya melakukan ini?, karena basis ini yang gak bisa dibenahi dulu setelah itu publiknya, nah itu, saya sedang merancang-rancang seperti itu, publiknya nanti kita akan menggunakan apa nanti kita masih memikirkan, saya kira itu.

Kemudian prof apakah situasi bahwa agama sering dijadikan komoditas politik oleh sebagian elit, apakah situasi itu sudah disadari oleh polri khususnya pemerintah secara umum?. **Tapi maaf sebelumnya, polri sendiri dulu reformasi kan juga menggunakan kekuatan itu, tni, polri membuat kekuatan agama utk bisa menjadi trikel tampil di atas permukaan, kan itu kan saing bersaing utk meraih kekuasaan.**(masalah pelik di dalam instansi polri, ini menjadi sangat menarik sekali untuk dilihat dan dianalisis lebih jauh) Nah, bagi saya itu gak elok sebenarnya, dari polri menggunakan fpi kemudian tni menggunakan apa, ini kan gak bagus, bagi saya lho ya. Tapi belakangan sampe dengan, mungkin pada masa sby atau masa jokowi ini kesadaran itu mulai terbuka ya, nah ini yang bagus bagi saya. Nah ini, kesadaran ini yang harus membuka diri bahwa sebenarnya hal-hal seperti itu akan memecah persatuan kita, yang harus kita sadari seperti itu. Karena utk bayangan, katakanlah bayangan soekarno, ketika dia menyatakan di sidang bpupki itu kan yang dia tuntut adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dan itu kan belum terwujud sampai sekarang, sehingga kalau kemudian ada elit yang tidak menggunakan cara berpikir itu, itu kemudian saya bertanya pada dia, mau apa dia?, tapi sekarang sudah ontrack lah, selama periode 4 tahun ini kan problem utamanya kan kemiskinan. Kalau semua orang itu bahagia gak ada konflik. Tetapi orang kemudian berpikir aku sudah seperti ini. Bisa gak kalau kita katakan, bahwa konflik intoleransi agama itu sebenarnya di surakarta ini itu di kontribusi oleh salah satunya ekonomi pak?. Ini maaf lho ya, ada kelompok NU yang tradisional yang dalam tataran keagamaannya bagus, dia mendukung NKRI dan sebagainya, sekian tahun yang lalu, sekian 10 th yang lalu lah istilahnya, ia juga ikut FPI. Sekarang saya bertanya problemnya apa, sekali turun ia 50 100, ia mewakili NU. Tetapi didalam pikiran saya itu tidak elok. Tapi dibalik ketidakelohan tu ada problem ekonomi. Kalau pemerintah yang sekarang berusaha untuk memberikan suatu kehidupan yang lebih baik saya kira. Banyak misalnya mengurangi ya, iya mengungkap. Jadi problemnya seperti itu. Jadi dibungkus dengan isu agama?, iya, dan isu agama untuk mendesak seseorang utk kebutuhan finansial.

Kemudian prof utk kebijakan² yang sifatnya akomodatif utk semua agama, katakanlah umat beragama kira² yang harus d creat oleh polri dan secara khusus oleh pemerintah, itu kira² seperti apa?. Satu²nya yang harus dipegang polri itu adalah objektif. “dari mana menunjukkan itu prof, kalau prof herman sendiri tadi bilang ya mereka sendiri sebenarnya ada kelastrisasi utk mendapatkam kekuasaan”?. Oh bukan-bukan problem antara polri dan masyarakat, kan sebenarnya kenapa masyarakat sekarang kalau melihat polri itu nyinyir, kalau dibandingkan dg TNI kan, ini sebenarnya ada problem. Mau ribut juga tidak sejahtera, betul gk?. Coba kita lihat orang yang ada di bawah polri, orang yang di atas sejahtera, tetapi yang di bawah bagaimana?, “iya, iya jadi double gitu ya prof kesulitannya”. Iya, sehingga apapun ia tidak akan objekif ketika ia tidak sejahtera, maka kemudian pemerintah akan memberikan opsi kesejahteraan yang sama utk mereka, itu saya kira juga bagus, persoalannya pak sebenarnya disitu. Yang kedua yang saya ketahui adalah, kalau malam saya itu kan sering keluyuran, tahun² 2003 2002 itu selalu ada, polri selalu satu mobil itu selalu di pinggir jalan, nanti dia menerima uang. Untuk siapa itu. Gitu ya, nah itu ini ya yg sebenarnya yang

harus dibenahi kalau bagi saya adalah faktor kesejahteraan, mereka begitu itu karena memang tidak sejahtera, secara finansial mereka tidak sejahtera. Kalau kita hidup mereka hidupnya dimana, ya di barak. Tetapi ada orang polri yang walaupun pada posisi ini, dia sejahtera. Nah sejahteranya dia dari mana, ya dari kakinya itu, orangtuanya. Kan begitu. Tapi kalau memang anu ya tidak bisa. Jadi problem sekarang itu adalah kesejahteraan. Ya monggo anti “tapi bera....ini pernah pak tito bilang ia akan terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan polri, memang itu sudah dikerjakan pak, ada terus peningkatan ektalasi ini ya, ektalasi penerimaan mereka ...tapi tetap aja ada pelaku yang msh nakal pak ” problemnya itu kan bukan sekedar itu ya, problemnya itu kalau pemerintah tidak memberikan insentif dalam bentuk gaji ya gk ada artinya, dari mana dia?, orang dana polri itu terbatas kok. Polri itu terbatas dananya, dana operasional mereka terbatas, gk banyak, PNS juga seperti itu. Dengan sekian wilayah seluruh indonesia dia mendapatkan berapa itu, kecil. “artinya ketika kesejahteraan nantinya ditingkatkan maka dia lebih bisa objektif gitu pak”. Iya harus “atau memang ada faktor lain, misalnya karakternya gitu pak” kalau karakter itu saya kira gak ya, tidak menjadi 100% bulat itu karakter mereka, tidak semua, iya adalah ya, saya sih melihat itu. Memang dari sisi apapun kalau kesejahteraan tidak ditingkatkan.

PROF HERMANU 2

Nuwun sewu pak, itu kata beberapa orang yang sudah kita wawancarai itu karena tidak adanya figur, baik dari polri ataupun.... apakah situasi itu mendapatkan..? iya kalau figur itu kan bukan sesuatu hal yang utama, figur itu katakanlah bugem,,,itu orang yang sangat hebat, bersih jujur, tapi endingnya kehiduannya juga, rumah gk punya, apa2 gk punya. Bahkan rumah saja diberikan oleh gubernur DKI. Bahkan yang terakhir yang saya dengar, pembayaran listrik saja dari ahok. Apakah seperti itu, pertanyaan saya.kan tidak bisa seperti itu. Maka sebenarnya bagi saya, jaminan hidup itu harus. Karena jaminan hidup itu akan membentuk seseorang karakternya itu seperti apa. Karakter saya terbentuk ketika saya sudah S3, saya harus apa, saya lihat apa, tetapi saya tidak pernah keinginan menjabat. Bagi saya jabatan ini sudah tertinggi cukup, gitu lho. Tetapi dari sini pun saya bisa berkontribusi untuk mahasiswa , berkontribusi untuk siapapun saya bisa. Bahkan saya akan menghasilkan profesor dari tangan saya, dari dorongan saya, motivasi saya. Yang terakhir ini, saya ikut terlibat langsung. Nah, begini ini apakah ini kemudian karajter, ya bagi saya ini karakter saya. Sehingga kenapa saya tidak minta kursi tamu ya, saya justru minta ini, bagi saya ini lebih penting daripada kursi tamu. Karena idmana2 ada kursi tamu. Karena dg begini saya bisa memberikan konsultasi mahasiswa, sampai pada konteks penulisan jurnal, saya bisa berkontribusi disini, tetapi kalau kursi tamu bagaimana saya bisa berkontribusi. Itu u salah satu simbol yang bisa saya, jadi kemudian, itu karakternya bagus. Tapi apakah pak tito karakternya juuga bagus, itu kan pertanyaannya, betul kan. Yang saya tau pak tio sering datang ke suatu perusahaan besar dan ngobrol2 ya akhirnya dapet juga, ya itu rahasia puget lah ya.gitiu loh, makanya kalau bagi saya bukan soal itu kesejahteraan penting. Berarti kalau polri sendiri bagi prof utk dia bisa menjadi objektif kesejahteraan yang paling penting, kalau difungsinya prof, kan ada preventif represif dan

rehabilitatif itu kira2 utk daerah solo sendiri sdh benar2 direpresentasikan gak prof?, selama ini kalau di solo itu kan, disini kan juga ada apa ya “dalam kasus intoleransi agama” polri saya kira polri tidak pernah terlibat hal2 seperti itu, jadi polri selalu mencegah kayak gitu, tapi memang begini ya, kadang2 polri juga takut kalau kemudian agama itu bermain itu takut, tersu terang. Jadi polri tidak berani, salah satu kasus yang ada di depan balai kota itu, yang kemudian sebenarnya itu bukan salib itu, sebenarnya filosofi jawa yang menunjukkan 4 ancer apa gitu, ada filosofi ajawa yang itu tapi itu dituduh salib oleh orang2 mereka oleh kelompok kluis, nah itu dituduh salib. Dan ketika mereka berbondong-bondong itu tidak ada satu gerakan untuk menghalau mereka itu tdk ada. Jadi kesimpulannya polisi sendiri itutakut kalau dituduh tidak beragama, melawan agama, itu problem. Maka kenapa kemudian saya tergabung dalam 45 aliansi itu di solo ini, dan maju. Saya mendukung wali kota, jadi wali kota tidak boleh takut dalam hal apapun karena itu untuk kemaslahatan masyarakat. itu yang saya melihatnya. “dalam kasus itu prof berarti melihat bahwa polri posisinya tidak benar2 netral, artinya masih kondensius pada satu agama” bukan, bukan tidak netral. Dia netral, hanya kalau dia maju, itu kan stigmanya terhadap polisi tidak begitu bagus, masalahnya pada stigma. Misalnya saya membela A kemudian B, waa stigma iyalah yang dibela orang ini, terus bagaimana. Ya dia netral, objektif. “dan akhirnya polri akan dituduh tidak beragama” nanti kan melawan agama islam “membela dia berarti kamu” selama ini polri kan menghabiskan org2 yang raduikal. Jadi semua yang melakukan teror itu kan sudah diambil, diselesaikan. Nah kemudian dalam kasus itu kalau kemudian polri membela, ya disitu dipersepsikan ada salib, berarti polri membela salib, itu yang tidak enak. Berarti dalam hal ini polri sebagai safety fair ya, iya, polri hanya sekedar menjaga saja agar tidak meluas ke.....salah satu contoh ya ketika di gladak itu Amin rais juga teriak2 begitu, apa yang mau dilakukan polri, ya sekedar menjaga. Bagi saya sudah cukup itu, karena kalau kemudian polri mengalau, dari polri ademo krasi, dia tidak menyetujui demokrasi, nah itu hal2 yang sepele tetapi bagi polri juga mengalami blunder.

Tetapi apakah dg polri tdk bergerak dg cara apapun, sewaktu kasus yang luis itu di depan balai kota apakah itu tdk semakin memperbesar potensi intoleransi beragama?, o tidak tidak seperti itu. Kan intoleransi itu harus di hantam IN ya harus dihantam dg toleran, gak bisa....maka ketika saya aliansi itu ada orang kristen, ada orang hindu, ada orang...jadi satu, mereka kemudian berpikir, loh...apalagi leadernya saya, memang berpikir, itu ada orang gila disitungapain, kan begitu. Dan saya memang, niat saya memang begitu, nah itu yang ada, yang jelas itu saya kelompok NU hampir semua yang ada disitu. kemudian NU itu punya organisasi macem2 juga ada disitu, yang katolik ada disitu, yang kristen ada disitu, yang hindu juga ada disitu, trus hanya begitu yang harus kita lawan, hanya seperti itu. Tapi kalau polri nanti dia melakukan represi, berat resikonya, “jadi dalam hal ini polri prefentif aja pak ” iya. “pre entif tidak” pre entif itu apa? “deteksi dini pak” oo deteksi dini, kalau deteksi dini itu kan punya nya intelejen, intelejennya memang sulit, jadi kalau saya bicara intelejen memang kita banyak kecolongan. Dan memang intelejen kita pasca pak harto tidak begitu hebat. Dulu kan dipegang oleh beni murtani dan itu yang paling hebat dan juga sangat

menakutkan, di masjid2 ada intelejen itu kan repot juga, ya memang kalau.... “jadi prefentif ya, pencegehan” ya pencegahan, artinya tidak sampai meluas kemana-mana ya sebelum peristiwa. “kalau terkait gereja TKI, sempat ditolak yang di musukan, mojosongo”, ooo iya kenapa itu, saya belum tau. “ ditolak kan, ada beberapa segerombolan massa yang menyatakan sebagai kelompok islam, mendemo sewaktu diresmikan ”. oo iya iya, itu seperti kasus di kampung saya. Saya pribadi tidak menyukai hal seperti itu. Jadi saya ini cerita hampir tahun 2000 berapa gitu 2001,2002. Nah itu, selalu tokoh2 di kampung saya itu begini bicaranya, kita minggu mengadakan kegiatan, nanti jadi setelah sholat maghrib bersama kita mengadakan arisan dan macem2. Ternyata dibalik tujuan itu adalah supaya orang nasrani yang akan berangkat ke gereja itu tau bahwa kami juga bisa, nah kalau gitu kan tidak bagus. Kita itu berhubungan dengan tuhan itu kan tidak karena dia, kita itu sholat di masjid jumat, berbondon-bondong itu apakah karena orang nasrani yang akan lewat.kalau seperti itu, itu namanya gak bagus, kalau saya. Gak ada aturannya, di alquran kan juga begitu, agamamu agamamu agamaku agamaku. Ya semua itu punya tujuannya sendiri2, gak perlu kalau kemudian orang nasrani lewat wah saya harus ada, lah ngapain gitu, nah itu pertanyaannnya. Ya akhirnya, niat yang tidak baik itu juga tidak benar. Akhirnya dia memprodoli sendiri, hilang sendiri hilang sendiri, saya pikir begitu. Dan di tempat saya memang kalau.... maaf ya,itu kan ada aturannya di dalam pendirian masjid gereja itu, di sekitar itu ada yang menyetujui, kalau ada yang menyetujui boleh berdiri. Tetapi kalau sudah dibangun mau,,ijin sudah, kemudian apa ditolak, aneh itu. Ini bagi saya yang gk bagus. Tapi saya gk tau peran polri, ini kayaknya punya pemda, ranahnya pemda, setau saya ranahnya pemda. “kalau dari....jadi itu rumah ibadah itu sebenarnya rumah tinggal, jadi itu akan dibangun untuk dijadikan tempat ibadah, jadi warga menolak” gitu ya “tapi inofrman ada juga yang bilang, disisi lain juga banyak masjid banayak musholla tidak pernah sholat haraus disampaikan gitu ya, juga merasa ya ini tadi, bahwa ada yang tidak seimbang juga ” tapi kalo sepanjang ada ijin saya pikir tidak masalah. “tetap diresmikan yang DKI pak, soalnya yang memprotes katanya waktu itu, bukan masyarakat disana, orang disana sudah menandatangani terkait dg administrasi itu, tapi memang ada gerombolan, mungkin itu luis ” berarti kan begini, ada orang disitu yang kemudian komunikasi dg kelompok lain, terus dia dtg kesitu, ini gak elok kalau saya. Ya itu yg gerombolan pengasuh itu luis kalo begitu. “itu kalau misalnya memang sengaja benar2 mau apa namanya, menindak luis misalnya, kan punya otoritas prof apa tidak prof?”, iya punya. “itu kan sengaja memang dibiarkan si luis itu”. Pemerintah punya ooritas utk membubarkan itu, tetapi pemerintah juga berpikir, ah nanti daripada ribut2. Setau saya FPI sdh dibubarkan, belum putus, modal model begitu mungkin lebih bagus. Saya pikir itu bagus seperti itu, itu kan bentukan dulu ya, pasa reformasi itu kan banyak banya, TNI. “kesannya seperti ini prof, apa namanya, masyarakat sekitar gereja katakanlah akar rumput tidak bereaksi dg kasus yang di depan balai kota, tetapi kelompok2 seperti itu yang menimbulkan reaksi yang sangat” saya pikir kelompok itu ada afiliasinya dg kelompok dalem, saya yakin itu. “hanya sebagai informan lah mereka memberikan....” iya, saya pikir saya pikir. Kalau luis itu tempatnya jauh kok, gak di mojososngo, markasnya gak di mojosongo, saya pikir orang luar itu

ya, bisa orang luar masuk gitu gampang kok “jadi mungkin gak prof lagi2 sebenarnya orang luar itu diberikan informasi oleh org dalem dan dia dtg karena ada aspek ekonomis. Jadi saya bayar kamu , kamu harus selesaikan ini”. semua itu pasti seperti itu, ya gak mungkin polanya seperti luis itu, mau jalan tanpa ada sesuatu. “jadi Uud ujung2nya duit” ya betul “jadi terbukti masalah ekonomi juga kan” dan dan kelompok2 ini kan sebenarnya kelompok2 yang mungkin dibawahnya dia ada kelompok lagi, kelompok lagi yang kan di solo itu salafiyanya banyak sekali, jadi salaf2 itu banyak. Jadi salaf2 itu masuk ke organisasi itu. Nah, orag2 yang tergabung dlm salaf2 ini yang menjadi dia di pesantren mana, pesantren mana, pessianren kecil2 lah. Nah itu tu kadang2 bisa menjadi dia melakukan teror seorang diri. Seperti kasus yang ada di”itu orang pesantren prof?” iya, dia di bait melalui facebook, melalui hp di bait, kemudian dia melakukan....nah itu banyak, makanya yang saya takutkanjustru yang ini lho, yang kecil2 ini, bukan segerombolan luis. Luis itu bagi saya tidak ada artinya, “uda keliatan ya prof” iya, tetapi ini, anak yang kecil2 ini yang kemudian dia seorang diri melakukan teror, ini bahaya. Dan ini pasti ada jaringan di luar, dia punya koneksi jaringan di luar. Nah, solo yang ditakutkan ini, kemarin di kartasuro sudah sayangnya kepolisian dlm hal ini, ini gk intelejen. “atau ngak memang sengaja dibiarkan prof”. Saya belum bisa tau. Padahal itu juga di depan polisi lho “pesantren itu prof bukannya punya kurikulum yang sudah diatur” oh bukan pesantren salaf itu adalah pesantren yang dibentuk tanpa kurikulum. kalau pakai kurikulum itu bisa madrasah dan seterusnya, kalau pesantren yang kecil, kecil itu. Mislanya saya dulu berguru ke siapa, kemudian saya mendirikan pesantren, kecil kecil, kemudian saya punya murid yang disitu saya ngomong setiap hari, kemudian anak2 ini mengkultuskan saya dan saya punya jaringan kesana, anak2 ini yang kemudian... “jadi berarti intelejen sendiri tidak benar2” iya intelejen memang kurang dalam mengawasi salaf2, dan itu juga sekali lagi tidak mudah. “berarti itu juga yang harus diprioritaskan oleh” tidak mudah, jadi utk mengamati org intelejen itu juga mengalami kesulitan di era yang sekarang ini. karena di era skrg ini sudah ada ini, org bisa koneksi kpd siapapun jarak jauh dia bisa, “bukannya lebih mudah prof dg adanya ini” tapi mengawasi yang salaf2 itu yang susah, dan solo banyak, satu salaf yang kaitannya dg agama islam, dan satu adalah agama nasrani juga ada. “pondok salaf yang berkaitan dg nasrani maksudnya gmn prof?”. Ya, jadi gini, ada pondok kecil, pondok itu jangan dipersepsikan pondok besar seperti almuayat jangan, karena almuayat itu sdh sangat besar terstruktur, ada sd smp sma itu terstruktur. Tapi salaf yang ini adalah salaf yang dia setiap hari hanya mendengarkan khutbahnya sanga ustadz, nah ustdz itu punya peran utk membrand seseorang. Nah ini beda dg pesantren, harus membedakan pesantren dan salaf. Salaf itu kecil sekali, dia gak punya kurikulum, gitu. “jadi sebenarnya yang berbahaya itu juga pra ustdznya ya prof, yang menyebarkan yang mentransfer knowledge ttg itu ” ustadz itu yang paling baik, tapi kan saya gak berani ngomong ustadz “iya prof” karena masyarakat sekarang ngomong dia seorang apa, dia seorang kyai, anak kyai tiba2 disebut ustadz,lahkan keliru, maka saya gak berani ngomong ustadz. Kalau informasi intoleran itu menurut polri itu temanggung sleman dan solo itu dari jawa tengah atau gimana? “itu dari polda jateng, nah kalau yang solo itu dari hasil obrolan saya dg kasab

intern di polres, kalau yang di temanggung kita langsung ke kapolres, kalau di sleman kami ke kapolres dan fkub bukan kesbangpol” “kalau di temanggung sendiri prof sebenarnya sudah toleran kalau antara agamanya, tapi aliran2 yang sifatnya ini, eksklusif itu masih banyak disana.”



Wawancara Antara Pak Udianto, Pak Widodo dan Solah di Gereja Musukan
Mengenai Penyerangan Saat Peresmian Gereja

Pak Udianto: Dosen ITW

Pak Widodo: Pengusaha Botol Plastik

Solah: Pengangguran

- Solah : Tadi sudah dijelaskan pak...
- Pak Udianto : Pak komandan...
- Solah : Pak ini... namanya... pak Raja... masalahnya seperti itu. Kita coba ingin menggali data mengenai... maaf pak, biar suaranya jelas aja.... (sambil mendekatkan alat rekam).... iya gitu... kita ingin menggali data mengenai bagaimana intoleransi yang dirasakan di sini gitu? Sebenarnya kalau saya boleh menambahi sedikit, kita kemarin mengklasifikasi toleransi yang dilakukan oleh polisi... untuk membaca praktik intoleransi... setidaknya ada empat: Pertama adalah Pre-emptif, yaitu mengenali sedini mungkin. Yang kedua adalah preventif melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Yang ketiga adalah represif.... mmm... sudah melakukan tindakan gitu dalam bentuk yang verbal. Yang keempat, kalau memang sudah terjadi baku hantam itu kita melakukan rehabilitasi. Yang dilakukan oleh POLRI adalah rehabilitasi. Jadi dari pra sampe pasca, itu sudah ada langkahnya. Mungkin kita ingin menggali data, apakah ada itu dari empat ini. pre-emptif, preventif, represif, sampe rehabilitasi. Itu sudah terjadi gak di sini? Mungkin... atau mungkin cerita dulu?
- Pak Udianto : Gini mmm jadi awal gereja ini dulu adalah ...mmm... dari PI... dari pelayanan PI... post PI.... jadi itu kita hanya persekutuan doa persekutuan doa... sudah sekian puluh tahun, kita itu kita harus membuat satu ini ya... kebaktian! Kebaktian... kemudian ya kita kebaktian putar putar ya...
- Pak Dodo : Jadi kita nyewa berbagai tempat...
- Pak Udianto : Juga gereja... gereja GKII... kita kan enggak masalah gereja GKII itu. Ya suatu saat memang dari gereja induk dan pendukung, GKI sorogenen... eh Sangkrah, Coyudan, sama Nusukan itu... mmm... membeli tanah di sini. Setelah membeli tanah, kita minta ijin. Ijin dibangun gereja. Sudah.... berjalan semua... FKUB sudah ke sini... sudah semua... sudah berjalan... ijin ada
- Pak Dodo : Masyarakat juga sudah menyetujui
- Pak Udianto : Masyarakat juga menyetujui semua, terus dibangun gereja ini. Nah, setelah dibangun gereja ini, ada mulai... ya karena waktu dibangun ndak masalah, waktu dibangun, kemudian awalnya tuh kita ngadakan persekutuan doa. Doa doa malam di sini. Yang hadir di antara tiga puluh hingga tiga puluh tiga atau tiga puluh

lima orang. Lansia... hampir semuanya lansia... ibu-ibu semuanya. Lah, waktu itu kita diserang, dirusak, diobrak-abrik gitu...

Solah : Yang melakukan penyerangan?

Pak Udianto : Dari kelompok masjid yang di sebelah sana itu.

Solah : Nama masjidnya apa?

Pak Udianto : aduh saya ndak tahu...

Pak Dodo : Masjid al-Bakri....

Pak Udianto : Ya gitu... dah itu... Ya udah kita ya... sesuai dengan iman kita, kita ndak ada friksi, kita ndak ada melawan. Ya sudah, tapi memang itu kita laporkan kemudian e... kapolsek ya.. itu ya... kapolsek! gitu ya! La repot-nya, dari kepolisian itu, waktu ini diserang gitu itu.... sudah selesai... selesai... justru kenapa yang ditanya dari pihak korban?! Jadi pihak penyerang malah ndak ditanya, tapi didiamkan aja! Harusnya kan ya.. mereka ditanya kenapa kalian nyerang? Tapi justru kita tuh yang malah ditekan terus! Polisi loh itu!!! Babinsa!!! Repot! Ya sudah... enggak papa! Kita pun... Ya... hal itu tuh ndak ada masalah. Kemudian proses itu, apa pun kita harus mempunyai izin... apa .. eee.... belum diresmikan itu!

Solah : Peresmian tahun berapa pak?

Pak Udianto : (kira-kira) Dua ribu tujuh belas... dua ribu lima belas...

Pak Dodo : Sebelumnya kejadian sekitar tahun dua ribu lima belas... dua ribu enam belas.

Solah : Penyerangannya itu?

Pak Udianto : Iya...

Solah : Oh, berarti... penyerangan itu belum diresmikan dan masih belum gereja, Pak?

Pak Dodo : Sudah!

Pak Udianto : Sudah gereja! Sudah izin! Sudah ada padahal! cuma gedung ini belum diresmikan.

Solah : Katanya tahun dua ribu lima belas ngoten?

Pak Udianto : Iya proses penyerangannya itu tahun dua ribu dua belas, tapi ini sudah jadi gedung, cuma kita tuh ndak boleh makai, padahal izin sudah ada, semuanya sudah ada. Ya sudah kita minta koordinasi dengan pak Wali (Kota), dengan Bu Diana Kapolsek, dengan kapolres. Terus sama pak wali ya... diresmikan. La... justru peristiwa peresmian itu yang luar biasa!!! peristiwa peresmian!!! Semua diserang!!! Saat ditanya, ternyata orang-orang itu bukan orang sini! Ya ada beberapa orang sini.

Pak Dodo : Hanya enam KK yang tidak menyetujui.

Solah : Satu rw itu berapa KK?

Pak Udianto : Waduh bwanyak...

Pak Dodo : Di sini.. kalau RW banyak. Di tempat kampung kita aja, kampung sebelah, itu satu kampung saja lima puluh delapan KK.

Pak Udianto : Ya satu rw kan, misalkan lima sampe enam RT. Ya.. berarti satu RW kan... Lima puluh kali lima..

Pak Dodo : Tiga ratusan lah...

Solah : Intervalnya kan segitu. Kalau enam orang kan tinggal berapa persennya, gitu aja yang saya sampaikan??!! Hehehehe

Pak Udianto : Mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi, yang mendemo itu, langsung ditanya dari kepolisian, pihak kepolisian, aparat, eee... dia ngomong memang bukan orang sini. Karena yang didatengin pertama itu bukan tempat ini. Seharusnya kan kalau warga kan tau, gerejanya yang didemo di sini. Tapi dia datang malah di dekat rumah saya, kebetulan di samping rumah saya juga ada gereja, yang didatengi di situ! Jadi pendemonya datang ke samping rumah saya... Yang demo ini lho... Bukan! Bukan sini gerejanya! Nah, dari situlah kita bisa melihat, bahwa yang tidak menyetujui sebenarnya kan bukan warga, masyarakat lingkungan ini, tapi..

Solah : Dari masjid al-Bakri itu juga nggak, Pak?

Pak Dodo : Iya

Solah : Ooo... sama?!? Jadi yang melakukan kejadian di tahun dua ribu lima belas..

Pak Dodo : Dua ribu lima belas.... dua ribu enam belas...

Solah : Dua ribu lima belas al-Bakri... kemudian yang pas peresmian juga...

Pak Dodo : Orang luar lebih banyak!

Pak Udianto : Sejak situ ya.. iya situ itu...

Pak Udianto : Otomatis tokohnya (dari al-Bakri)! Jadi mereka mempunyai channel berhubungan dengan... mungkin... mmm... itu kebanyakan kemarin itu istilahnya-istilahnya itu dari aparat, dari Sragen, dari Karanganyar.

Solah : Kalau ini ikutnya mana?

Pak Udianto : Solo!

Solah : Kalau al-Bakri dari?

Pak Dodo : Solo juga! Sama sebelah jalan sini, sama dengan jalan besar tadi. Panjenengan ke selatan perempatan jalan ke kiri sedikit, selatan jalan kan ada... dan itu kan sudah lain dengan lokasi kita.

Solah : Nderekke nderekke?? (ikutnya... ikutnya?)

Pak Udianto : RW sudah beda RW!

Solah : Kalau kecamatannya mriki nderek pundi, Pak?

Pak Dodo : sama..

Pak Udianto : Jebres!

Solah : Kecamatan Jebres!

Pak Udianto : Iya Jebres! ya saya dulu ya, saya aja masternya ambil di UII.

Solah : Jurusan apa pak?

Pak Udianto : Teknik mesin. Saya orang UII. Saya masternya ambil di UII.

Solah : Sak niki ngastone teng pundi, Pak?

Pak Udianto : Saya dosen di ATW. Itu... hampir semuanya... saya dan temen saya dosen itu... semua dari UII. Kita memang kan ajak kerja sama dengan UII, karena apa? UII itu suatu perguruan tinggi yang

- sudah kuat, tertua, dan SOP-nya bagus. Dosen kami kebanyakan dari UGM. Tapi, saya lulus master tuh dari UII.
- Solah : Lulus master tahun berapa?
- Pak Udianto : Tahun... dua ribu berapa ya..? belum lama... saya tuh sekolah tua terus.... dua ribu sepuluh.
- Solah : Dua ribu sepuluh... jadi bapak basic-nya adalah dosen. ☺ Kalau di Gereja?
- Pak Udianto : Saya sebagai panitia. Ya... sejak saya sama dia tuh juga nyambi jadi koster. Dia bersih-bersih gereja gitu... kalau malam minggu di sini, saya ini... kalau pak Dodo ini, pagi jam setengah enam dah ke sini nyiram bunga.
- Solah : Kalau pak Widodo sendiri latar belakangnya apa, Pak?
- Pak Dodo : Nah, saya juga dari teknik mesin. kebetulan anak didiknya Pak Udianto.
- Solah : O.... Kalau master sama dari UII?
- Pak Dodo : Oh, saya enggak...
- Pak Udianto : Enggak. Dia kan langsung buka usaha sendiri.
- Solah : O... bukak usaha sendiri. Bengkel nopo?
- Pak Udianto : Dari botol... injeksi botol itu... produksi...
- Solah : Ooo... produksi botol.
- Pak Dodo : Jadi mungkin bisa kembali ke pokok permasalahan, jadi intinya begini, kita diserang itu, hanya... bukan hanya satu dua kali, beberapa kali bahkan. Kita hanya... waktu itu hanya kerja bakti, karena gedung ini sudah berdiri, kalau tidak pernah dibersihkan kan jadi rusak. Ya kita kerja bakti saja, disamperin! Pokoknya, dikira kita tuh mau diresmikan.
- Solah : Tahun pinten niku, Pak? (tahun berapa?) Paling sering...
- Pak Dodo : Sekitar dua ribu enam belas... eeee... rame-rame itu dua ribu enam belas.
- Solah : Rame-ramenya nggeh.
- Pak Dodo : Ya, dua ribu enam belas itu, hampir... kita tiap hari dipantau orang. Untuk, kita ada ngumpul di sini bareng, udah di.... maaf di depan itu kan kuburan. Ya sudah.. ya maaf... ada mata-matanya di situ. Ada orang nongkrong-nongkrong di situ. Jadi setiap gerak-gerik kita selalu diawasi. Bahkan itu tadi... yang paling parah itu, waktu tadi yang disampaikan oleh Pak Udianto. untuk ibadah itu... jadi...
- Pak Udianto : Kita orang tua sepuh-sepuh semuwa. Klotok-klotok... botak-botak itu...
- Pak Dodo : Ya bahkan ada anak yang kebetulan ikut, ada dua atau tiga orang balita, ikut di sini dengan ibunya, datang sampe nangis-nangis, karena ketakutan sekali. Gitu. Itu yang paling mengerikan.
- Pak Udianto : Kita hanya diem aja. mau apa? Loh... saya itu nuhun sewu ya... di tempat saya tu, RW delapan belas itu, pos besar itu dipake pengajian ndak papa. Diem aja kan. Padahal dia apa tanpa ijin? ya ndak ada???

- Solah : Tidak ada keadilan ya...
- Pak Dodo : Kita resmi gereja sudah menyendiri gini ndak boleh.
- Solah : Orang nikahan, setiap nikahan ada pengajian.
- Pak Udianto : Kalau pengajian, malem jumat pasti ada tuh! Keliling... ya ndak papa. Kita di tempat tersendiri, di depan kuburan aja...
- Solah : Depan kuburan, sudah dibeli ya...
- Pak Dodo : Sudah diberi Izinnya... sudah nyata... karena izin sudah ada, eee bahkan yang terakhir waktu kita kerja bakti itu, mereka ngomong pokoknya harus kita ke Pak RW. Kebetulan saya dengan Bu Suhari ini, yang ke Pak RW. Mereka pokoknya... intinya... pokoknya... jadi enggak bisa diajak ngomong, enggak bisa. Sampe di kelurahan juga demo... sampe di balai kota... jadi intinya, kalau kita mau minta perwakilan, dari saudara kita enggak mau. Intinya, datang orang dua puluh, masuk di ruangan juga dua puluh orang. Lah, maksud kita ada perwakilan kan monggo, satu dua orang sebagai perwakilan, kan bisa kita ajak bicara enak. Tapi yang sodara kita, pokoknya enggak mau, intinya, pokoknya gereja tidak boleh! Tidak boleh berjalan! ini tidak boleh untuk beraktifitas! Bahkan, waktu sebelumnya, di depan tuh, (ada tulisan) 'GKI nekat, kami jihad!' Tulisan poster-poster ngeri, Pak. Di sini... waaaaduuh... waktu kejadian, mungkin bisa dilihat di *youtube* itu, waktu itu.
- Solah : Betul, kita kita sumbernya dari situ sebenarnya. Kemudian kan, kenapa kemudian kita tertarik untuk melakukan itu gitu loh, Pak. Permasalahan utamanya adalah: tidak ada pelaporan di kepolisian. Kita ini kan, menjadi ini... Loh, *youtube*-nya ada jelas.
- Pak Udianto : Polisi itu nanti yang ngajar kita, Pak.
- Solah : Lah, itu... kemudian kan, yang kita kan, kebetulan yang melakukan penelitian adalah dari KAPOLRES Jogja. Yang sekarang sudah naik kombes gitu loh. Nah, ini disertasinya bisa jadi untuk kenaikan pangkat juga gitu ya... harapannya... harapannya... setelah disertasi ini menjadi kebijakan... jadi kebijakan... Sehingga, langkah-langkah yang seharusnya ditempuh, lah ini kan tadi kan, tidak tidak lagi di pre-emptif dan prefentif, tapi sudah represif, kita... kepolisian... yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian adalah rehabilitasi. Lah, ini menjadi laporan bagi kita, gitu kan, mungkin dari kita akan sasaya laporkan ke KAPOLRES-nya itu, ternyata KAPOLRES-nya tidak melakukan rehabilitasi ini.
- Pak Udianto : Mas, pernah adakan penelitian ndak? Mmm... tempat ibadah yang resmi yang seperti apa? *Nuwun sewu* ya, hampir mayoritas mesjid kan ndak punya ijin. Ndak ada... ijin itu kan ndak ada... semuanya ndak ada... nah ini kadang-kadang, saya *nuwun sewu* ya.. kita...*Mbang sinde Mbang silatan*. Perso?
- Solah : mboten... hehehe

- Pak Udinto : Mboten? Kalau orang jawa-ne kan, *Mban sinde Mban silatan* itu... anak sijine timbang nganggu selendang sutra, *sinde...* anak sijine diimbang nganggo *silatan* pring sing landep. Lah, kita... kita tuh pas diemban negoro Indonesia tuh, dengan *Mban silatan pring*. digendong *nganggo silatan pring ngasi kebeler-beler* ya kita itu; di sisi, saudara kita diimbang nganggo selendang sutra.
- Pak Dodo : Jadi saya boleh menambahkan, Pak. Yang namanya GKI, setiap mendirikan tempat ibadah, Gereja, pasti dia pasti sudah ada, tidak mungkin kita mendirikan gereja tanpa ada persetujuan dari penduduk sekitar, masyarakat sekitar, IMB, atau surat-surat lain, pasti kita sudah komplit. Kalau tidak, tidak bisa mau berani, enggak bisa.
- Pak Udianto : Ndak bisa, kita yang nggak mau!
- Pak Dodo : Itu yang jadi patokan itu. Jadi, selama Gereja Kristen Indonesia akan didirikan, ijin semua pasti komplet. Kalau enggak, enggak mungkin. Itu bisa untuk menjadi patokan. Kalau kita, untuk yang lain, kita enggak tahu. Tapi, intinya, kalau kita mau mendirikan yayasan kristen, yang gereja GKI, itu pasti komplit.
- Pak Udianto : Saya sama FKUB itu rapatnya di Pak Agus sebelah ini, sampe dipanggil semua, ditembate pak agus ini. Saya datang. Saya enggak tahu, kalau mendirikan masjid pakai FKUB ndak?
- Solah : Ndak ada yang bisa jawab...
- Pak Dodo : Kan, mereka ...mmm... kenapa kita gereja tidak boleh dipake? eee boleh untuk beraktivitas berarti, karena mereka ngomongnya se... dekat sini kan sudah ada gereja?! Kok sini ada gereja lagi?! Nah, seperti itu mereka ngomong. Nggak boleh, kog sana gereja sini gereja. Ya mohon maaf, kalau mereka tempat ibadah pun, hampir mungkin hanya berapa anu kan, banyak sekali. Nah, padahal gereja tuh kan juga alirannya lain-lain. Begitu juga dengan saudara kita, ada yang dari NU, Muhammadiyah, Ahmadiyah atau mungkin apa kan?! Seperti mereka, tapi kan nggak tau. Jadi, kita ada GKI, ada Katolik, ada ABP, GKJ. Mereka tahunya, sana gereja, enggak boleh.
- Pak Udianto : Tapi ya puji tuhan, sekarang sudah aman setelah peresmian itu.
- Solah : Mulai aman tahun pinten?
- Pak Dodo : ya setelah peresmian itu. Jadi, begini, pak... setelah kita diresmikan, itu malam.... jam dua malam. mereka pasang spanduk-spanduk begitu. Oh gitu to, bapak kapolres datang di tempat ini, kita nemeni jam sembilan malam, jam sepuluh malem, bapak kapolres datang, besok diresmikan, mereka kan pasti untuk mensterilkan. Mereka tahu, dulu itu jam dua malam, dia sudah nyopot spanduk pasti, jalan distop semua, enggak bisa akses masuk, akhirnya Pak Wali itu lewatnya dari belakang, naik barakuda, barang udah sampe masuk di sini, dari belakang sana, jadi, nggak bisa lewat jalan besar, ditutup semua akses yang sini.

Jemaat ditanya ‘kamu mau ke mana mau ke mana?’ Seperti diintimidasi. Enggak boleh! Gitu loh!

Solah : itu tahun dua ribu tujuh belas?

Pak Dodo : Kenapa? Eee... enam belas.. enam belas... eee tujuh belas. Jadi seperti itu. Jadi memang, waktu itu, sebenarnya... memang betul-betul, seperti... mohon maaf...

Solah : Mencekam?

Pak Dodo : Iya! Jadi kita bener-bener nggak berani mebayangkan. Barang-barang, sudah sampe masuk di gereja, sampe.. wah.. tapi begitu selesai, sudah ndak ada masalah sampai hari ini. Bahkan, kita mengadakan terus ajang silaturahmi dengan beliau beliau, bahkan beliau kan buka toko besi yang demo itu. Beliau sebagai takmir masjid, kita adakan silaturahmi terus, kita komunikasi,

Pak Udianto : Kita aja ambil batu juga dari dia.

Pak Dodo : Beliau kalau kita beli semen satu sak pun, suruh ngirim beliau kirim ke gereja. Nah, mungkin beliau menyadari atau bagaimana kita enggak ngerti, tapi puji Tuhan karena kita sudah selalu menggunakan pendekatan terus, sebenarnya beliau baik, karena waktu beliau masih muda, itu termasuk temen sepak bola dengan saya. Cuman kalau untuk ini, beliau terus terang, ‘Mas Dodo’ kalau biasanya beliau manggil seperti itu. Kalau untuk yang lain monggo, kita enggak papa, tapi kalau untuk urusan yang ini, kita tidak bisa. Seperti itu.

Solah : Asmonipun sinten nggeh? Beliaunya itu?

Pak Dodo : Mmm.. Pak sulaiman tuh takmirnya, kalau yang adiknya, yang Pak Parno ini yang melakukan

Solah : Koordinatonya pak parno itu.. toko pesen besinya teng pundi?

Pak Dodo : Selatan perempatan, maju dikit, maju dikit lagi,

Pak Udianto : Maju dikit sana, Mbah So itu

Pak Dodo : Di depan, panjenengan keluar jalan besar, maju dikit, paling dua puluh M.

Solah : Nderekke mriki pundi? Mojosongo?

Pak Dodo : Sini dah beda RW

Solah : Oh mpun benten RW. Nderekke teng mesjid Bakri mriko?

Pak Dodo : Masjidkan timurnya itu..

Pak Udianto : Iya.. ya kan.. seakan-akan kan jadi satu sama rumah di belakang beliau.

Pak Dodo : Sebenarnya Pak sulaiman tuh baik. Orang yang baik. Cuman.. ya mungkin ada lah yang namanya orang banyak, satu dua, halus orangnya baik pak sulaiman, bagus,

Solah : dikompor kompori gitu nggeh?

Pak Dodo : Bisa jadi seperti itu. Yang namanya orang banyak, mas, kita satu keluarga pun, mungkin ada satu dua yang selenco. apalagi dalam...

Pak Udianto : Pak Sulaiman baik!!

Pak Dodo : Baik orangnya.

- Pak Udianto : Kita ambil material di dia. Sama adik saya itu pemborong, itu ambil material ya dia...
- Solah : Sebelumnya baik.. sesudah ini juga baik?
- Pak Dodo : Baik.. ya cuman tadi, mungkin ada yang namanya orang ngomporin satu dua..
- Solah : dikasih sumbu gitu ya...
- Pak Dodo : Ya kalau pak Sulaiman baik
- Pak Udianto : Nggak papa, sampe sekarang kalau ketemu saya juga... Ibu kapolsek itu kalau kebaktian itu di sini lho. Ibu Yuliana itu, kalau kebaktian di sini...
- Pak Dodo : ..Hampir tiap hari muter-muter. Kemarin malam sebelum saya ke sini, Pak Ud, dengan intel, kasat intelnya ngebel saya, di belakang saya, mau... tahu dia saya mau keluar rumah, dia ngebel-ngebel, itu mobilnya beliau.
- Solah : Kok bisa, pas itu KAPOLSEK-nya malah yang diwawancarai njenengan gitu ya, kok bukan mencoba melakukan mediasi. Harusnya kan beliau-beliau itu melakukan mediasi dan membaca realita, bahwa yang melakukan adalah mesjid Bakri. Itu kan mudah. Kan ada intel...
- Pak Udianto : Kita pernah diberitahu oleh Reserse... Ya pokoknya enggak papa, kita ada, kita... kita pantau gitu aja. Kita kan ndak masalah. Nuwun sewu ya... ibaratnya kita tuh dikapakke, monggo kerso. Apa ada toh... dia itu *nuwun sewu* di pihak kita itu, dia sama saudara itu... trus koreksi. Ndak pernah sebetulnya.
- Pak Dodo : Kalau aparat gini, Mas. Waktu di mana... selalu... sebetulnya, kita sudah mengadakan komunikasi mediasi, selalu... begitu. Nah, cuman aparat eeee strateginya bagaimana kita kan nggak ngerti. Nah, cuman waktu mau peresmian, memang WAKAPOLRES hadir. Di sini juga mengadakan mediasi, kita sendiri juga dipanggil. Saya dengan... dari... mmm... pimpinannya Pak Pendeta... kemarin sapa pak? (melihat ke arah Pak Ud) eeee... Yang dari GKML...
- Pak Udianto : Oooo... Iya... anu.... Pak Paulus Hartono.
- Pak Dodo : Ketua... mengadakan mediasi juga. Pak WAKAPOLRES juga menyampaikan, bahwa ini tuh... seperti ini... komplit... lah panjenengan kalau memang mau.. nggak setuju, jangan mendemo gerejanya! Demolah ke pengadilan. Tanya ke pengadilan, ke yang meresmikan, yang menyetujui itu siapa? Jadi, jangan main anu... merusak gereja! enggak boleh!
- Pak Udianto : Gitu kan, kadang-kadang... ya *nuwun sewu* ya... kadang-kadang, kita itu kan juga masyarakatnya... (bilang) “*Ngapusi Ngapusi Ngapusi!!!*” Dia itu kan hanya nuduh gitu gitu, to! masyarakat tuh kan, nggak pada ndak tau. Tergantung seng ngandani to itu. “*Ngapusi Ngapusi Ngapusi!!!*” itu Apa???
- Pak Dodo : Mungkin keluarga belakang tahu, bisa contoh, bagaimana dengan adanya gereja..

- Solah : Tadi kan, saya sudah wawancara dengan pak RT. Lah, apa namanya, ya saya cuma ingin melihat saja, sebenarnya yang menolak itu kan... karena beritanya itu masyarakat...
- Pak Udianto : Dia mengatasnamakan gitu pastinya. Artinya... opo sing... mangkat gereja iku yo ora masyarakat?
- Pak Dodo : Pak RT-nya menyampaikan gimana?
- Solah : Menyampaikannya seperti yang njenengan sampaikan tadi, (menirukan suara Pak RT) “itu bukan orang sini... *wong* kita... (Pak RT menyampaikan...) kita itu sangat rukun!” (dari situ kan) sudah ada preventif-nya bahkan. Pre-emptifnya saja sudah ada. Paling mentok, tidak menyampaikan selamat natal, itu saja jarang. Terimakasih, Pak mungkin ini sudah sangat luar biasa... Datanya sudah sangat komprehensif.

